

RENCANA STRATEGIS

RENSTRA

TAHUN 2025 - 2029

KAB. TANJUNG JABUNG BARAT





BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 25 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 123 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, untuk Renstra Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 03 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2025-2029

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tanjung Jabung Barat sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal.
10. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
11. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
12. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
13. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan

pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

14. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
15. Kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
16. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
17. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
18. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
19. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan penetapan Renstra Perangkat Daerah adalah untuk menjamin strategi, kebijakan, tujuan, sasaran, dan program, yang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah disusun berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029, dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Dasar kegunaan Renstra Perangkat Daerah;
- b. Penetapan Renstra; dan
- c. Evaluasi dan Pelaporan hasil Renstra Perangkat Daerah.

BAB III

DASAR KEGUNAAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

Renstra Perangkat Daerah digunakan untuk :

- a. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
- b. Sebagai pedoman penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- c. Sebagai dasar penyusunan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah; dan
- d. Sebagai dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan Perangkat Daerah.

BAB IV PENETAPAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

- (1) Renstra Perangkat Daerah yang ditetapkan adalah Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah mendapat pengesahan dari Bupati dan disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA;
- (2) Renstra Perangkat Daerah yang ditetapkan meliputi tujuan dan sasaran, arah kebijakan, rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan, kinerja penyelenggaraan bidang urusan;
- (3) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V EVALUASI DAN PELAPORAN HASIL RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renstra-nya dengan menggunakan Formulir E.80. Evaluasi terhadap Hasil Renstra Perangkat Daerah Kabupaten.
- (2) Dengan menggunakan hasil evaluasi Renstra Perangkat Daerah, Perangkat Daerah setiap bulan Januari melaporkan hasil evaluasi kepada bupati melalui Kepala BAPPEDA kabupaten.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perencanaan dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, fasilitasi, konsultasi dan evaluasi.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai target dan pendanaan tahun 2030 dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 menjadi acuan dalam penyusunan RKPD Tahun 2030.
- (2) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan menghindari kekosongan rencana pembangunan Daerah, Bupati pada tahun terakhir masa jabatannya menyusun RKPD.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD tahun pertama periode masa jabatan Bupati berikutnya.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 19 SEPTEMBER 2025
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,



ANWAR SADAT

Diundangkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 19 SEPTEMBER 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

HERMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2025
NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG
BARAT TAHUN 2025-2029

Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2025-2029 yang ditetapkan sebagai berikut:

1. RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH
2. RENSTRA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
3. RENSTRA INSPEKTORAT
4. RENSTRA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
5. RENSTRA DINAS KESEHATAN
6. RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
7. RENSTRA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
8. RENSTRA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
9. RENSTRA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
10. RENSTRA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
11. RENSTRA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12. RENSTRA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
13. RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
14. RENSTRA DINAS KETAHANAN PANGAN
15. RENSTRA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
16. RENSTRA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
17. RENSTRA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
18. RENSTRA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
19. RENSTRA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
20. RENSTRA DINAS SOSIAL
21. RENSTRA DINAS TENAGA KERJA
22. RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN
23. RENSTRA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
24. RENSTRA DINAS PERIKANAN
25. RENSTRA DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
26. RENSTRA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
27. RENSTRA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
28. RENSTRA BADAN PENDAPATAN DAERAH
29. RENSTRA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
30. RENSTRA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
31. RENSTRA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
32. RENSTRA KECAMATAN TUNGKAL ILIR
33. RENSTRA KECAMATAN BETARA
34. RENSTRA KECAMATAN PENGABUAN

35. RENSTRA KECAMATAN MERLUNG
36. RENSTRA KECAMATAN TUNGKAL ULU
37. RENSTRA KECAMATAN SEBERANG KOTA
38. RENSTRA KECAMATAN BRAM ITAM
39. RENSTRA KECAMATAN KUALA BETARA
40. RENSTRA KECAMATAN SENYERANG
41. RENSTRA KECAMATAN MUARA PAPALIK
42. RENSTRA KECAMATAN RENAH MENDALUH
43. RENSTRA KECAMATAN TEBING TINGGI
44. RENSTRA KECAMATAN BATANG ASAM
45. RS UMUM DAERAH K.H. DAUD ARIF KUALA TUNGKAL
46. RS UMUM DAERAH SURYAH KHAIRUDDIN MERLUNG

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,



ANWAR SADAT



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025–2029 dapat disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan selama lima tahun ke depan.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Renstra ini disusun sebagai upaya meningkatkan pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat khususnya dalam pencapaian indikator kinerja. Dan menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran yang akan dibiayai oleh APBD Tahun 2025 dan 2029.

Demikian dokumen Renstra ini kami sampaikan semoga dapat diterima, dilaksanakan dan mendapat tanggapan yang positif dari semua pihak

Kuala Tungkal, Februari 2026

Penanggung Jawab
Plt. **KEPALA DINAS PERHUBUNGAN**


AGUS SUMANTO S.H., M.H
Pembina J/ a
NIP. 19870811 201101 1 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 LANDASAN HUKUM	6
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	8
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN	11
2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN	31
2.2 SUMBER DAYA DINAS PERHUBUNGAN	42
2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN	19
2.4 KELOMPOK SASARAN LAYANAN DINAS PERHUBUNGAN	27
2.5 POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL	51
2.6 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN	52
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	67
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	75
4.1 KERANGKA RUMUSAN PROGRAM	75
4.2 PROGRAM DAN KEGIATAN	76
4.3 URAIAN SUB KEGIATAN BESERTA KINERJA, INDIKATOR, TARGET DAN PAGU INDIKATIF	137
4.4 URAIAN SUB KEGIATAN DALAM RANGKA MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	190
4.4 TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERHUBUNGAN	191
4.6 TARGET KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)	194
BAB V PENUTUP	196



BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 disusun sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang menyebutkan bahwa Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 merupakan landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan karena memuat satu kesatuan tentang tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Jangka Menengah, dan Tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 1 Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam jangka waktu 5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi OPD serta disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Fungsi Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD dalam Pembangunan Daerah. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Penyelenggaraan pelayanan dan pembangunan bidang perhubungan diharapkan mampu menghubungkan wilayah sebagai satu kesatuan. Namun demikian, selain keberhasilan yang telah dicapai, masih banyak tantangan yang dihadapi untuk pembangunan kedepan sejalan dengan perubahan dan dinamika lingkungan strategis, sementara disisi lain

RENSTRA (2025-2029)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

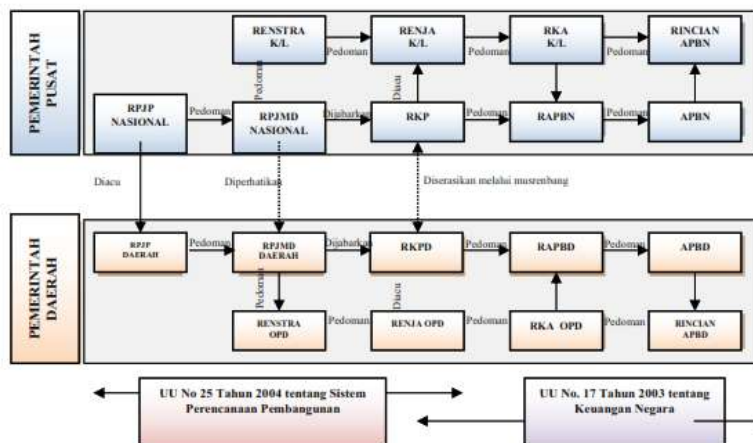
transportasi terus dituntut untuk melaksanakan fungsi penunjang dan pendorong aktivitas sosial ekonomi ke seluruh pelosok.

Perencanaan dan pengendalian pembangunan adalah urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/ Kota berdasarkan Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perencanaan pembangunan daerah yang terpadu diperlukan untuk menjamin pelaksanaan pembangunan daerah yang mantap dan berkesinambungan, dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya daerah, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan perkembangan regional dan global.

Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025 - 2029 disusun sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan di bidang perhubungan khususnya dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan bidang perhubungan dalam kurun lima tahun ke depan.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat (RENSTRA) Tahun 2025-2029 disusun atas dasar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (RPJMD) Tahun 2025-2029 dan memperhatikan keselarasan dengan dokumen perencanaan lain yang bersifat vertikal seperti Renstra Kementerian sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 80 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 dan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau serta memperhatikan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 – 2044 dan memperhatikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis(KLHS). Keterkaitan Renstra dapat dilihat pada Gambar berikut :

Gambar I.1
Hubungan Renstra OPD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Baik Tingkat Pusat Maupun Daerah



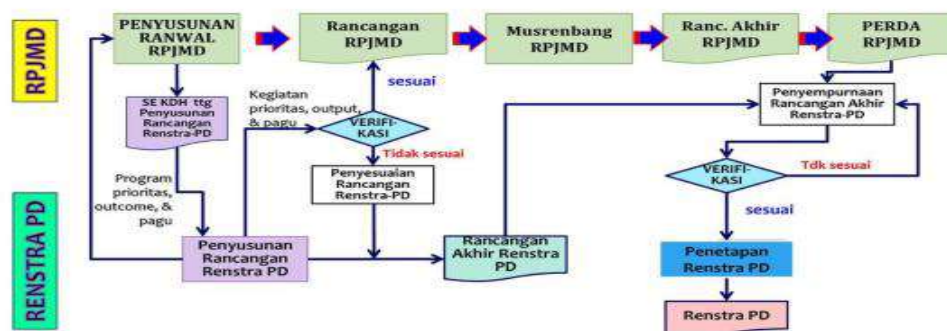
upaten Tanjung
su strategis dan
di Kota Batam.



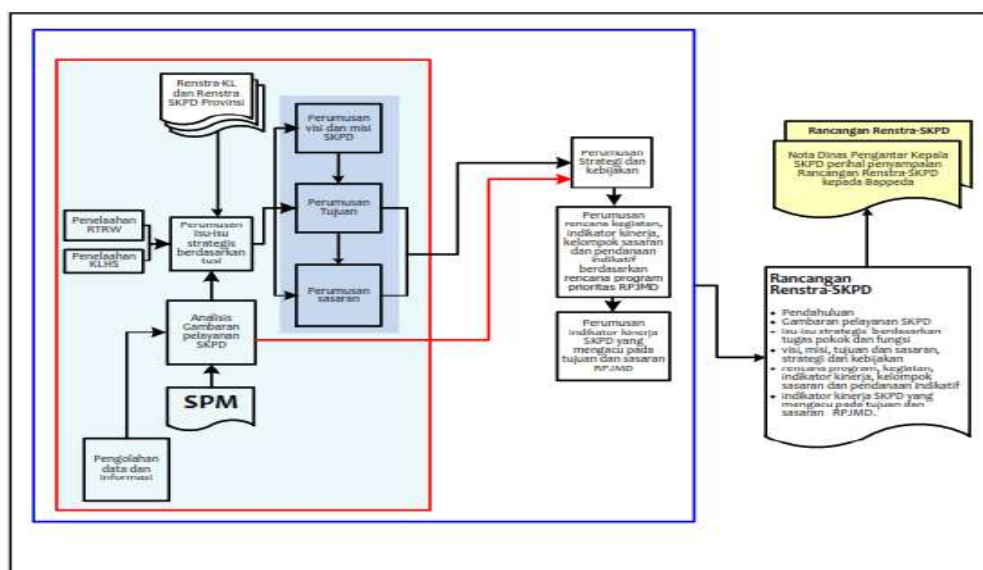
Rumusan permasalahan dikumpulkan oleh anggota tim penyusun Renstra Dinas Perhubungan dan hasil evaluasi pembangunan di bidang perhubungan serta mengacu pada Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam. Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan yang diawali dengan persiapan penyusunan Renstra, penyusunan rancangan awal, Penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, penyusunan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah dan Penetapan Renstra Perangkat Daerah. Secara diagramatik hal ini disajikan pada Gambar Berikut :

Gambar 1.2

Keterkaitan Tahapan Penyusunan Renstra PD dengan RPJMD



GAMBAR 1.3 Tahapan penyusunan rancangan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat





Sebagai salah satu instansi daerah yang bertugas melakukan kegiatan pembangunan dan pengamanan di bidang transportasi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat senantiasa dituntut untuk selalu melakukan perubahan dan mengembangkan langkah-langkah strategis dan realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil. Adanya perubahan dan perkembangan lingkungan baik pada skala dalam negeri, global yang dinamis maupun tuntutan Reformasi Birokrasi harus menjadi pertimbangan utama dalam perencanaan ke depan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat disusun melalui dasar :

- a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan nasional;
- b. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- d. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- e. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;
- i. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rancangan pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rancangan pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
- j. Peraturan Menteri Nomor 51 Tahun 2011 tentang Terminal Khusus dan Terminal Kepentingan Sendiri;



- k. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024-2044;
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029;
- n. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan pada Dinas Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud :

Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dimaksudkan untuk menyediakan tolak ukur pelaksanaan strategi pembangunan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan posisi dan peran yang diemban, antara lain :

- 1. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan dan pembangunan, sehingga tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2025-2029 dapat tercapai.
- 2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
- 3. Menjadi kerangka dasar dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

b. Tujuan :

- 1. Tujuan penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu menetapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- 2. Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan penjabaran visi – misi Kepala Daerah untuk mewujudkan target yang diinginkan priode 5 (lima) tahun mendatang.
- 3. Memberikan pedoman alat pengendali kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal pada tahun 2025 – 2029.



1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika penulisan dan susunan garis besar isi dokumen Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

1. Latar belakang

Memuat uraian pendahuluan yang secara rinci menggambarkan kondisi yang mendasari disusunnya Renstra secara umum.

2. Landasan Hukum

Memuat peraturan yang relevan dalam Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan yang terdiri dari Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

3. Maksud dan Tujuan

Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang mengacu RPJMD, Penjabaran Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati, Rencana Kinerja Tahunan dan Strategi Pengelolaan Organisasi dalam pencapaian keberhasilan target pembangunan perhubungan.

4. Sistematika Penulisan

Memuat uraian singkat tentang masing-masing bab dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Perhubungan

1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan

Berisikan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan sesuai dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023.

2. Sumber Daya Dinas Perhubungan

Memuat kondisi ketersediaan sumber daya di Dinas Perhubungan dalam menjalankan dan melaksanakan Program dan Kegiatan pembangunan Perhubungan.

3. Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan

Memuat penentuan target Indikator Kinerja Utama dan pencapaian keberhasilan selama 5 (lima) tahun pada Dinas Perhubungan sebagai tolak ukur pencapaian keberhasilan di masa mendatang

4. Kelompok Sasaran Layanan Dinas Perhubungan

Berisi kelompok sasaran pelayanan Perhubungan pada Dinas Perhubungan.

5. Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Perhubungan



Menggambarkan kondisi atau realita yang dapat disimpulkan dari kesenjangan realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia dan mengidentifikasi isu strategis sesuai dengan lingkungan dinamis yaitu isu nasional, regional, dan daerah yang dapat mempengaruhi Dinas Perhubungan baik secara langsung ataupun tidak langsung serta potensi daerah yang menjadi kewenangan Dinas Perhubungan yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan Masyarakat.

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

1. Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029.
2. Strategi dan arah kebijakan Dinas Perhubungan dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029.
3. Program Prioritas Pembangunan Dinas Perhubungan

Bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

1. Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan;
2. Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;
3. Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan Daerah;
4. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan;
5. Target kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Bab V Penutup

Berisi uraian tentang kesimpulan, kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029, khususnya arahan agar Renstra dijadikan pedoman penyusunan Rencana Kerja atau Rencana Kinerja Tahunan dan sebagai dasar untuk evaluasi kinerja Dinas Perhubungan.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS OPD

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang perhubungan.

1. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 529, Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan dibidang lalu lintas dan angkutan, bidang prasarana serta bidang pengawasan dan keselamatan;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang lalu lintas dan angkutan, bidang prasarana serta bidang pengawasan dan keselamatan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang lalu lintas dan angkutan, bidang prasarana serta bidang pengawasan dan keselamatan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas dibidang lalu lintas dan angkutan, bidang prasarana serta bidang pengawasan dan keselamatan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

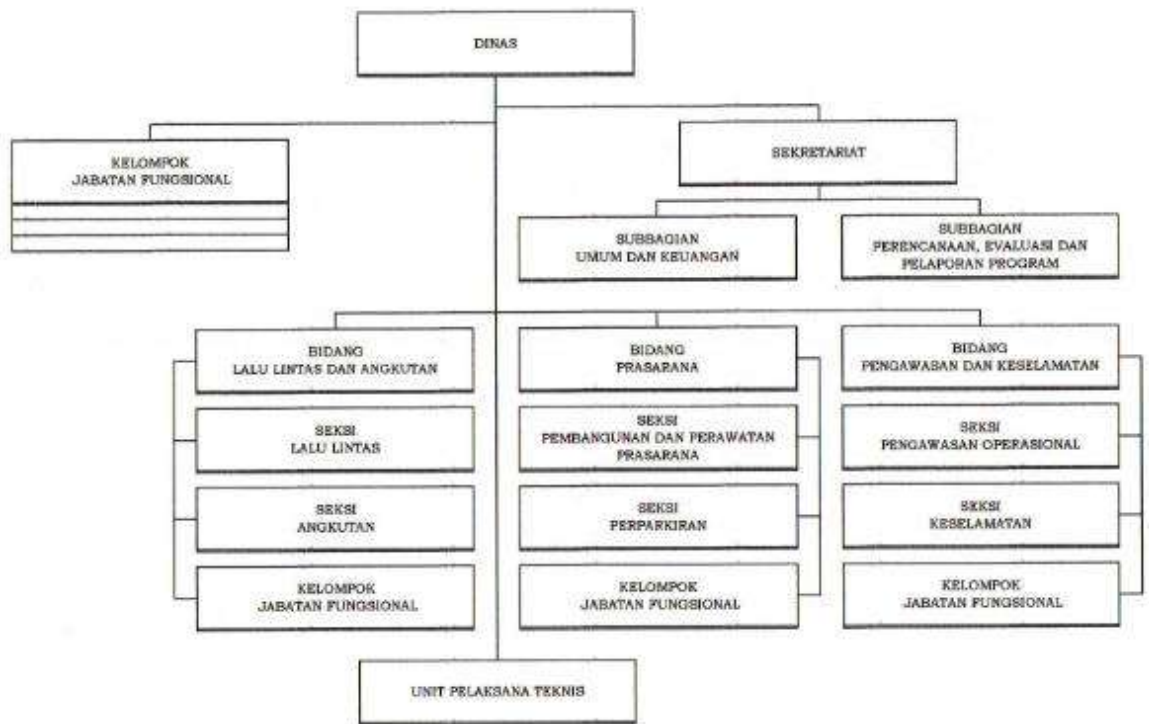
Susunan organisasi aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri dari :

- a. Sekretariat terdiri atas
 1. Subbagian Umum dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program.
- b. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan terdiri atas:
 1. Seksi Lalu Lintas;
 2. Seksi Angkutan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Prasarana terdiri atas:
 1. Seksi Pembangunan dan Perawatan Prasarana;
 2. Seksi Perparkiran; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Pengawasan dan Keselamatan
 1. Seksi Pengawasan Operasional;
 2. Seksi Keselamatan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.



- e. Unit Pelaksana Teknis.

**GAMBAR 2.1 STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT**



2. Uraian Tugas

Dinas Perhubungan adalah unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Perhubungan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Selanjutnya tugas pokok dan rincin tugas dari masing masing jabatan sebagaimana tersebut di atas ditaur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 33 Tahun 2025 perubahan dari Peraturan Bupati Nomor 25 tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, sebagai berikut:

1) SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas perhubungan. Dalam melaksanakan tugas, sekretariat memiliki fungsi :

- a. Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan;



- b. Pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan keuangan meliputi : ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan asset dan perlengkapan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi dan tindak lanjut LHP;
- c. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang – undangan;
- d. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2) SUBBAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, ketatausahaan, penatausahaan asset, kerja sama, kehumasan, ketatalaksanaan, dan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup umum dan keuangan;
- b. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, promosi, kesepakatan, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
- c. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, tata naskah dinas, dan penataan kearsipan;
- d. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi keuangan yang meliputi kegiatan pengelolaan dan penendalian keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan (LHP);
- e. Melakukan pengelolaan dan penyusunan laporan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, peraturan perundang – undangan, tata laksana dan hubungan masyarakat;
- f. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan urusan gaji pegawai, pengendalian keuangan, pengujian dan penebitan surat perintah membayar (SPM), perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut LHP serta penyusunan Laporan Keuangan
- g. Melakukan pemeliharaan dan pengelolaan asset dan perlengkapan, pengelolaan inventaris barang milik negara dan penyusunan laporan asset;



- h. Melakukan penyiapan bahan evaluasi dan laporan administrasi keuangan;
 - i. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/intansi terkait sesuai lingkup tugas; dan
 - j. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.
- 3) SUBBAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PROGRAM

Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, evaluasi dan pelaporan program. Dalam melaksanakan tugasnya, subbagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan program memiliki fungsi :

- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup perencanaan, evaluasi dan pelaporan program;
 - b. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan program dan anggaran;
 - c. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dari bidang – bidang untuk bahan rumusan kebijakan teknis dan operasional rencana kerja;
 - d. Melakukan penghimpunan, pengolahan dan penyiapan bahan evaluasi dan penilaian kinerja;
 - e. Melakukan penyiapan bahan koordinasi perencanaan dan anggaran meliputi anggaran APBD, APBN, PHLN baik kabupaten, provinsi dan pusat secara lintas program;
 - f. Melakukan penyusunan Laporan Kinerja (LKJ), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU_ dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD); dan
 - g. Melakukan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.
- 4) BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN

Bidang perhubungan darat memiliki tugas merumuskan kebijakan, melaksanakan kebijakan, menyusun norma, standar, dan prosedur, bimbingan teknis dan supervise, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, system lalu lintas dan angkutan jalan, serta keselamatan transportasi di bidang perhubungan darat.

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan menyelenggarakan fungsi:



- a. penyusunan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja di bidang lalu lintas, angkutan dan pengujian sarana;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang lalu lintas, angkutan dan pengujian sarana;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan operasi angkutan dan manajemen rekayasa lalu lintas dibidang lalu lintas, angkutan dan pengujian sarana;
- d. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan serta pengawasan dan pengendalian operasional penggunaan jalan dibidang lalu lintas, angkutan dan pengujian sarana; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Seksi Lalu Lintas

1) Seksi Lalu Lintas

Seksi Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan di bidang lalu lintas. Seksi Lalu Lintas mempunyai uraian tugas pekerjaan:

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penetapan rencana induk jaringan LLAJ Daerah;
- c. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam Daerah yang terletak pada jaringan jalan Daerah dan/atau jaringan jalur kereta api Daerah;
- d. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam Daerah;
- e. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penetapan rencana induk perkeretaapian Daerah;
- f. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penetapan jaringan jalur kereta api dalam Daerah;
- g. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian Daerah;



- h. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyediaan perlengkapan jalan di jalan Daerah;
- i. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pelaksanaan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Daerah;
- j. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan Daerah;
- k. melakukan monitoring, evaluasi, pelaporan serta pendokumentasian pelaksanaan kegiatan seksi; dan
- l. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

2) Seksi Angkutan

Seksi Angkutan melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan di bidang angkutan. Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Angkutan mempunyai uraian tugas pekerjaan:

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam Daerah;
- c. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam Daerah;
- d. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam Daerah;
- e. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penetapan rencana umum jaringan trayek perdesaan dalam Daerah;
- f. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam Daerah;
- g. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam Daerah serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah;



- h. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam Daerah dan beroperasi pada lintas pelabuhan di Daerah;
- i. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Daerah;
- j. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penerbitan trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam Daerah;
- k. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam Daerah;
- l. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas dalam Daerah;
- m. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam Daerah;
- n. kebijakan penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah
- o. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perorangan warga negara atau badan usaha;
- p. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai domisili badan usaha;
- q. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam Daerah;
- r. melakukan monitoring, evaluasi, pelaporan serta pendokumentasian pelaksanaan kegiatan seksi; dan



- s. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

5) BIDANG PRASARANA

Bidang Prasarana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan dibidang prasarana, pengembangan transportasi dan Perparkiran. penyusunan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja di bidang lalu lintas, angkutan dan pengujian sarana, Dalam melaksanakan tugas Bidang Prasarana menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja dibidang prasarana, pengembangan transportasi dan Perparkiran;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang prasarana, pengembangan transportasi dan perparkiran;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang prasarana, pengembangan transportasi dan perparkiran;
- d. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan dibidang prasarana, pengembangan transportasi dan perparkiran; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Seksi Pembangunan dan Perawatan Prasarana

Seksi Pembangunan dan Perawatan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan di bidang Pembangunan dan Perawatan Prasarana. Dalam melaksanakan tugas Seksi Pembangunan dan Perawatan Prasarana mempunyai uraian tugas pekerjaan:

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan terminal penumpang tipe C;
- c. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal;
- d. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau;



- e. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal;
- f. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau;
- g. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penerbitan izin usaha badan usaha Pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal;
- h. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penerbitan izin pembangunan pelabuhan untuk berlabuh;
- i. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan penumpukan lokal;
- j. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
- k. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
- l. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penerbitan izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal;
- m. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter;
- n. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkerataapian umum yang jaringan jalurnya dalam Daerah;
- o. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api dalam Daerah;
- p. melakukan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian pelaksanaan kegiatan seksi; dan
- q. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

2) Seksi Perparkiran



Seksi Perparkiran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan dibidang perparkiran. Dalam melaksanakan tugas Seksi Perparkiran mempunyai uraian tugas pekerjaan:

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. perumusan perencanaan dan kebijakan teknis tata kelola perparkiran;
- c. mengelola operasional parkir termasuk penentuan lokasi parkir, pengaturan arus lalu lintas disekitar area parkir dan pengawasan parkir liar;
- d. melaksanakan pelayanan perizinan pengelola parkir;
- e. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelola parkir;
- f. melaksanakan pemungutan, pencatatan, dan penagihan retribusi parkir;
- g. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana parkir milik pemerintah daerah;
- h. melaksanakan pemeliharaan keamanan internal sarana dan prasarana parkir milik pemerintah daerah;
- i. melakukan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian pelaksanaan kegiatan seksi; dan
- j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya

6) BIDANG PENGAWASAN DAN KESELAMATAN

Bidang Pengawasan dan Keselamatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan dibidang Pengawasan dan Keselamatan transportasi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana Bidang Pengawasan dan Keselamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja di bidang Pengawasan dan Keselamatan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang Pengawasan dan Keselamatan;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang Pengawasan dan Keselamatan;
- d. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan dibidang Pengawasan dan Keselamatan; dan



- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 1) Seksi Pengawasan Operasional

Seksi Pengawasan Operasional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, monitoring, pengendalian operasional dan evaluasi serta pelaporan dibidang Pengawasan Operasional. Dalam melaksanakan tugas Seksi Pengawasan Operasional mempunyai uraian tugas pekerjaan:

 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
 - b. melakukan penyiapan rencana kerja pengawasan transportasi secara berkala dan identifikasi potensi pelanggaran dan permasalahan operasional dilapangan;
 - c. menghimpun, mempelajari peraturan perundangundangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis bidang pengawasan transportasi;
 - d. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengawasan transportasi;
 - e. melakukan pelaksanaan pengawasan dan operasional kebijakan manajemen transportasi;
 - f. melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, pengawasan, dan operasional transportasi;
 - g. menyusun kebijakan operasional dibidang penegakan hukum lalu lintas dan angkutan;
 - h. melaksanakan pengawasan terhadap operasional kendaraan angkutan umum dan barang, mengawasi pelaksanaan ketentuan teknis laik jalan kendaraan dan pengecekan izin dan dokumen kendaraan;
 - i. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penegakan hukum oleh PPNS;
 - b. melaksanakan koordinasi penertiban lalu lintas dan angkutan lintas wilayah Kota/Kabupaten Administrasi;
 - c. melaksanakan pengawasan dan operasional penegakan hukum lalu lintas dan angkutan lintas wilayah Kota/Kabupaten Administrasi;
 - d. melaksanakan koordinasi penegakan hukum lalu lintas dan angkutan lintas wilayah Kota/Kabupaten Administrasi;
 - e. melaksanakan penyidikan dan penindakan administratif terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan lintas wilayah Kota/Kabupaten Administrasi;



- f. melakukan sosialisasi peraturan perundangundangan dan pembinaan terkait transportasi kepada operator dan pengemudi kendaraan;
 - g. melakukan monitoring, evaluasi, pelaporan, rekomendasi tindak lanjut dan pendokumentasian pelaksanaan kegiatan seksi; dan
 - h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.
- 2) Seksi keselamatan
- Seksi Keselamatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan dibidang keselamatan. Dalam melaksanakan tugas Seksi Keselamatan mempunyai uraian tugas pekerjaan:
- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
 - b. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas di jalan Daerah;
 - c. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan laik fungsi jalan keselamatan sarana dan prasarana;
 - d. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan fasilitasi manajemen dan penanganan keselamatan di jalan Daerah;
 - e. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan fasilitasi promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - f. keselamatan perusahaan angkutan umum;
 - g. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan fasilitasi kelaikan kendaraan;
 - h. melakukan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian pelaksanaan kegiatan seksi; dan
 - i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Sumber Daya Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri dari sumber daya manusia dan sumber daya lainnya seperti peralatan/ perlengkapan/ asset

1. Kondisi Infrastruktur Dinas Perhubungan



Untuk mendukung pertumbuhan perekonomian Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang berdaya saing diperlukan peningkatan infrastruktur perhubungan sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan transportasi, utamanya Konektivitas Dari Desa Ke Kota, Keselamatan Perjalanan Transportasi dan Kualitas Layanan Angkutan Umum.

2. Infrastruktur Pendukung Konektivitas Transportasi

a. Angkutan Jalan

Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan. Angkutan Jalan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat diantaranya angkutan pedesaan yang melampaui 1 (satu) daerah Kabupaten dalam 1 (satu daerah Provinsi).

Angkutan pedesaan adalah angkutan pada jaringan trayek pedesaan yang melayani suatu kawasan pedesaan dan tidak bersinggungan dengan trayek angkutan perkotaan. Dalam Hal ini Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai kewenangan terhadap jaringan trayek pedesaan yang melampaui 1 (satu) daerah kabupaten dalam 1 (satu daerah Provinsi, adapun trayek Angkutan pedesaan di Provinsi.

Tabel 2.1

Kebutuhan Trayek Angkutan Pedesaan Yang Melampaui 1 (satu) daerah kabupaten dalam 1 (satu daerah Provinsi)

NO	NAMA LOKET	TRAYEK	JUMLAH KENDARAAN
1	2		3
1	Terminal Kota	Kuala Tungkal - Desa Pembengis - - Sei Saren Kuala Tungkal - Desa Serdang Jaya - - Desa Pematang Lumut - Batas Kab. Tanjung Barat Kuala Tungkal -Simpang T Desa - Parit Pudir - Teluk Nilau Kuala Tungkal -Desa Purwodadi - - Tebing Tinggi	25

RENSTRA (2025-2029)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

		Kuala Tungkal -Kuala Dasa - Pel. - Dagang - Batang Asam	
		Kuala Tungkal -Merlung - Lubuk - Kambing	
		Kuala Tungkal -Merlung - Senyerang - - Teluk Ketapang	
2	PO. PIPPOS	- Kuala Tungkal - Jambi - Kuala Tungkal - Jambi	15
		- Kuala Tungkal - Linggau	
		- Kuala Tungkal -Pekan Baru	
		- Kuala Tungkal - Palembang	
3	PO. RATU INTAN	- Kuala Tungkal - Curup - Kuala Tungkal - Lampung - Kuala Tungkal - Tembilahan - Kuala Tungkal - Padang - Kuala Tungkal - Bengkulu	20
		- Kuala Tungkal-Rengat-Bengkalis - Kuala Tungkal - Jambi	
4	PT. KERINCI WISATA EXPRES	- Kuala Tungkal - Sarolangun - Kuala Tungkal - Muaro Bungo - Kuala Tungkal - Bangko Kuala Tungkal - Sungai Penuh - - Kerinci - Kuala Tungkal - Jambi - Kuala Tungkal - Tembilahan - Kuala Tungkal - Pekan Baru	37
		- Kuala Tungkal - Linggau	
5	PO. ABC	- Kuala Tungkal - Dumai - Kuala Tungkal Pangkalan Kermei - Kuala Tungkal - Kampar - Kuala Tungkal-Duri - Kuala Tungkal-Siak - Kuala Tungkal - Jambi	35
		- Kuala Tungkal - Palembang	
6	PO. SUMBA PUTRA MANDIRI	- Kuala Tungkal - Lampung - Kuala Tungkal - Jakarta	37

RENSTRA (2025-2029)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

7	PO. GADING INDAH	- Kuala Tungkal - Sarolangun	40
		- Kuala Tungkal - Bangko	
		- Kuala Tungkal - Muaro Bungo	
		- Kuala Tungkal - Padang	
		- Kuala Tungkal - Jawa Barat	
		Kuala Tungkal - Jawa Timur	
		- Kuala Tungkal - Jawa Tengah	
		- Kuala Tungkal-Surabaya	
		- Kuala Tungkal-Bandung	
		- Kuala Tungkal - Yogyakarta	
		- Kuala Tungkal - Musi Banyuasin	
		- Kuala Tungkal - Lahat	
		- Kuala Tungkal - Bayung Lincir	
		- Kuala Tungkal - Jambi	
		- Kuala Tungkal - Palembang	
		- Kuala Tungkal - Bandar Lampung	
		- Kuala Tungkal - Jakarta	
8	PO. MARINA EXPRES	- Kuala Tungkal - Jawa Barat	20
		- Kuala Tungkal - Jawa Timur	
		- Kuala Tungkal - Jawa Tengah	
		Kuala Tungkal - Pagar Alam	
		- Kuala Tungkal - Jambi	
9	CV. PUMAVIA WISATA	- Kuala Tungkal - Jambi	31
		- Kuala Tungkal - Palembang	
		- Kuala Tungkal - Lampung	
		Kuala Tungkal - Jakarta - Pulau	
		- Jawa	
		- Kuala Tungkal - Tembesi	
		- Kuala Tungkal - Muaro Tebo	
		- Kuala Tungkal - Muaro Bungo	
		- Kuala Tungkal - Padang	
		- Kuala Tungkal - Pauh - Mandiangin	
		- Kuala Tungkal - Sarolangun	
		- Kuala Tungkal - Bangko	
		- Kuala Tungkal - Linggau	
		- Kuala Tungkal - Bengkulu	
		- Kuala Tungkal - Bukit Tinggi	
		- Kuala Tungkal - Solok	
		- Kuala Tungkal -Tulang Bawang	

RENSTRA (2025-2029)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

10	PO. SYUKUR BERSAMA	- Kuala Tungkal - Jambi	30
		- Kuala Tungkal - Palembang	
		- Kuala Tungkal - Tanjung Enim	
		- Kuala Tungkal - Prabumulia	
		- Kuala Tungkal - Batu Rajo	
		- Kuala Tungkal - Martapura	
		- Kuala Tungkal - Lampung	
		- Kuala Tungkal - Jakarta	
		- Kuala Tungkal - Jawa Tengah	
		- Kuala Tungkal - Jawa Timur	
		- Kuala Tungkal - Jawa Barat	
		- Kuala Tungkal - Tebing Tinggi	
		- Kuala Tungkal - Sarolangun	
		- Kuala Tungkal - Bangko	
		- Kuala Tungkal - Bungo	
		- Kuala Tungkal - Singkut	
		- Kuala Tungkal - Tebo	
		- Kuala Tungkal - Kerinci	
		- Kuala Tungkal - Padang	
		- Kuala Tungkal - Sabak	
		- Kuala Tungkal - Nipah Panjang	
		- Kuala Tungkal - Tembilahan	
		- Kuala Tungkal - Kayu Agung	
		- Kuala Tungkal - Pekan Baru	
		- Kuala Tungkal - Rupit	
		- Kuala Tungkal - Linggau	
		- Kuala Tungkal - Curup	
		- Kuala Tungkal - Bengkulu	
		- Kuala Tungkal - Medan	
11	PO. TANTAN MANDIRI BARU	- Kuala Tungkal - Jambi	34
		- Kuala Tungkal - Palembang	
		- Kuala Tungkal - Prabu Mulih	
		- Kuala Tungkal - Muara Enim	
		- Kuala Tungkal - Batu Rajo	
		- Kuala Tungkal - Tebing Tinggi	
		- Kuala Tungkal - Marta Pura	
		- Kuala Tungkal - Lampung	
		- Kuala Tungkal - Jakarta	
		- Kuala Tungkal - Pulau Jawa	

RENSTRA (2025-2029)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

		- Kuala Tungkal - Tebing (WKS)	
		- Kuala Tungkal - Sarolangun	
		- Kuala Tungkal - Bangko	
		- Kuala Tungkal - Bungo	
		- Kuala Tungkal - Singkut	
		- Kuala Tungkal - Tebo	
		- Kuala Tungkal - Kerinci	
		- Kuala Tungkal - Padang	
		- Kuala Tungkal - Sabak	
		- Kuala Tungkal - Pekan Baru	
		- Kuala Tungkal - Tembilahan	
		- Kuala Tungkal - Dumai	
		- Kuala Tungkal - Linggau	
		- Kuala Tungkal - Curup	
		- Kuala Tungkal - Bengkulu	
		- Kuala Tungkal - Medan	
		- Kuala Tungkal - Padang Sidempuan	
		- Kuala Tungkal - Sibolga	
		- Kuala Tungkal - Kisaran	
		- Kuala Tungkal - Pematang Siantar	
	JUMLAH	65	324

b. Terminal Type C

Sesuai dengan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 964 / Kep.Bup / DISHUB / 2018 tentang Lokasi Terminal Penumpang Type C. Adapun berikut persebaran Terminal Penumpang Type C :

Tabel 2. 2

Daftar Terminal Type C yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat

NO	NAMA TERMINAL	LOKASI	JUMLAH
1	2		3
1	Terminal Tipe C	- Kecamatan Tungkal Ilir	1
		- Kecamatan Seberang Kota	0
		- Kecamatan Bram Itam	1
		- Kecamatan Betara	1
		- Kecamatan Tungkal Ulu	1
		- Kecamatan Tebing Tinggi	1



	-	Kecamatan Merlung	1
	-	Kecamatan Senyerang	1
		Kecamatan Muara Papalik	1
	-	Kecamatan Batang Asam	1
		Kecamatan Kuala Betara	0
	-	Kecamatan Pengabuan	1
	-	Kecamatan Ranah Mendaluh	1
Jumlah			11

c. Infrastruktur Pendukung Konektivitas Transportasi Laut dan ASDP

Dalam mendukung peningkatan pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdapat prasarana pendukung konektivitas transportasi laut dan ASDP diantaranya :

1. Pelabuhan RORO Kuala Tungkal

a. Letak Geografis

Kabupaten Tanjung Jabung Barat terletak antara 0o53' – 01o41' Lintang Selatan dan antara 103o 23' - 104o21' Bujur Timur. Luas wilayah KabupatenTanjung Jabung Barat adalah 5.009,82 Km2. Batas-batas Kabupaten Tanjung Jabung Barat: Utara : Propinsi Riau Selatan : Kabupaten Batanghari Barat : Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Tebo, Timur : Selat Berhala dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pelabuhan Roro Kuala Tungkal terletak di Desa Tungkal I Parit Tujuh, berjarak 5 Km dari pusat Kota. Pelabuhan yang dibangun dengan kapasitas sandar 5000 dwt ini, memiliki luas area daratan 353,5 x 200 m2, lapangan penumpukan 18.236 m2, gudang 60 x 20 m2, dan kantor seluas 15,5 x 25 m2. Sedangkan sisi lautnya memiliki dermaga seluas 200 x 20 m2, kedalaman -8 Mlws, Trestle 206 x 8 m2, dan Causeway 150 x 8 m2.

I. Gambaran Umum

Pelabuhan Ro-Ro Kuala Tungkal merupakan salah satu pelabuhan penyeberangan penting di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Pelabuhan ini berfungsi sebagai simpul transportasi laut yang menghubungkan wilayah Kuala Tungkal (Jambi) dengan daerah Batam, Tanjung Balai Karimun, Dabo Singkep, dan Tanjung Pinang (Kepulauan Riau).

II. Lokasi

Alamat: Jalan Pelabuhan Ro-Ro, Kelurahan Tungkal Harapan, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

RENSTRA (2025-2029)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

Koordinat: $\pm 0^{\circ}49'$ LS – $103^{\circ}27'$ BT

Kedalaman perairan: $\pm 4-6$ meter (tergantung pasang surut)

Akses jalan: Terhubung langsung dengan Jalan Lintas Kuala Tungkal – Jambi.

III. Fungsi dan Peran

1. Sebagai simpul konektivitas antar pulau.
2. Mendukung arus logistik dan distribusi barang.
3. Meningkatkan mobilitas orang dan barang.
4. Menjadi penggerak ekonomi daerah.

IV. Fasilitas Pelabuhan

Jenis Fasilitas	Keterangan
Dermaga Ro-Ro	1 unit dermaga baja dengan panjang ± 60 meter dan ramp door kendaraan
Gedung Terminal Penumpang	Luas ± 300 m ² , dilengkapi ruang tunggu dan loket tiket
Kantor Pelabuhan	Tersedia untuk petugas ASDP dan Dishub
Area Parkir	Dapat menampung ± 40 kendaraan roda empat dan 100 roda dua
Fasilitas Keamanan dan Keselamatan	Pos jaga, CCTV, rambu keselamatan, dan penerangan dermaga
Jaringan Utilitas	Listrik PLN, air bersih, dan drainase pelabuhan

V. Operator dan Pengelolaan

Pengelola: Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Operator Penyeberangan: PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)

Rute Layanan:

Kuala Tungkal $\rightleftharpoons$ Dabo Singkep

- Kuala Tungkal $\rightleftharpoons$ Tanjung Balai Karimun
- Kuala Tungkal $\rightleftharpoons$ Batam
- (Rencana) Kuala Tungkal $\rightleftharpoons$ Tanjung Pinang

VI. Kondisi Terkini (2025)

Pelayanan pelabuhan berjalan rutin dengan jadwal 2–3 kali pelayaran per minggu. Dinas Perhubungan sedang mengusulkan peningkatan kapasitas dermaga dan terminal penumpang melalui program dukungan transportasi



laut terpadu (DTLT). Tantangan utama meliputi pendangkalan alur pelayaran, keterbatasan lahan parkir, serta fluktuasi jumlah penumpang.

VII. Potensi dan Manfaat

Pelabuhan ini mendukung integrasi transportasi darat-laut, meningkatkan konektivitas logistik hasil pertanian dan perikanan, membuka akses wisata bahari, serta mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah hinterland Kuala Tungkal.

VIII. Rencana Pengembangan

1. Peningkatan kapasitas dermaga dan terminal penumpang.
2. Pengerukan alur pelayaran dan perawatan kedalaman kolam pelabuhan.
3. Digitalisasi sistem tiket dan manajemen pelabuhan.
4. Penyediaan fasilitas keamanan dan keselamatan pelayaran.
5. Pengembangan trayek baru antarprovinsi dan antarnegara (jika feasible).

IX. Kesimpulan

Pelabuhan Ro-Ro Kuala Tungkal memiliki peran strategis sebagai pintu gerbang laut Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Peningkatan fasilitas, keterpaduan transportasi antarmoda, serta dukungan anggaran dan regulasi menjadi kunci untuk mewujudkan pelabuhan ini sebagai simpul logistik dan mobilitas regional yang handal dan berdaya saing.

2. Pelabuhan LLASDP Kuala Tungkal

I. PENDAHULUAN

Pelabuhan LLASDP (Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan) Kuala Tungkal merupakan salah satu pelabuhan utama yang melayani transportasi sungai dan penyeberangan antarwilayah pesisir timur Sumatera. Pelabuhan ini berperan strategis dalam menghubungkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan wilayah sekitar seperti Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Indragiri Hilir (Riau), dan wilayah kepulauan di perairan Selat Berhala.

Sebagai simpul transportasi berbasis air, LLASDP Kuala Tungkal berfungsi untuk memfasilitasi pergerakan orang dan barang melalui jalur sungai dan laut, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir dan hinterland.

II. DATA UMUM PELABUHAN

Uraian	Keterangan
Nama Pelabuhan	Pelabuhan LLASDP Kuala Tungkal

RENSTRA (2025-2029)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

Lokasi	Jalan Pelabuhan, Kelurahan Tungkal Harapan, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Koordinat Geografis	$\pm 0^{\circ}49' \text{ LS} - 103^{\circ}27' \text{ BT}$
Status Pengelolaan	Dikelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Jenis Pelayanan	Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP dan kapal rakyat)
Kedalaman Perairan	$\pm 3-5$ meter (tergantung pasang surut)
Luas Area Pelabuhan	$\pm 2.000 \text{ m}^2$
Aksesibilitas	Terhubung dengan jalan utama kota dan terminal darat Kuala Tungkal

III. FUNGSI DAN PERAN

1. Sebagai simpul transportasi air daerah.
2. Menjadi pusat distribusi barang dan logistik skala menengah.
3. Mendukung konektivitas antar moda transportasi.
4. Menunjang aktivitas ekonomi masyarakat pesisir.
5. Sebagai pelabuhan pengumpan (feeder port).

IV. FASILITAS PELABUHAN

Jenis Fasilitas	Keterangan
Dermaga Utama	Dermaga beton panjang ± 60 meter, lebar 12 meter, dilengkapi ramp door.
Gedung Terminal Penumpang	Luas $\pm 200 \text{ m}^2$, ruang tunggu dan loket tiket.
Kantor Pelabuhan	Kantor operasional petugas Dishub.
Fasilitas Keselamatan	Rambu air, CCTV, pelampung keselamatan, dan penerangan dermaga.
Area Parkir	Menampung ± 30 kendaraan roda empat dan 80 roda dua.
Fasilitas Pendukung	Mushola, toilet umum, air bersih, dan listrik PLN.

RENSTRA (2025-2029)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

V. PELAYANAN DAN OPERASIONAL

Jenis Layanan: Kapal penumpang reguler, kapal barang, kapal cepat (speedboat), dan kapal tradisional (pompong).

Tujuan Pelayaran:

- Kuala Tungkal ⇌ Nipah Panjang
- Kuala Tungkal ⇌ Mendahara
- Kuala Tungkal ⇌ Sei. Lokan
- Kuala Tungkal ⇌ Indragiri Hilir (Riau)

Frekuensi Keberangkatan: 2–4 kali per hari (tergantung cuaca dan permintaan).

Operator: Koperasi dan pengusaha lokal di bawah pengawasan Dishub.

VI. KONDISI TERKINI (2025)

Pelabuhan LLASDP Kuala Tungkal berfungsi aktif melayani penumpang dan barang antarwilayah pesisir. Infrastruktur pelabuhan dalam kondisi cukup baik namun memerlukan pemeliharaan berkala. Sistem tiket masih manual dan fasilitas keselamatan perlu ditingkatkan. Dinas Perhubungan telah mengusulkan rehabilitasi dermaga dan peningkatan kapasitas terminal.

VII. PERMASALAHAN DAN TANTANGAN

Permasalahan	Dampak	Rencana Penanganan
Pendangkalan alur pelayaran	Hambatan bagi kapal besar untuk sandar	Pengerukan rutin dan pengaturan jalur pelayaran
Keterbatasan area parkir	Kepadatan kendaraan di sekitar pelabuhan	Penataan ulang area parkir dan sirkulasi
Fasilitas keselamatan terbatas	Risiko keselamatan penumpang	Pengadaan sarana keselamatan tambahan
Sistem tiket manual	Lambatnya pelayanan	Penerapan sistem tiket elektronik
Kurangnya promosi trayek	Jumlah penumpang fluktuatif	Promosi layanan transportasi air terpadu

VIII. RENCANA PENGEMBANGAN

1. Rehabilitasi dermaga dan fasilitas terminal penumpang.
2. Pengerukan alur pelayaran secara periodik.
3. Pembangunan sistem informasi dan tiket digital LLASDP.
4. Peningkatan sarana keselamatan dan fasilitas umum.



5. Integrasi trayek sungai–laut–darat dengan Pelabuhan Ro-Ro Kuala Tungkal.
6. Pengembangan kerja sama antarwilayah dan swasta dalam layanan penyeberangan.
3. Halte Sungai

I. PENDAHULUAN

Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki jaringan perairan yang luas di sepanjang Sungai Pengabuan, Sungai Betara, dan Sungai Tungkal. Sungai-sungai ini menjadi jalur utama transportasi masyarakat di wilayah pesisir, terutama di daerah yang belum terjangkau oleh transportasi darat. Dalam mendukung mobilitas masyarakat, Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat membangun dan mengelola halte-halte sungai sebagai simpul pelayanan transportasi air yang digunakan oleh kapal rakyat (pompong), kapal cepat, dan kapal penyeberangan kecil.

II. DATA UMUM

Uraian	Keterangan
Nama Infrastruktur	Halte Sungai Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Jumlah Halte	15 unit (tersebar di berbagai kecamatan)
Jenis Transportasi	Angkutan sungai rakyat dan kapal kecil
Pengelola	Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Wilayah Layanan	Sungai Pengabuan, Sungai Betara, dan Sungai Tungkal
Fungsi Utama	Pelayanan naik-turun penumpang dan barang ringan
Material Bangunan	Beton bertiang baja ringan dengan atap seng/aluminium
Kondisi Umum	Baik (70%), rusak ringan (20%), rusak berat (10%)

III. SEBARAN HALTE SUNGAI

1. Halte Sungai Pengabuan – Kuala Tungkal
2. Halte Sungai Betara – Parit Pudir
3. Halte Sungai Serdang – Bram Itam
4. Halte Sungai Kempas – Tungkal Ulu

RENSTRA (2025-2029)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

5. Halte Sungai Retih – Muara Papalik
6. Halte Sungai Pematang Lumut
7. Halte Sungai Seberang Kota
8. Halte Sungai Senyerang
9. Halte Sungai Teluk Nilau
10. Halte Sungai Bram Itam Kiri
11. Halte Sungai Bram Itam Kanan
12. Halte Sungai Dusun Mudo
13. Halte Sungai Purwodadi
14. Halte Sungai Kampung Lama
15. Halte Sungai Sungai Dualap

IV. FUNGSI DAN MANFAAT

1. Memudahkan akses transportasi sungai bagi masyarakat pesisir.
2. Menjadi simpul konektivitas transportasi antardesa dan kecamatan.
3. Mendukung kegiatan ekonomi masyarakat (perdagangan, pertanian, dan hasil perikanan).
4. Menjadi bagian dari sistem transportasi multimoda (sungai–darat).
5. Mendukung pengembangan pariwisata air di kawasan Kuala Tungkal dan sekitarnya.

V. KONDISI DAN PERMASALAHAN

Permasalahan	Dampak	Upaya Penanganan
Pendangkalan alur sungai	Menghambat akses kapal ke halte	Pengerukan rutin dan pengaturan trayek
Fasilitas rusak karena abrasi	Mengurangi kenyamanan dan keselamatan	Rehabilitasi fisik dan penguatan tiang penyangga
Minim penerangan malam	Risiko keamanan penumpang	Pemasangan lampu solar cell di setiap halte
Belum ada sistem jadwal kapal	Tidak teratur waktu keberangkatan	Penyusunan jadwal tetap bersama operator kapal
Kurangnya promosi transportasi air	Minimnya pengguna jasa	Sosialisasi dan integrasi informasi dengan Dishub

VI. RENCANA PENGEMBANGAN

1. Rehabilitasi dan pembangunan halte sungai baru di wilayah pesisir.
2. Pemasangan penerangan tenaga surya di seluruh halte.

RENSTRA (2025-2029)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

3. Penataan jadwal dan trayek kapal rakyat.
4. Pembuatan aplikasi informasi transportasi air berbasis digital.
5. Integrasi halte sungai dengan terminal darat dan pelabuhan LLASDP.

VII. KESIMPULAN

Halte Sungai Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan infrastruktur strategis yang mendukung transportasi air dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Dengan pemeliharaan rutin, peningkatan fasilitas, dan pengelolaan profesional, halte sungai dapat menjadi bagian penting dari sistem transportasi terpadu daerah

**DATA PEMBANGUNAN HALTE SUNGAI YANG SUDAH DIBANGUN
DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2025**

No	Pengadaan dan Pemasangan Halte Sungai	TAHUN DI BANGUN	Volume	Pagu	KET
1	Desa Kuala Indah Kec. Kuala Betara	(2015)	1 Paket	1.475.239.000	Telah di hibahkan ke Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019
2	Kelurahan Teluk Nilau Parit I Kec. Pengabuan		1 Paket	1.651.880.000	
3	Desa Sungai Rambai Kec. Senyerang		1 Paket	1.774.689.000	
4	Desa Sungai Kepayang Kec. Senyerang	(2016)	1 Paket	2.228.573.000	
5	Desa Teluk Ketapang Kec. Senyerang		1 Paket	2.154.062.000	
6	Parit 8 Desa Kempas Jaya Kec. Senyerang		1 Paket	1.819.670.000	
7	Desa Sungai Serindit Kec. Pengabuan	(2017)	1 Paket	2.580.260.000	
8	Parit Ponco Desa Betara Kanan Kec. Kuala Betara		1 Paket	2.054.270.000	
9	Desa Teluk Kempas Jaya Kec. Senyerang		1 Paket	1.995.528.000	
10	Desa Tanjung Senjulung Kec. Bram Itam		1 Paket	2.228.573.000	
11	Desa Margo Rukun Kec. Senyerang		1 Paket	3.048.915.000	
12	Kelurahan Tungkal V Kec. Seberang Kota	(2019)	1 Paket	1.600.000.000	
13	Desa Makmur Jaya Kec. Betara		1 Paket	900.000.000	Telah di hibahkan ke Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020
14	Desa Bunga Tanjung Kec. Betara		1 Paket	1.900.000.000	

15	Desa Sungai Raya Kec. Pengabuan	(2020)	1 Paket	2.122.100.000	Telah di hibahkan ke Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021
16	Desa Parit Sidang Kec. pengabuan		1 Paket	1.840.700.000	
17	Kelurahan Betara Kiri Kec. Kuala Betara		1 Paket	2.310.500.000	Telah di hibahkan ke Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023
18	Parit Ijab Desa Teluk pulau Raya Kec. Seberang Kota	(2022)	1 Paket	2.500.000.000	
19	RT.01 Desa Kuala Kahar Kec. Seberang Kota	(2022)	1 Paket	2.122.100.000	Telah di hibahkan ke Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024
20	Desa Lumahan Kec. Senyerang	2023	1 Paket	2.324.214.284	
21	Dusun Tanjung Mawar Desa Kayu Aro Kec. Senyerang	2023	1 PAKET	2.302.585.248	Telah di hibahkan ke Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024
22	Parit Bamin Desa Mekar Alam Kec. Seberang Kota	2024	1 PAKET		
23	Desa Parit Pudin Kec. Pengabuan	2024	1 PAKET		PROSES HIBAH
24	Parit IV Desa Kayu Aro Kec. Senyerang	2024	1 PAKET		PROSES HIBAH

KET : TOTAL KESELURUHAN DARI TAHUN 2015 – 2024 SEBANYAK 24 HALTE PENYEBERANGAN

KUALA TUNGKAL, 02 Januari 2025

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

SYAMSUL JUHARI, S.Sos
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19701223 199203 1 001



2. Sumber Daya Manusia

Guna mendukung dan menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dimilikinya Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat didukung oleh sumber daya manusia yang terdiri atas PNS, TKS dan TKK yang terdiri dari 31 (Tiga Puluh Satu) PNS dan 90 (Sembilan Puluh) TKK.

Jika ditinjau dari kepegawaian dan tingkat pendidikan, komposisi sumber daya manusia pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.3

SDM Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No	Uraian	Jumlah	Pria	Wanita
1	Jumlah Pegawai berdasarkan Eselon :			
	- Eselon II	3	3	-
	- Eselon III	11	10	1
	- Eselon IV	16	13	3
	-Non Eselon	31	7	4
	Jumlah			
2	Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan :			
	- SD	1	1	0
	- SMP	12	11	1
	- SMA	1	1	0
	- D II	2	1	1
	- D III	0	0	0
	- D IV	12	10	2
	- S.1	2	2	0
	- S.2	31	27	4
	Jumlah			
3	Jumlah Pegawai berdasarkan Status :			
	- PNS	31	27	4
	- Kontrak	90	81	9
4	Pendidikan Perjenjangan Aparatur :			
	- Diklat PIM II	0	0	0
	- Diklat PIM III	1	1	0
	- Diklat PIM IV	3	3	0



3. Sumber Daya Lainnya

Sumber Daya lainnya seperti peralatan, perlengkapan baik berupa aset bergerak maupun tidak bergerak. Adapun aset yang mendukung kegiatan pelayanan dan operasional pada yang ada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Aset Pendukung Kegiatan Pelayanan Dan Operasional
Pada Dinas Perhubungan Kab. Tanjung Jabung Barat

No	Jenis Asset	Jumlah	Ket
1.	Prasarana		
	a. Gedung kantor Dishub	1 unit	
	b. Gedung hanggar bongkar muat barang	1 unit	
	c. Terminal Kota	1 unit	
	d. Gedung UPT Sarana dan Prasarana	1 unit	
	e. Gedung Pos pengujian kendaraan bermotor	1 unit	
	f. Pos pengawasan di dermaga		
	- Dermaga LLASDP	1 unit	
	- Dermaga tangga raja ulu	1 unit	
	- Dermaga ampera	1 unit	
	- Dermaga kuatik	1 unit	
	g. Halte sungai	25 unit	
2.	Sarana		
	a. Kendaraan operasional roda empat	6 unit	
	c. Kendaraan operasional bus sekolah	2 unit	
	f. Kendaraan operasional dinas roda dua	19 unit	
	g. Kendaraan operasional roda tiga	1 unit	
3.	Fasilitas Keselamatan Transportasi		
	a. Rambu Jalan	182 unit	



e. Pagar temporer	40 unit	
f. Warning light	8 unit	
h. Traffic light	2 unit	
i. Guadrail	2 paket	

2.3 KINERJA PELAYANAN

Urusan Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dimana memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung pelayanan transportasi diwilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, utamanya dalam mewujudkan pemerataan transportasi yang aman, nyaman, lancar dan tertib kepada masyarakat dalam mendukung produktivitas daerah.

Dalam periode pembangunan lima tahun sebelumnya, kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat mencapai target layanan yang direncanakan, beberapa diantaranya justru melebihi target yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, masih ada beberapa target pelayanan yang belum dapat dipenuhi dengan tuntas, dikarena beberapa kendala yang dialami, baik kendala yang berkaitan dengan keterbatasan SDM, sarana pendukung kerja, maupun kendala yang berasal dari pihak luar, termasuk dari masyarakat.

Rekapitulasi capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam periode tahun 2021-2024 dapat dilihat pada Tabel Laporan Realisasi Pencapaian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2024 sebagai berikut (**Tabel 2.3**) :

RENSTRA (2025-2029)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

a. Capaian Kinerja RPJMD Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

REK PELAYANAN UMUM																								
No	Indikator Kinerja Program (Outcome) (Indikator disesuaikan dengan RPJMD)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																		Kondisi Pada Akhir Periode RPJMD			SKPD Penanggung Jawab
			2021			2022			2023			2024			2025			2026						
			target	realisasi	%	target	realisasi	%	target	realisasi	%	target	realisasi	%	target	realisasi	%	target	realisasi	%	target	realisasi	%	
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	16	17	18	19	20	21	22
2	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar																							
	1 Perhubungan				0%			0%			0%			0%			0%			0%			0%	
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Orang	252000	271955	108%	262000	290098	111%	272000	289813	107%	282000	275151	98%	292000	220947	76%	1360000	1347964	99%	1360000	1347964	99,12%	Dinas Perhubungan
2	jumlah uji KIR angkutan umum	Unit	980	0	0%	1180	0	0%	1210	1755	145%	1300	2793	215%	1350	1602	119%	6020	6150	102%	6020	6150	102,16%	Dinas Perhubungan
3	Jumlah pelabuhan /Halte Sungai /Terminal	Unit	2	0	0%	2	2	100%	2	2	100%	2	4	200%	2	0	0%	10	8	80%	10	8	80,00%	Dinas Perhubungan
4	persentase kepemilikan KIR	%	100,00%	0,00%	0%	100,00%	0,00%	0%	100,00%	37,00%	37%	100,00%	63,00%	63%	100,00%	69,00%	69%	500,00%	169,00%	34%	500,00%	169,00%	33,80%	Dinas Perhubungan
5	pemasangan rambu rambu	Unit	30	10	33%	35	8	23%	40	20	50%	45	62	138%	45	90	200%	195	190	97%	195	190	97,44%	Dinas Perhubungan
6	rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Unit/KM	35	40	114%	90	100	111%	92	109	118%	94	114	121%	96	115	120%	407	478	117%	407	478	117,44%	Dinas Perhubungan
7	jumlah orang/barang yang tersangkut angkutan umum	Orang	192000	192300	100%	193000	291098	151%	194000	215696	111%	195000	153957	79%	195000	220947	113%	969000	1073998	111%	969000	1073998	110,84%	Dinas Perhubungan
		Barang	6100	6158	101%	6200	2544	41%	6300	9324	148%	6400	12422	194%	6500	21548	332%	31500	51996	165%	31500	51996	165,07%	Dinas Perhubungan
8	jumlah orang melalui dermaga/bandara/terminal pertahun	Orang	252000	271955	108%	262000	290098	111%	272000	289813	107%	282000	275151	98%	292000	220947	76%	1360000	1347964	99%	1360000	1347964	99,12%	Dinas Perhubungan
		Barang	30000	25638	85%	35000	117972	337%	40000	42343	106%	45000	37260	83%	50.000	21548	43%	200000	244761	122%	200000	244761	122,38%	Dinas Perhubungan

Rata - Rata Capaian

102,74%

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS OPD

40

RENSTRA (2025-2029)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

Secara keseluruhan tingkat capaian kinerja RPJM Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari rata – rata capaian 8 (Delapan) indikator kinerja sasaran tersebut dapat dinyatakan sangat baik dari target yang telah ditetapkan. Persentase rata- rata capaian mencapai angka 72% sampai dengan tahun 2024.

Indikator Yang realisasinya dibawah 50% adalah :

- Pemasangan Rambu Rambu Darat Target sampai dengan tahun Akhir Priode 2025 adalah 195 unit **Realisai 69 unit (35%)** Sampai dengan tahun 2024. Tahun 2025 Dinas Perhubungan telah menganggarkan sebanyak **95 unit**.

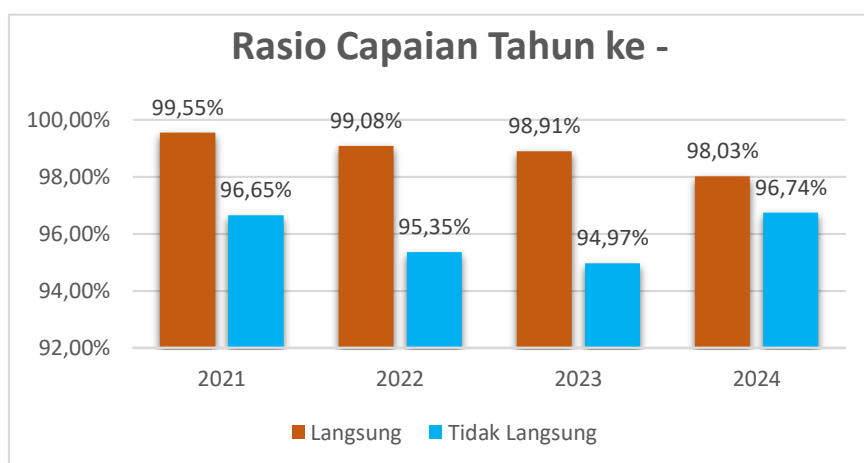
Dapat disimpulkan hingga sampai akhir priode Tahun 2025 **realisasi indikator tersebut mecapai 159 Unit (81%)**.

b. Capaian Kinerja Keuangan dan PAD Dinas Perhubungan Tahun 2021-2024

Tabel 2.6

REALISASI ANGGARAN							
DINAS PERHUBUNGAN KAB. TAJUNG JABUNG BARAT							
NO	TAHUN	DPA		REALISASI DPA		Rasio Capaian Tahun ke -	
		LANGSUNG	TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	TIDAK LANGSUNG	Langsung	Tidak Langsung
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2021	2.032.500.000	6.017.145.280	2.023.340.990	5.815.519.214	99,55%	96,65%
2	2022	1.428.430.145	6.928.565.966	1.415.272.916	6.606.628.508	99,08%	95,35%
3	2023	1.548.142.000	6.742.058.212	1.531.235.648	6.403.202.306	98,91%	94,97%
4	2024	3.957.786.296	9.145.432.021	3.879.736.481	8.846.973.038	98,03%	96,74%

Data Grafik Rasio Capaian Belanja OPD



RENSTRA (2025-2029)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

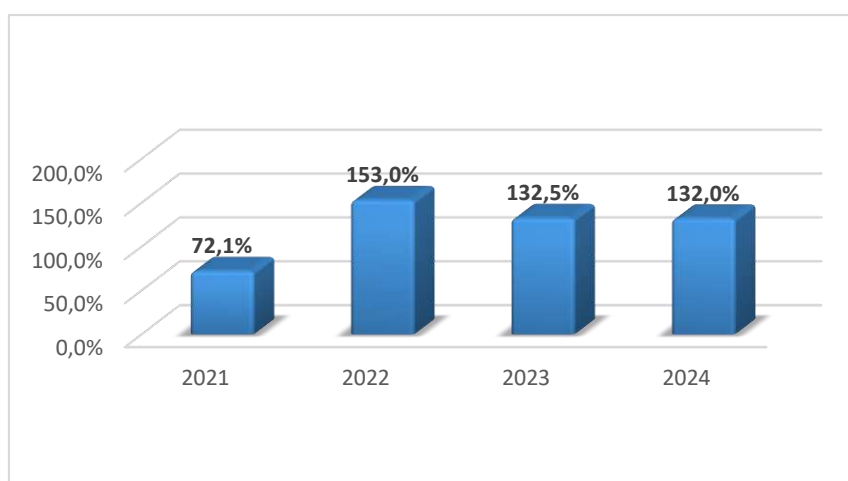
Realisasi anggaran yang dikelola oleh Dinas Perhubungan meliputi penerimaan pendapatan asli daerah dan belanja daerah. Secara umum pencapaian target Anggaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung dari tahun ke tahun realisasi relatif mempunyai nilai yang baik sesuai target yang telah ditetapkan. Namun demikian rata-rata pertumbuhan anggaran terhadap realisasi mengalami penurunan. Penilai tertinggi kinerja berada di tahun 2023, dimana pada tahun tersebut diindikasikan dalam perolehan Persentase Belanja Langsung 98,91% dan Belanja Tak Langsung 94,97%. Akan tetapi pada sektor belanja langsung rasio dari tahun ke tahun relatif baik berada di atas 94%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan berjalan dengan baik sesuai perencanaan.

Selanjutnya dalam capaian kinerja anggaran dinas perhubungan juga terdapat realisasi Pendapatan Asli Daerah melalui sektor perhubungan, dapat dilihat berdasarkan tabel di bawah ini :

Tabel 2.6 Realisasi PAD

PENCAPAIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BIDANG PERHUBUNGAN				
NO	TAHUN	TARGET PAD	REALISASI PAD	RASIO Capaian Tahun ke-
1	2	3	4	5
1	2021	649.000.000	468.024.200	72,1%
2	2022	390.000.000	596.677.200	153,0%
3	2023	605.000.000	801.603.200	132,5%
4	2024	520.000.000	686.527.000	132,0%

Data Grafik Realsasi PAD



RENSTRA (2025-2029)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah salah satu perangkat daerah yang mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu terdiri dari :

1. Retribusi Jasa Umum
 - Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum
 - Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor/Opsen PKB
2. Retribusi Jasa Usaha
 - Retribusi Terminal
 - Retribusi Pelayanan Kepelabuhan

Secara umum pencapaian target PAD dari tahun ke tahun realisasi relatif mempunyai nilai yang baik sesuai target yang telah ditetapkan. Namun demikian rata-rata pertumbuhan PAD terhadap realisasi mengalami penurunan. Penilai tertinggi berada di tahun 2021 yaitu dengan Target PAD Rp. 649.000.000 dan Realisasi Rp. 468.024.200 dengan persentase **72,1%**. Diketahui bahwa realisasi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor pada tahun 2021 adalah 0% sehingga menyebabkan target PAD tidak tercapai, Target yang ditentukan adalah Rp. 150.000.000,- dan realisasi Rp.0,- dengan persentase 0%. Hal ini disebabkan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor tidak mendapatkan izin operasional dari Kementerian Perhubungan RI sehingga tidak dapat menarik retribusi daerah dikarenakan belum mendapatkan minimal Akreditasi B.

Selanjutnya hal tersebut juga berdampak terhadap penetapan target PAD tahun 2022 terjadi penurunan target yang signifikan Rp. 150.000.000,- Sehingga target PAD Dinas Perhubungan turun menjadi Rp. 390.000.000,- yang semula Rp. 649.000.000 Pada tahun 2021.

c. Pengukuran Kinerja Melalui Indikator Kinerja Utama OPD

Pengukuran kinerja melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah proses menilai dan mengukur keberhasilan suatu organisasi atau individu dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya, dengan menggunakan serangkaian indikator yang telah ditetapkan. IKU membantu organisasi untuk melacak kemajuan, mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, dan memastikan bahwa upaya yang dilakukan selaras dengan tujuan yang ingin dicapai. Berikut kami lampirkan data realisasi capaian indikator kinerja utama Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020-2024:

RENSTRA (2025-2029)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

a. Tabel 2.7 Capaian IKU Tahun 2021-2025

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD	REALISASI				2025			REALISASI S/D TAHUN 2025	TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN RPJMD %
				2021	2022	2023	2024	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %			
1	Persentase Trayek Angkutan Yang Tersedia	% Trayek terlayani	40%	54%	55%	55,8%	56,90%	57,50%	60,40%	105,04%	60,40%	65%	92,92%
2	Jumlah Halte Sungai Yang Tersedia	Unit	1	0	2	2	4	2	0	0,00%	8	10 Unit	80,00%
3	Jumlah mobilitas orang/barang melalui pelabuhan/dermaga/terminal pertahun	Orang	50%	192300	291098	215696	153957	220000	220947	100,43%	1073998	60% (969000)	100,00%
		Ton		6158	2544	9324	12422	20500	21548	105,11%	51996	Orang dan 31.500 ton	60,58%
4	Kapasitas Ruas Jalan Yang Baik	Angka	c	B (0,35)	A (0,20)	B (0,45)	B (0,33)	B (0,33)	B (0,44)	99,00%	B	B	99,00%
5	Jumlah Sarana dan Prasarana Angkutan Darat dan Laut Yang Tersedia	Unit	30	10	8	20	62	50	90	180,00%	190	255	97%
6	Jumlah Kendaraan Yang Memenuhi Laik Angkutan Jalan	Unit	1150	0	0	1755	2793	1700	1602	94,24%	6150	1350	102,00%
7	Angka Kecelakaan lalu Lintas Darat dan Laut	Kasus	50	67	30	65	53	130	136	95,59%	351	115	32,76%
Rata - Rata Capaian Kinerja Tahun-n										97,43%			83,03%

Uraian ini menyajikan analisis perbandingan antara realisasi capaian kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Akhir RPJMD berdasarkan indikator kinerja utama.

1. Persentase Trayek Angkutan yang Tersedia

Realisasi sampai dengan tahun 2025 sebesar 60,40% dibandingkan dengan target RPJMD sebesar 65%. Capaian terhadap target RPJMD adalah sebesar 92,92%. Hal ini menunjukkan bahwa indikator belum sepenuhnya tercapai dan masih terdapat kekurangan sebesar 4,60% untuk mencapai target akhir RPJMD.

2. Jumlah Halte Sungai yang Tersedia

Realisasi sampai dengan tahun 2025 sebanyak 8 unit dari target RPJMD sebesar 10 unit. Capaian terhadap target RPJMD sebesar 80%. Dengan demikian masih diperlukan penambahan 2 unit halte untuk memenuhi target akhir RPJMD.

3. Mobilitas Orang dan Barang melalui Pelabuhan/Dermaga/Terminal

a. Mobilitas Orang

Realisasi sampai dengan tahun 2025 sebesar 107.399 orang dibandingkan target RPJMD sebesar 96.900 orang. Capaian terhadap RPJMD sebesar 100,83%, yang berarti indikator ini telah melampaui target.

b. Mobilitas Barang

RENSTRA (2025-2029)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

Realisasi sampai dengan tahun 2025 sebesar 51.996 ton dibandingkan target RPJMD sebesar 31.500 ton. Capaian terhadap RPJMD sebesar 60,58%, menunjukkan bahwa indikator ini masih kurang dari target yang ditetapkan.

4. Kapasitas Ruas Jalan yang Baik

Realisasi sampai dengan tahun 2025 berada pada kategori B sesuai dengan target RPJMD kategori B. Dengan demikian capaian indikator ini adalah 100% dan telah memenuhi target akhir RPJMD.

5. Jumlah Sarana dan Prasarana Angkutan Darat dan Laut yang Tersedia

Realisasi sampai dengan tahun 2025 sebanyak 190 unit dibandingkan target RPJMD sebesar 255 unit. Capaian terhadap target RPJMD sebesar 74,51%. Masih terdapat kekurangan sebanyak 65 unit untuk mencapai target akhir RPJMD.

6. Jumlah Kendaraan yang Memenuhi Laik Angkutan Jalan

Realisasi sampai dengan tahun 2025 sebanyak 6.150 unit dibandingkan target RPJMD sebesar 7.360 unit. Capaian terhadap RPJMD sebesar 83,56%. Masih diperlukan peningkatan sebanyak 1.210 unit agar target akhir RPJMD dapat tercapai.

7. Angka Kecelakaan Lalu Lintas Darat dan Laut

Realisasi sampai dengan tahun 2025 tercatat sebanyak 351 kasus dibandingkan target RPJMD sebesar 115 kasus. Karena indikator ini bersifat penurunan, maka capaian dihitung secara proporsional dan menghasilkan nilai sebesar 32,76%. Hal ini menunjukkan bahwa indikator keselamatan lalu lintas belum tercapai dan memerlukan perhatian serta intervensi kebijakan yang lebih intensif.

KESIMPULAN UMUM

Secara umum, rata-rata capaian terhadap target RPJMD adalah sebesar 83,03%. Beberapa indikator telah melampaui target, khususnya pada mobilitas orang dan barang serta kapasitas jalan. Namun demikian, indikator sarana prasarana, uji laik kendaraan, serta keselamatan lalu lintas masih memerlukan strategi percepatan dan penguatan kebijakan agar target akhir RPJMD dapat tercapai secara optimal.

RENSTRA (2025-2029)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

c. Faktor Hambatan dan Solusi

I. PENDAHULUAN

Dokumen ini disusun sebagai bentuk evaluasi terhadap capaian indikator kinerja dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021–2025. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi tahun 2025 serta melihat akumulasi capaian sampai dengan akhir periode RPJMD.

II. GAMBARAN UMUM CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan hasil evaluasi, rata-rata capaian kinerja tahun 2025 mencapai 97,43%. Secara umum kinerja penyelenggaraan urusan perhubungan menunjukkan hasil yang baik dan terdapat 4 indikator yang mampu mencapai bahkan melampaui target tahunan. Namun demikian, juga terdapat 3 indikator yang belum optimal dan memerlukan perhatian khusus dalam penyempurnaan perencanaan dan penganggaran ke depan. Berikut penjelasannya:

III. ANALISIS KEBERHASILAN

1. Persentase Trayek Angkutan yang Tersedia

Realisasi tahun 2025 mencapai 60,40% dari target 57,50% atau sebesar 105,04%. Hal ini menunjukkan peningkatan layanan transportasi yang konsisten sejak tahun 2021. Keberhasilan ini didukung oleh optimalisasi perizinan trayek serta koordinasi yang baik dengan operator angkutan.

2. Jumlah Mobilitas Orang dan Barang melalui Pelabuhan/Terminal

Realisasi mobilitas orang mencapai 220.947 orang (100,43%) dan barang sebesar 21.548 ton (105,11%). Peningkatan ini mencerminkan membaiknya aktivitas ekonomi dan konektivitas wilayah.

3. Jumlah Sarana dan Prasarana Angkutan Darat dan Laut

Realisasi sebesar 90 unit dari target 50 unit (180%). Capaian ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan infrastruktur transportasi.

4. Kapasitas Ruas Jalan yang Baik

Kondisi kapasitas ruas jalan tetap berada pada kategori baik (nilai B) sesuai target akhir RPJMD.

IV. ANALISIS KEGAGALAN DAN BELUM OPTIMAL

1. Jumlah Rambu Sungai yang Tersedia

Realisasi tahun 2025 tidak mencapai target (0% dari target 2 unit). Hal ini diduga dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran dan perubahan prioritas program.

RENSTRA (2025-2029)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

2. Jumlah Kendaraan yang Memenuhi Laik Jalan

Realisasi mencapai 94,24% dari target tahunan. Walaupun secara kumulatif melampaui target RPJMD, target tahun berjalan belum sepenuhnya tercapai. Faktor penyebab antara lain rendahnya kepatuhan uji KIR dan keterbatasan fasilitas pengujian.

3. Angka Kecelakaan Lalu Lintas

Realisasi sebesar 136 kasus dari target 130 kasus (95,59%). Jumlah kecelakaan masih di atas target dan menunjukkan perlunya penguatan program keselamatan transportasi.

V. PERMASALAHAN UMUM

Beberapa permasalahan yang mempengaruhi capaian RPJMD antara lain keterbatasan anggaran, perubahan prioritas pembangunan, belum optimalnya pengawasan, serta perlunya integrasi data kinerja antar bidang.

VI. SOLUSI DAN REKOMENDASI

1. Melakukan penajaman perencanaan berbasis data historis dan risiko.
2. Memprioritaskan penganggaran pada indikator yang belum tercapai.
3. Meningkatkan pengawasan dan penegakan regulasi keselamatan transportasi.
4. Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi berbasis digital.
5. Memperkuat koordinasi lintas sektor dalam upaya penurunan angka kecelakaan.

d. Analisis SWOT Terhadap Pengembangan Pelayanan OPD

a. STRENGTHS (KEKUATAN):

1. Komitmen dan kompetensi sumber daya manusia di beberapa bagian/unit.
2. Sarana dan prasarana yang relatif memadai.
3. Regulasi yang mendukung.

b. WEAKNESSES (KELEMAHAN):

1. Masih rendahnya wawasan serta pemahaman masyarakat terhadap keselamatan berlalulintas;
2. Belum seimbangnya kapasitas jalan dengan pertumbuhan kepemilikan kendaraan bermotor dari tahun ke tahun;
3. Fasilitas parkir yang masih menggunakan badan jalan yang dapat mengurangi kapasitas jalan dan menyebabkan kemacetan;

RENSTRA (2025-2029)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

4. Trotoar jalan masih digunakan oleh pedagang kaki lima sehingga mengganggu kelancaran arus lalu lintas ;
 5. Masih adanya ruas jalan yang digunakan selain untuk kepentingan lalu lintas;
 6. Sarana dan prasarana perhubungan belum optimal;
 7. Jaringan trayek angkutan jalan masih terdapat tumpang tindih;
 8. Sarana dan prasarana angkutan barang yang belum memadai;
 9. Masih kurang tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka da guardrail) dan penerangan jalan Kabupaten;
 10. Kompetensi SDM secara keseluruhan masih perlu ditingkatkan, khususnya di bidang non teknis;
- c. OPPORTUNITIES (PELUANG) :**
1. Tersedianya angkutan umum yang melayani sebagian Wilayah Kabupaten sehingga memberi Harapan masyarakat terhadap peningkatan Pelayanan Publik Dishub;
 2. Kesadaran masyarakat akan kebutuhan keselamatan dalam bertransportasi.
 3. Rencana pembangunan infra struktur diwilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
 4. Adanya regulasi daerah yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dishub.
 5. Semakin meningkatnya keterbukaan informasi publik melalui media massa cetak dan elektronik sehingga masyarakat/stakeholder dapat memberikan aspirasi yang positif untuk Dishub.
- d. THREATS (ANCAMAN):**
1. Adanya kepentingan pihak tertentu yang tidak mendukung upaya peningkatan kualitas perhubungan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 2. Keterbatasan lahan jalan di Kabupatenn Tanjung Jabung Barat karena makin meningkatnya pemukiman (residensial) sehingga peluang memperlebar jalan untuk memperlancar transportasi menjadi sulit;

RENSTRA (2025-2029)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

3. Pola hidup masyarakat yang lebih suka menggunakan kendaraan pribadi dan tidak dapat dibendung penambahan unit kendaraan pribadi

2.4 KELOMPOK SASARAN

b. KELOMPOK SASARAN

Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program dan kegiatan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah :

1. Masyarakat pengguna jalan dan pengguna kendaraan bermotor ;
2. Pemilik kendaraan umum angkutan orang dan kendaraan barang ;
3. Pemilik angkutan orang dan/atau barang di perairan;
4. Semua pihak yang berkepentingan pada urusan perhubungan.

c. MITRA PERANGKAT DAERAH DALAM PEMBERIAN LAYANAN

1. Polres Tanjab Barat

Menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta tugas-tugas Polri lain dalam daerah hukumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. KODIM 0419 TANJAB

Menjaga keutuhan wilayah kecamatan dari segala gangguan dan ancaman, baik itu yang datang dari luar maupun dari dalam.

3. MAKO TNI AL

Anggota Lanal mengedepankan kearifan lokal dan bernilai ibadah dalam menjalankan tugas, selanjutnya pelaksanaan tugas itu memberi kenyamanan bagi masyarakat. Selain itu harus dapat memantapkan koordinasi dengan instansi terkait.

4. PENGELOLA PARKIR

Melakukan Pelayanan Fasilitas Parkir Kendaraan Roda Dua dan Roda Empat.

d. KERJA SAMA PERANGKAT DAERAH DALAM PEMBERIAN LAYANAN

1. PT. ASDP

Menyediakan layanan transportasi laut menggunakan kapal ferry untuk menghubungkan antar pulau, baik yang bersebelahan maupun

RENSTRA (2025-2029)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

yang lebih jauh. Melakukan 2 rute pelayanan yaitu Kuala Tungkal – Batam dan Kuala Tungkal Dabo

2. **DAMRI**

DAMRI adalah pilar transportasi darat yang menyediakan layanan angkutan massal untuk masyarakat. Untuk wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Damri menyediakan mobil angkutan untuk rute Kuala Tungkal – Teluk Nilau – Senyerang.

b. PORTER

Jasa porter berperan membantu kelancaran pelayanan pelabuhan dengan mempercepat proses perpindahan barang penumpang, menjaga ketertiban dan keamanan bagasi, serta meningkatkan kenyamanan dan kualitas layanan bagi pengguna jasa pelabuhan.

c. TIKET ONLINE

Tiket online berperan meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan pelabuhan dengan mempercepat proses pembelian tiket, mengurangi antrean, memudahkan pendataan penumpang, serta mendukung pengelolaan operasional yang lebih tertib dan akurat.

2.5 Permasalahan dan Isu Strategis OPD

a. INDETIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Fungsi dan peran serta masalah yang ditimbulkan oleh sarana transportasi ini semakin kompleks seiring dengan kemajuan teknologi dan pertumbuhan penduduk.

Transportasi semakin vital peranannya di jaman modern ini sejalan dengan kemajuan ekonomi dan mobilitas masyarakatnya, dan itu sudah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat karena berkaitan langsung dengan ekonomi, pengetahuan dan informasi.

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dimaksudkan untuk mengetahui adanya faktor-faktor yang mempengaruhi dalam menjalankan tugasnya (Self Evaluation). Untuk mengetahui permasalahan yang ada dilakukan dengan cara melakukan evaluasi hasil capaian kinerja sebelumnya dan dilakukan analisa faktor-faktor yang mendorong serta faktor-faktor yang menghambat baik yang berada didalam kewenangan Dinas Perhubungan Tanjung Jabung Barat maupun dari kewenangan yang ada di luar Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Aspek yang menjadi bahan kajian untuk melakukan identifikasi permasalahan

RENSTRA (2025-2029)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

berdasarkan tugas dan fungsi meliputi permasalahan kesekretariatan dan permasalahan yang ada di bidang atau yang menjadi urusan wajib perhubungan.

Tabel 2.8 Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Urusan/Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum Optimalnya Akseibilitas Masyarakat Melalui Ketersediaan Sarana Dan Prasana Taransportasi Darat Dan Laut		
		Masih Kurangnya Konektivitas Angkutan	
			Belum ada Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/kota
			Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal Belum Menyeluruh
			Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau Belum Menyeluruh
			Pembangunan Dermaga Sungai/Halte Sungai dan Danau Belum Menyeluruh

RENSTRA (2025-2029)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

		Mobilitas Orang/Barang Melalui Pelabuhan/Dermaga/ Terminal Pertahun yang meningkat	
			Masih kurangnya pemenuhan Angkutan Orang Dalam 1 (satu) Daerah Kab/kota
			Pengawasan penyediaan Angkutan pada periode arus lalu lintas tinggi belum optimal.
		Belum optimalnya Pemanfaatan Terminal	
			Pembangunan Terminal Terpadu Pada Kawasan Pelabuhan
			Masih diperlukan Pengembangan sarana dan prasarana terminal
		Masih kurangnya implementasi penetapan simpul dan jaringan transportasi strategis	
			Masih kurangnya implementasi dokumen RIJLLAJ
			Masih diperlukannya pengendalian pelaksanaan

RENSTRA (2025-2029)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

			Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/kota
			Perlu menyusun Rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal
			Perlu menyusun Rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau
	Belum optimalnya Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Darat dan Laut		
		Masih rendahnya Jumlah ruas jalan yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan	
			Perlu pemasangan prasarana jalan kab/kota pada titik rawan kecelakaan
			Perlu melakukan pemeliharaan perlengkapan jalan

RENSTRA (2025-2029)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

		Masih kurangnya Kendaraan Yang Memenuhi Laik Angkutan Jalan	
			Perlunya menyediakan sarana dan prasarana Gedung PKB
			Masih kurangnya Jumlah Kendaraan bermotor wajib uji yang lulus uji berkala di Kab/kota
			Perlu dilakukan identifikasi dan analisis potensi jumlah kendaraan bermotor yang wajib uji
		Prediksi Menurunnya Jumlah Angka Kecelakaan Darat dan Laut yang melebihi target	
			Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas belum optimal
			Perlunya rekomendasi hasil Forum LLAJ
			Perlunya rekomendasi/persetujuan Andalalin di Jalan Kab/kota
			Masih perlunya Pengawasan dan

RENSTRA (2025-2029)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

			Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi
			Masih rendahnya kompetensi pengemudi kendaraan bermotor
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah dan Pengelolaan Resiko Perangkat Daerah		
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan perhubungan yang belum memenuhi standar	
			Masih diperlukan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah
			Masih diperlukan pelaksanaan administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah
			Masih diperlukan pelaksanaan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah

RENSTRA (2025-2029)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

			Masih diperlukan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah
			Masih diperlukan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
			Masih diperlukan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah
			Masih diperlukan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah
		Belum optimalnya pemenuhan Nilai SAKIP OPD sesuai target	
			Masih diperlukan Kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Perangkat Daerah

b. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM BUPATI (PM)

Dengan mensinkronkan pada sasaran pokok sesuai dengan arah kebijakan pembangunan lima tahun periode 2025 – 2029 dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2025 – 2045 dan berdasarkan masalah – masalah utama yang sedang dihadapi Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 4 (empat) tahun sesuai misi yang diemban,

RENSTRA (2025-2029)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

diwujudkan dalam visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2025 – 2029 :

VISI ;

“Mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat BERKAH MADANI”

BERKAH ;

(Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman, Harmonis)

MADANI ;

(Mandiri dan ber-Inovasi)

MISI ;

1. Berkah dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kondisi sosial yang tenteram, tertib, mantap dan inovatif;
2. Berkah dalam peningkatan Tata Kelola pemerintahan dan Pelayanan publik;
3. Berkah dalam Upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan Pembangunan dari desa ke kota yang berkelanjutan.

Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang mendukung pemenuhan visi & misi 3 Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut **“Terwujudnya Kualitas Pelayanan dan Konektivitas Transportasi Dari Desa Ke Kota Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi”** mendukung pada pemenuhan Misi 2 dan **“Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah”** mendukung pada pemenuhan Misi 2.

Keterkaitan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menunjang misi tersebut sesuai tugas pokoknya yaitu melaksanakan sebagian urusan daerah dibidang perhubungan untuk menyediakan fasilitas infrastruktur transportasi yang nyaman dan aman di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maju secara teknologi, hijau dengan mengurangi polusi udara sebagai akibat dari emisi gas buang kendaraan bermotor sehingga ikut berperan dalam kesehatan manusia yang dilakukan secara seimbang dan berkelanjutan. Adapun fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang terkait dengan misi tersebut yaitu merumuskan kebijakan teknis di bidang perhubungan dan menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan untuk terciptanya infrastruktur transportasi yang nyaman, aman, berwawasan lingkungan secara merata dan berkelanjutan.

Faktor – faktor yang mungkin menjadi penghambat bagi terwujudnya visi dan misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat diantaranya :

RENSTRA (2025-2029)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

1. Tingkat Kebutuhan volume anggaran yang besar untuk penyediaan salah satu prasarana laut seperti halte sungai sebagai penghubung konektivitas orang dan barang dari Desa Ke Kota
2. Tingkat pelayanan angkutan umum yang belum sesuai dengan harapan masyarakat sehingga sulit untuk mendorong mereka kembali menggunakan sarana angkutan umum agar dapat menekan penggunaan kendaraan pribadi di jalan.
3. Survey kapasitas ruas jalan yang menunjukkan masih banyak Bahu jalan, tipe jalan dan hambatan samping tidak sesuai standar karena masih banyak pemukiman warga dan pedagang kaki lima yang menggunakan bahu jalan
4. Masih kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan tertib berlalu lintas sehingga sebagian besar kecelakaan terjadi karena faktor kelalaian pengemudi.
5. Masih adanya akasi – aksi yang tidak terpuji yang dilakukan oleh sebagian kecil masyarakat yang berakibat rusak/hilangnya fasilitas kelengkapan jalan seperti rambu – rambu lalu lintas sehingga berpengaruh terhadap kenyamanan dan keamanan di jalan.

Adapun faktor – faktor pendorong pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yaitu :

1. Adanya diklat, bimtek peningkatan kapasitas SDM aparatur perhubungan yang diselenggarakan dan dibiayai oleh pemerintah pusat, sehingga menjadikan sebuah harapan untuk peningkatan kompetensi SDM perhubungan.
2. Adanya dorongan dari pemerintah pusat dan propinsi serta keikutsertaan / lembaga/ instansi non pemerintah yang berpartisipasi dan turut serta dalam pemenuhan prasarana kelengkapan angkutan darat dan laut, yang sangat membantu dalam upaya meningkatkan konektivitas orang/barang dan keselamatan berlalu lintas di jalan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
3. Akan disusun rencana kegiatan penyusunan dokumen rencana induk LLAJ dan survey keselamatan jalan untuk menciptakan tata kelola transportasi yang bersih aman dan selamat.

RENSTRA (2025-2029)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

c. TELAAHAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA (K/L) DAN RENSTRA PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA

i. Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan

Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Kemenhub tahun 2025-2029 bertujuan untuk mewujudkan visi "Transportasi Maju Menuju Indonesia Emas 2045" melalui peningkatan konektivitas, pelayanan, keselamatan, dan keberlanjutan transportasi. Dokumen ini disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan mengacu pada prioritas pembangunan nasional, serta mencakup arah kebijakan di berbagai sektor seperti perkeretaapian, darat, laut, dan udara.

Visi dan misi utama

Visi: Transportasi maju menuju Indonesia Emas 2045.

Tujuan umum: Terwujudnya transportasi nasional yang handal, inklusif, dan berdaya saing.

Arah kebijakan dan fokus utama

- **Peningkatan konektivitas:** Meningkatkan konektivitas antar wilayah untuk pemerataan ekonomi dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
- **Peningkatan efisiensi dan daya saing:** Meningkatkan efisiensi dan daya saing transportasi, termasuk dalam hal logistik.
- **Keselamatan dan keamanan:** Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi di seluruh moda transportasi.
- **Pelayanan yang berkualitas:** Memberikan pelayanan transportasi yang berkualitas dan terintegrasi.
- **Transportasi yang berkelanjutan:** Mengembangkan sistem transportasi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, termasuk upaya mitigasi perubahan iklim.
- **Pengembangan wilayah:** Meningkatkan peran transportasi dalam mendukung pembangunan wilayah, termasuk di wilayah Tertinggal, Terluar, Terdepan, dan Perbatasan (3TP).

d. Telaahan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jambi

RENSTRA (2025-2029)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

Visi yang akan dicapai dalam Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2021 adalah : "Terwujudnya Jambi Tuntas 2021 melalui penyelenggaraan sistem transportasi yang andal dan memiliki daya saing dalam satu kesatuan sistem transportasi nasional dalam rangka menunjang perekonomian daerah." Sedangkan misi adalah :

1. Meningkatkan penyediaan Infrastruktur Transportasi yang memiliki daya saing dan terpadu didukung oleh sistem perencanaan yang berkelanjutan.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan transportasi melalui pemeliharaan infrastruktur, pengembangan transportasi massal dan berwawasan lingkungan.
3. Meningkatkan penyelenggaraan Pelayanan Transportasi yang Efisien dan Efektif dalam rangka mewujudkan sistem transportasi yang terpadu, tertib, aman, lancar, nyaman, selamat dan terjangkau.
4. Memperluas jaringan pelayanan dan penyediaan akses Transportasi untuk mendukung Distribusi Barang/Jasa melalui pengembangan transportasi multi moda.
5. Meningkatkan Akuntabilitas kinerja kelembagaan didukung oleh Sumber Daya Manusia yang kompeten, berkualitas, profesional dan menguasai teknologi.

e. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

1. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sudah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024-2044 , Adapun telaahan Rencana tata Ruang Wilayah di dalam dokumen Renstra ini :

1. Pengembangan dan Peningkatan Terminal Penumpang Type B di Kecamatan Bram Itam;
2. Peningkatan Terminal Penumpang Type C di Kecamatan Batang Asam, Kecamatan Betara, Kecamatan Merlung, Kecamatan Pengabuan, Kecamatan Renah Mendaluh, Kecamatan Tungkal Ilir, Kecamatan Tebing Tinggi;

RENSTRA (2025-2029)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

3. Program Pembangunan Jalur Kereta Api Antar Kota di Kecamatan Muara Papalik, Kecamatan Merlung, Kecamatan Tungkal Ulu, Kecamatan Batang Asam;
4. Program Pembangunan Jaringan Jaringan Jalur Kereta api di 13 Kecamatan;
5. Program Pembangunan Stasiun Kreta Api di Kecamatan Merlung, Kecamatan Batang Asam, Kecamatan Muara Papalik, Kecamatan Tungkal Ulu dan Kecamatan Tungkal Ilir;
6. Pembangunan, pengembangan, dan peningkatan lintas penyeberangan dalam kabupaten di Kecamatan Bram Itam, Kecamatan Seberang Kota, Kecamatan Tungkal Ilir, kecamatan Pengabuan, Kecamatan Senyerang, Kecamatan Tungkal ulu, Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Batang Asam;
7. Pembangunan dan pemeliharaan pelabuhan penyeberangan Kelas I di Pelabuhan Kuala Tungkal di Kecamatan Tungkl Ilir
8. Pembangunan, pengembangan, dan peningkatan pelabuhan pengumpan regional di Pelabuhan Kuala Tungkal di Kecamatan Tungkl Ilir
9. Pembangunan, pengembangan, dan peningkatan Pelabuhan pengumpan lokal di Pelabuhan Muara Deli Kecamatan Kuala Betara dan Pelabuhan betara di kuala betara;
10. Pembangunan, pengembangan, dan peningkatan pelabuhan perikanan pantai di Kecamatan Tungkal Ilir
11. Pembangunan, pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan di Semua Kecamatan

2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis/KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

- a. Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan
 - Keterbatasan aksesibilitas antarwilayah.
 - Potensi peningkatan emisi dari kendaraan bermotor.
 - Kerusakan ekosistem pesisir dan bantaran sungai.
 - Keselamatan lalu lintas yang belum optimal.
 - Keterbatasan transportasi publik ramah lingkungan.

RENSTRA (2025-2029)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

- b. Analisis Kebijakan Rencana Program Dinas Perhubungan
 - 1. Kebijakan Pengembangan Transportasi
 - Fokus pada peningkatan konektivitas wilayah.
 - Risiko: Menambah tekanan pada ekosistem pesisir.
 - Peluang: Mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan akses.
 - 2. Rencana Pembangunan Infrastruktur
 - Pembangunan dermaga, peningkatan jalan, dan fasilitas transportasi.
 - Dampak potensial: Perubahan bentang alam, peningkatan polusi.
 - 3. Program Keselamatan dan Pelayanan
 - Optimalisasi rambu & marka, peningkatan pelayanan angkutan umum.
 - Dampak positif: Keselamatan meningkat, efisiensi transportasi.
- c. Alternatif dan Rekomendasi
 - Pengembangan transportasi rendah karbon (angkutan umum, jalur sepeda).
 - Pembangunan infrastruktur berbasis mitigasi dampak lingkungan.
 - Revitalisasi transportasi sungai dengan standar ramah lingkungan.
 - Penguatan pengawasan dan pengendalian emisi kendaraan.
 - Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan transportasi.

2.6 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Perumusan isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggung jawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu,

RENSTRA (2025-2029)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Suatu isu strategis bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat di masa lima tahun mendatang. Adapun yang menjadi isu-isu strategis pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut:

1. Masih belum optimalnya sarana dan prasarana angkutan darat dan laut;
2. Masih adanya ruas jalan yang digunakan selain untuk kepentingan lalu lintas yang dapat menimbulkan kemacetan dan berdampak terhadap polusi udara dan kebisingan kendaraan;
3. Jaringan trayek angkutan jalan masih terdapat tumpang tindih;
4. Masih adanya kawasan yang belum terlayannya trayek angkutan kota;
5. Masih rendahnya pengawasan pengendalian angkutan umum Angdes yang melintasi wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
6. Kesenjangan minat pada layanan terminal tipe c ;
7. Masih adanya kendaraan angkutan umum yang tidak lulus uji;
8. Masih lambatnya penanganan kebutuhan dan/atau pengaduan masyarakat terhadap perlengkapan jalan pada ruas jalan nasional dan/atau provinsi yang berada di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Berbagai isu strategis tersebut, bila dianalisis dan ditelaah lebih lanjut mengerucut pada 2 isu strategis utama yakni :

1. Kesenjangan yang makin besar antara perkembangan kebutuhan dan aktivitas masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan sarana prasarana angkutan darat dan laut yang tersedia;
2. Manajemen rekayasa lalu lintas, manajemen angkutan dan pengendalian lalu lintas belum optimal.

RENSTRA (2025-2029)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

Tabel 2.10 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis OPD

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Dinas Perhubungan	Permasalahan OPD	Isu KLHS yang Relevan Dengan OPD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevansi Dengan OPD			Isu Strategis OPD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Kesenjangan yang makin besar antara perkembangan kebutuhan dan aktivitas masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan sarana prasarana angkutan darat dan laut yang tersedia;	Masih belum optimalnya sarana dan prasarana angkutan darat dan laut	Integrasi rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ke dalam rencana tata ruang wilayah yang berkelanjutan.	Pengembangan Infrastruktur dan Konektivitas	Konektivitas Transportasi Nasional:	Berkah dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan pembangunan dari desa ke kota yang berkelanjutan	Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas transportasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Manajemen rekayasa lalu lintas, manajemen angkutan dan pengendalian lalu lintas belum optimal	Belum optimalnya Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Darat dan Pengelolaan Pelayaran	- Pengurangan Emisi Gas Buang - Transportasi Ramah Lingkungan/ Berkelanjutan (Economic Blue Transportation)	Keselamatan dan Keamanan	Keselamatan Transportasi	Berkah dalam peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatkan kualitas pelayanan Penyelenggaraan LLAJ dan Pengelolaan Pelayaran

RENSTRA (2025-2029)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT



BAB III

GAMBARAN PELAYANAN SKPD PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS OPD

3.1 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Visi Tanjung Jabung Barat “Mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat BERKAH MADANI” (Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman, Harmonis, Mandiri, dan ber-inovasi).

Relevansi pemenuhan capaian Misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang berkaitan dengan urusan Dinas Perhubungan termuat pada :

1. Misi 3 yaitu Berkah dalam Upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan Pembangunan dari desa ke kota yang berkelanjutan.
2. Misi 2 Berkah dalam Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang mendukung pemenuhan visi & misi 3 Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut “Terwujudnya Kualitas Pelayanan dan Konektivitas Transportasi Dari Desa Ke Kota Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi” mendukung pada pemenuhan Misi 2 dan “Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah” mendukung pada pemenuhan Misi 2.

Sedangkan Sasaran Dinas Perhubungan Kab. Tanjung Jabung Barat yang merupakan penjabaran dari Tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Terdapat beberapa sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya Aksebilitas Masyarakat dan Kualitas Pelayanan Lalu Lintas Darat dan Laut



2. Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Darat dan Laut
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah dan Pengelolaan Resiko Perangkat Daerah.

Keterkaitan tujuan dan sasaran dalam lima tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam Tabel 3.1 :

RENSTRA (2025-2029)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

**Tabel 3.1 VISI, MISI TUJUAN SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA
PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Awal 2024	Target Kinerja Sasaran					Kondisi Akhir Renstra
					2025	2026	2027	2028	2029	
Meningkatnya kesetaraan akses infrastruktur antar wilayah	1. Terwujudnya Kualitas Pelayanan Dan Konektivitas Transportasi Dari Desa ke Kota Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi.	1.1. Meningkatkan Aksesibilitas Masyarakat Melalui Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Transportasi Darat Dan Laut	1.1.1. Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota	56,9%	57,5%	58,6%	59,7%	60%	61%	61 %
			1.1.2. Jumlah Halte Sungai Yang Dibangun	4 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	10 Unit
			1.1.3. Jumlah Mobilitas Orang/Barang Melalui Pelabuhan/Dermaga/Terminal Tahunan	275.151 Orang/12.422 Ton	220.000 Orang/20.500 Ton	221.000 Orang/21.000 Ton	221.500 Orang/21.500 Ton	222.000 Orang/22.000 Ton	222.500 Orang/22.500 Ton	1.109.000 Orang/107.500 Ton
Meningkatnya aksesibilitas dan Kualitas		1.2. Meningkatkan Penyelenggaraan Lalu Lintas	1.2.1. Jumlah Fasilitas Keselamatan dan Perlengkap	31 Unit	35 Unit	40 Unit	45 Unit	50 Unit	55 Unit	255 Unit

RENSTRA (2025-2029)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

Pelayanan Publik kepada Masyarakat		Angkutan Darat dan Laut	a Jalan Yang Tersedia							
			1.2.2. Angka Lalu lintas Harian Rata-Rata Tahunan (LHRT) Ruas Jalan	(0,27) B	(0,30-0,44) B	(0,30-0,44) B	(0,30-0,44) B	((0,30-0,44) B	(0,30-0,44) B	(0,30-0,44) B
			1.2.3. Jumlah Kendaraan Yang Memenuhi Laik Angkutan Jalan	1150 Unit	1700 Unit	1750 Unit	1800 Unit	1850 Unit	1900 Unit	9000 Unit
			1.2.4. Angka Kecelakaan Lalu Lintas Darat dan Laut	50 Kasus	130 Kasus	125 Kasus	120 Kasus	110 Kasus	100 Kasus	90 Kasus
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	2. Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	2.1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah dan Pengelolaan Resiko Opd	2.1.1. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	70	80	82	84	86	88	88



3.2. Manajemen Risiko Strategis Perangkat Daerah

Manajemen risiko merupakan proses pengelolaan terhadap risiko mulai dari identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko, termasuk rencana pemantauan dan rencana komunikasi. Proses manajemen risiko dalam penyusunan renstra dilakukan pada konteks strategis sampai dengan operasional. Untuk level strategis perangkat daerah dilakukan proses manajemen risiko pada konteks risiko strategis.

Hasil identifikasi terdapat 7 (tujuh) pernyataan Risiko Strategis Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 diantaranya :

1. Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota
2. Jumlah halte sungai yang terbangun belum memenuhi target
3. Peningkatan kapasitas penumpang dan jumlah barang yang melalui pelabuhan setiap tahunnya
4. Lalu lintas Harian Rata-Rata Tahunan (LHRT) Ruas Jalan dengan
5. Penyediaan fasilitas keselamatan jalan yang belum optimal
6. Pengujian kendaraan belum dilakukan secara berkala
7. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap budaya tertib berlalu lintas

Sesuai dengan perhitungan skala resiko terdapat pernyataan resiko yang membutuhkan Rencana Tindak Pengendalian. Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Risiko Strategis Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 sesuai tabel 4.3 berikut.



Tabel 3.2

Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Risiko Strategis Perangkat Daerah
Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Pernyataan Resiko	Skala Resiko	Sebab	Dampak	Rencana Tidak Lanjut Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
Tujuan : Terwujudnya Kualitas Pelayanan Dan Konektivitas Transportasi Dari Desa ke Kota Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi.	Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota	Keterhubungan Wilayah Belum Optimal	14,00	Menghambat pertumbuhan ekonomi dan penghubung antar wilayah perairan	Menghambat pertumbuhan ekonomi dan penghubung antar wilayah perairan	Melakukan peningkatan konektivitas darat dan laut	Dishub	12 Bulan Setiap Tahunnya
	Jumlah Halte Sungai Yang Dibangun	Jumlah Halte Sungai Yang Terbangun Belum Memenuhi Target	12,00	Kebutuhan Anggaran Yang Besar	Keterbatasan Akses Antar Desa dan Ke Kota	Mendorong Peningkatan jumlah pembangunan halte sungai antar desa yang saling terhubung melalui dana APBN	Dishub	12 Bulan Setiap Tahunnya

RENSTRA (2025-2029)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

	Jumlah Mobilitas Orang/Barang Melalui Pelabuhan/Dermaga/ Terminal Tahun	Peningkatan Kapasitas Penumpang dan Jumlah Barang Yang Melalui Pelabuhan/Dermaga/Terminal Tahun	15,94	Ketersediaan sarana dan prasarana layanan transportasi yang kurang memadai	Keterlambatan operasional keberangkatan dan kedatangan kapal sehingga terjadi antrian panjang	1. pengembang an fasilitas pelabuhan seperti pengembang an dermaga dua dan fasilitas pendukung lainnya 2. Penambahan Kapal Operasional Penyeberang an	Dishub	12 Bulan Setiap Tahunnya
	Jumlah Fasilitas Keselamatan dan Perlengkapan Jalan Yang Tersedia	Fasilitas Keselamatan Pada Titik Rawan Kecelakaan Belum Optimal	14,25	Anggaran Yang Terbatas	Angka kecelakaan meningkat	Pengadaan Rambu Lalu Lintas	Dishub, Sat Lantas Polri, PM, Babinsa, Satpol PP	12 Bulan Setiap Tahunnya

RENSTRA (2025-2029)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

	Angka Lalu lintas Harian Rata-Rata Tahunan (LHRT) Ruas Jalan	Ruas jalan dengan nilai rasio C	15,00	Bahu jalan, tipe jalan dan hambatan samping tidak sesuai standar karena masih banyak pemukiman warga dan pedagang kaki lima yang menggunakan bahu jalan	Berpengaruh signifikan terhadap kemacetan dan kecelakaan lalu lintas	Survey laik ruas jalan bebas hambatan (V/C Ratio)	Dishub	12 Bulan Setiap Tahunnya
	Jumlah Kendaraan Yang Memenuhi Laik Angkutan Jalan	Pengujian Kendaraan Belum Dilakukan	7,50	Masih Kurangnya Kendaraan Yang Belum Memenuhi Standar Laik Jalan	Angka kecelakaan Meningkat	Melakukan Sosialisasi Wajib Pengujian Kendaraan Bermotor	Dishub	12 Bulan Setiap Tahunnya

RENSTRA (2025-2029)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

	Prediksi Menurunnya Jumlah Angka Kecelakaan Darat dan Laut	Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap budaya tertib berlalu lintas	15,88	Kurang sosialisasi/ Fasilitas Keselamatan	Masyarakat pelanggar tata tertib lalu lintas meningkat	1. Melakukan Sosialisasi Keselamatan Jalan secara Langsung dan Medi 2. Melakukan Penegakan GAKUM dan Razia Gabungan	Dishub, Satlantas	12 Bulan Setiap Tahunnya
--	--	---	-------	--	---	---	----------------------	--------------------------------



3.3. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah -langkah yang menggambarkan bagaimana tujuan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan dicapai. Rumusan strategi dilakukan melalui metode analisa SWOT dalam melihat Strengths (Kekuatan), Weaknesses (Kelemahan), Opportunities (Peluang), dan Threats (Ancaman) dan diformulasikan dalam pohon kinerja yang merupakan landasan berpikir logis dari proses bisnis yang dilakukan. Pohon Kinerja merupakan alat bantu untuk mengawal struktur logika sebab akibat atas berbagai kondisi yang diperlukan organisasi dalam menghasilkan outcome yang diinginkan. Rumusan strategi yang disusun bersifat operasional yang dapat dijabarkan dalam bentuk kegiatan – kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

a. STRATEGI

Strategi yang dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran dari Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 adalah dengan:

1. Meningkatkan kualitas dan jangkauan infrastruktur transportasi (jalan, jembatan, dermaga, terminal)
2. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap sarana prasarana transportasi darat dan laut yang diarahkan melalui peningkatan kinerja pelayanan angkutan agar dapat mendorong mobilitas dan perkembangan ekonomi, industri dan pariwisata.
3. Mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang aman dan berkualitas
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas dan layanan bidang perhubungan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kelancaran dan keselamatan sehingga dapat mengurangi angka kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kondisi sarana prasarana kelengkapan jalan dan faktor teknis kendaraan.
5. Meningkatkan kemampuan ruas jalan untuk melayani kebutuhan arus lalu lintas sesuai dengan fungsinya yang dapat diukur dan dibandingkan dengan standar tingkat pelayanan jalan.
6. Meningkatkan kualitas pengujian kendaraan bermotor secara berkala .

RENSTRA (2025-2029)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

7. Melakukan intensifikasi kegiatan gakum dan manajemen rekayasa lalu lintas guna menurunkan tingkat kecelakaan pasda sector darat dan laut.

b. PENAHAPAN PEMBANGUNAN RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN

Disamping itu, langkah selanjutnya adalah penahapan Pembangunan yang merupaka prioritas Pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan. Penahapan Renstra Dinas Perhubungan disajikan pada tabel berikut:

Tahap I (2025)	Tahap II (2026)	Tahap III (2027)	Tahap IV (2028)	Tahap V (2029)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Identifikasi dan penetapan prioritas konektivitas antar wilayah terisolir dan pusat pertumbuhan;	Pengembangan pelabuhan rakyat dan dermaga desa di kawasan pesisir dan sungai;	Pembangunan infrastruktur penunjang logistik, seperti jalan produksi, rest area, dan simpul transportasi;	Pengembangan transportasi publik lokal (angkutan pedesaan/angkutan perintis).	Monitoring dan evaluasi dampak konektivitas terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat.

Tahun	Fokus Pembangunan	Kegiatan Utama
Tahun 1	Penguatan Dasar & Perencanaan	➤ Penyusunan masterplan transportasi darat & laut. ➤ Pendataan sarpras dan kebutuhan jaringan. ➤ Penyusunan regulasi dan rencana trayek. ➤ Peningkatan kapasitas SDM & penertiban awal.
Tahun 2	Pembangunan Infrastruktur Prioritas	➤ Peningkatan akses jalan ke terminal/pelabuhan. ➤ Pembangunan/rehabilitasi terminal, dermaga, halte sungai. ➤ Penyediaan sarana keselamatan (rambu, marka, APILL). ➤ Penataan jaringan trayek & layanan angkutan perairan.
Tahun 3	Penguatan Layanan &	➤ Pengoperasian layanan dari infrastruktur yang dibangun.

RENSTRA (2025-2029)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

	Integrasi Moda	➤ Integrasi darat–laut pada simpul transportasi terpadu. ➤ Penambahan armada perintis & jaringan logistik. ➤ Implementasi manajemen lalu lintas berbasis ITS.
Tahun 4	Digitalisasi & Optimalisasi Operasional	➤ Penerapan e-ticketing, informasi rute, manajemen digital. ➤ Penguatan pengawasan & penegakan aturan lalu lintas. ➤ Optimalisasi pelayanan publik & inovasi sektor transportasi. ➤ Peningkatan kerja sama dengan swasta dan antar daerah.
Tahun 5	Pemantapan & Perluasan Layanan	➤ Evaluasi capaian Renstra & arah strategis lanjutan. ➤ Ekspansi layanan ke wilayah yang belum terjangkau. ➤ Pemantapan standar keselamatan & keamanan transportasi. ➤ Pengembangan kawasan ekonomi berbasis konektivitas.

c. ARAH KEBIJAKAN

Arah Kebijakan dirumuskan untuk membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih operasional, sehingga membantu memperjelas strategi agar lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional. Kebijakan juga digunakan untuk membantu mengarahkan pemilihan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Arah kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam pembangunan sektor transportasi merujuk pada arah kebijakan pembangunan transportasi wilayah yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. Kebijakan tersebut disinergikan dengan arah kebijakan pembangunan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2025-2045 yang menjadi salah satu alur logis perencanaan pembangunan sektor transportasi berkelanjutan.

Dalam menjabarkan sasaran daerah, Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 menerjemahkan beberapa sasaran menjadi beberapa bagian yang saling berkorelasi, dimana interkoneksi tersebut juga akan sejalan dengan sasaran pembangunan. Pemikiran di atas sebagai dasar pertimbangan penyusunan strategi dilakukan sebagai bagian dari perumusan arah



kebijakan pembangunan di Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Arah kebijakan Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4 Arah Kebijakan Renstra Dinas Perhubungan

No	Operasional NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Ket.
1	❖ Renstra Kemenhub Tahun 2025-2029	Pembangunan dan peningkatan akses jalan, jembatan, dan transportasi antar wilayah Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur konektivitas wilayah	➤ Meningkatkan kualitas jalan, jembatan, dermaga, dan terminal melalui pemeliharaan, rehabilitasi, dan peningkatan kapasitas. ➤ Memperluas jangkauan rute dan frekuensi layanan angkutan untuk mendukung mobilitas masyarakat di wilayah perkotaan, perdesaan, dan daerah perairan. ➤ Menggunakan teknologi dan sistem informasi untuk pemantauan kondisi infrastruktur.	
2	❖ Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 31 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang pelayanan	Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur konektivitas wilayah	➤ Mendorong kolaborasi pendanaan (APBD/APBN/KPS) serta koordinasi lintas sektor dalam pembangunan infrastruktur. ➤ Memperluas jangkauan infrastruktur transportasi untuk membuka akses wilayah dan memperkuat konektivitas antar-kecamatan/kabupaten. ➤ Menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan.	

RENSTRA (2025-2029)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

3	❖ Permenhub RI Nomor 15 tahun 2019 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek	Penyediaan sarana dan prasarana operasional yang memadai	➤ Penyelenggaraan/Penyediaan angkutan massal ➤ Meningkatkan kinerja pelayanan angkutan umum (darat dan laut) dengan memperbaiki kualitas armada, ketepatan waktu, kenyamanan, serta keselamatan perjalanan. ➤ Mengembangkan layanan transportasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi, industrialisasi, dan pariwisata melalui peningkatan konektivitas ke pusat kegiatan ekonomi, pelabuhan, dan destinasi wisata. ➤ Mengembangkan integrasi antar moda transportasi agar pergerakan orang dan barang lebih efisien.	
4	❖ Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 30 tahun 2021 tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	Penyediaan sarana dan prasarana operasional yang memadai	➤ Meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas perhubungan, termasuk sarana prasarana keselamatan jalan, terminal, dermaga, rambu, marka, dan fasilitas pendukung lainnya. ➤ Melaksanakan pemeliharaan rutin, perbaikan, serta modernisasi perlengkapan jalan dan fasilitas transportasi untuk mencegah kecelakaan akibat kondisi sarana prasarana yang tidak layak.	
5	❖ Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia (PKJI) 2023	Pembangunan dan peningkatan akses jalan, jembatan, dan transportasi antar wilayah	➤ Meningkatkan kapasitas dan kualitas ruas jalan sesuai fungsi dan standar tingkat pelayanan jalan (LOS) ➤ Melaksanakan pemeliharaan, peningkatan, dan pelebaran jalan pada titik-titik dengan volume lalu lintas tinggi. ➤ Mengembangkan jaringan jalan baru atau alternatif pada koridor yang tidak lagi memenuhi standar pelayanan. ➤ Mengoptimalkan manajemen rekayasa lalu lintas untuk menjaga kelancaran arus dan mengurangi kemacetan. ➤ Memperkuat monitoring dan evaluasi kinerja ruas jalan secara berkala	

RENSTRA (2025-2029)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

6	❖ Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pengembangan dan integrasi sistem pelayanan publik berbasis elektronik	➤ Meningkatkan kualitas pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor dengan standar keselamatan yang lebih ketat dan akurat. ➤ Memodernisasi peralatan uji kendaraan agar sesuai dengan teknologi terbaru dan memenuhi regulasi nasional. ➤ Meningkatkan kompetensi petugas penguji untuk menjamin integritas dan profesionalisme dalam proses pengujian. ➤ Memperkuat sistem administrasi dan pengawasan uji berkala untuk mencegah praktik penyimpangan. ➤ Mendorong digitalisasi layanan uji kendaraan guna meningkatkan transparansi dan kemudahan bagi masyarakat.	
7	❖ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ❖ Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Dan Rekayasa Analisis Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas	Peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap ketertiban umum	➤ Mengintensifkan kegiatan penegakan hukum (gakum) di sektor transportasi darat dan laut untuk meningkatkan kepatuhan pengguna jalan dan operator angkutan. ➤ Mengoptimalkan manajemen dan rekayasa lalu lintas, termasuk pengaturan arus, pembatasan kecepatan, dan penataan titik rawan kecelakaan. ➤ Memperkuat pengawasan keselamatan pada jalur darat dan perairan, terutama pada lokasi dengan risiko kecelakaan tinggi. ➤ Meningkatkan koordinasi dengan aparat terkait dalam penanganan pelanggaran dan upaya pencegahan kecelakaan. ➤ Meningkatkan edukasi keselamatan berlalu lintas dan berlayar bagi masyarakat dan pelaku transportasi.	



Relevansi antara Visi & Misi RPJMD serta penjabarannya dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Visi RPJMD

**“Mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat BERKAH MADANI”
(Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman, Harmonis,
Mandiri, dan ber-inovasi)”.**

Misi RPJMD :

- Misi 1 Berkah dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kondisi sosial yang tenteram, tertib, mantap dan inovatif;
- Misi 2 Berkah dalam Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- Misi 3 Berkah dalam Upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan Pembangunan dari desa ke kota yang berkelanjutan

Dinas perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengacu pada **Misi 3 RPJMD** yaitu Berkah dalam Upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan Pembangunan dari desa ke kota yang berkelanjutan. Dengan

- ❖ **Tujuan RPJMD adalah** Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan.
- ❖ **Sasaran RPJMD**
 - Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat
 - meningkatnya kesetaraan akses infrastruktur dan keuangan
 - Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
- ❖ **Strategi RPJMD**
 - Peningkatan konektivitas antar wilayah melalui pembangunan dan pemeliharaan jaringan transportasi
 - Peningkatan kolaborasi dengan pemerintah pusat dan swasta dalam pembangunan infrastruktur
 - Peningkatan infrastruktur pendukung pertumbuhan ekonomi
 - Pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi pelayanan publik
 - Peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap ketertiban umum Peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan



❖ **Arah Kebijakan RPJMD**

- Pembangunan dan peningkatan akses jalan, jembatan, dan transportasi antar wilayah Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur konektivitas wilayah
- Penyediaan sarana dan prasarana operasional yang memadai
- Pembangunan dan peningkatan akses jalan, jembatan, dan transportasi antar wilayah
- Pengembangan dan integrasi sistem pelayanan publik berbasis elektronik
- Peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap ketertiban umum

RENSTRA (2025-2029)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

Tabel 3.5

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Dinas Perhubungan Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029

Visi : KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH MADANI				
➤ Misi 3 : Berkah dalam Upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan Pembangunan dari desa ke kota yang berkelanjutan				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
1. Terwujudnya Kualitas Pelayanan Dan Konektivitas Transportasi Dari Desa ke Kota Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi.	1.1. Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat Melalui Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Transportasi Darat Dan Laut	1. Meningkatkan kualitas dan jangkauan infrastruktur transportasi (jalan, jembatan, dermaga, terminal)	➤ Meningkatkan kualitas jalan, jembatan, dermaga, dan terminal melalui pemeliharaan, rehabilitasi, dan peningkatan kapasitas. ➤ Memperluas jangkauan rute dan frekuensi layanan angkutan untuk mendukung mobilitas masyarakat di wilayah perkotaan, perdesaan, dan daerah perairan. ➤ Menggunakan teknologi dan sistem informasi untuk pemantauan kondisi infrastruktur.	➤ Program Penyelenggaraan LLAJ ➤ Program Pengelolaan Pelayanan
		2. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap sarana prasarana transportasi darat dan laut yang diarahkan melalui peningkatan	➤ Mendorong kolaborasi pendanaan (APBD/APBN/KPS) serta koordinasi lintas sektor dalam pembangunan infrastruktur. ➤ Memperluas jangkauan infrastruktur transportasi untuk membuka akses wilayah dan memperkuat konektivitas antar-kecamatan/kabupaten.	➤ Program Pengelolaan Pelayanan

RENSTRA (2025-2029)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

		kinerja pelayanan angkutan agar dapat mendorong mobilitas dan perkembangan ekonomi, industri dan pariwisata.	➤ Menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan.	
		3. Mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang aman dan berkualitas	➤ Penyelenggaraan/Penyediaan angkutan massal ➤ Meningkatkan kinerja pelayanan angkutan umum (darat dan laut) dengan memperbaiki kualitas armada, ketepatan waktu, kenyamanan, serta keselamatan perjalanan. ➤ Mengembangkan layanan transportasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi, industrialisasi, dan pariwisata melalui peningkatan konektivitas ke pusat kegiatan ekonomi, pelabuhan, dan destinasi wisata. ➤ Mengembangkan integrasi antar moda transportasi agar pergerakan orang dan barang lebih efisien.	➤ Program Penyelenggaraan LLAJ
	1.2. Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan	4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas dan layanan bidang perhubungan untuk	➤ Meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas perhubungan, termasuk sarana prasarana keselamatan jalan, terminal, dermaga,	➤ Program Penyelenggaraan LLAJ

RENSTRA (2025-2029)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

		menciptakan keamanan, ketertiban, kelancaran dan keselamatan sehingga dapat mengurangi angka kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kondisi sarana prasarana kelengkapan jalan dan faktor teknis kendaraan.	rambu, marka, dan fasilitas pendukung lainnya. ➤ Melaksanakan pemeliharaan rutin, perbaikan, serta modernisasi perlengkapan jalan dan fasilitas transportasi untuk mencegah kecelakaan akibat kondisi sarana prasarana yang tidak layak.	
		5. Meningkatkan kemampuan ruas jalan untuk melayani kebutuhan arus lalu lintas sesuai dengan fungsinya yang dapat diukur dan dibandingkan dengan	➤ Meningkatkan kapasitas dan kualitas ruas jalan sesuai fungsi dan standar tingkat pelayanan jalan (LOS) ➤ Melaksanakan pemeliharaan, peningkatan, dan pelebaran jalan pada titik-titik dengan volume lalu lintas tinggi. ➤ Mengembangkan jaringan jalan baru atau alternatif pada koridor yang tidak lagi memenuhi standar pelayanan.	➤ Program Penyelenggaraan LLAJ

RENSTRA (2025-2029)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

		standar tingkat pelayanan jalan.	➤ Mengoptimalkan manajemen rekayasa lalu lintas untuk menjaga kelancaran arus dan mengurangi kemacetan. ➤ Memperkuat monitoring dan evaluasi kinerja ruas jalan secara berkala berbasis data lalu lintas.	
		6. Meningkatkan kualitas pengujian kendaraan bermotor secara berkala .	➤ Meningkatkan kualitas jalan, jembatan, dermaga, dan terminal melalui pemeliharaan, rehabilitasi, dan peningkatan kapasitas. ➤ Memperluas jangkauan rute dan frekuensi layanan angkutan untuk mendukung mobilitas masyarakat di wilayah perkotaan, perdesaan, dan daerah perairan. ➤ Menggunakan teknologi dan sistem informasi untuk pemantauan kondisi infrastruktur.	➤ Program Penyelenggaraan LLAJ
		7. Melakukan intensifikasi kegiatan gakum dan manajemen rekayasa lalu lintas guna menurunkan tingkat kecelakaan pasda sector darat dan laut.	➤ Mendorong kolaborasi pendanaan (APBD/APBN/KPS) serta koordinasi lintas sektor dalam pembangunan infrastruktur. ➤ Memperluas jangkauan infrastruktur transportasi untuk membuka akses wilayah dan memperkuat konektivitas antar-kecamatan/kabupaten. ➤ Menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan.	➤ Program Penyelenggaraan LLAJ ➤ Program Pengelolaan Pelayaran

RENSTRA (2025-2029)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

2. Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	2.1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah dan Pengelolaan Resiko Perangkat Daerah	1. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui media teknologi informasi menuju e-government. Pemerintahan.	➤ Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi berbasis e-government. ➤ Mengembangkan sistem layanan digital yang cepat, transparan, dan mudah diakses masyarakat. ➤ Memperkuat integrasi data dan jaringan informasi antar-perangkat daerah untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif.	➤ Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
		2. Meningkatkan kualitas perencanaan, evaluasi dan Pelaporan kinerja OPD secara terukur, relevan, dan selaras dengan tujuan pembangunan daerah.	➤ Penyusunan dokumen perencanaan kinerja (Renstra, RKPD, Renja, PK) yang lebih berkualitas, terukur, dan berbasis hasil (outcome). ➤ Penyempurnaan indikator kinerja utama (IKU/IKD) dan indikator program agar lebih spesifik, terukur, dan dapat dievaluasi. ➤ Peningkatan kualitas pengumpulan data kinerja melalui sistem informasi yang terintegrasi dan akurat. ➤ Optimalisasi pelaksanaan cascading kinerja dari level kepala OPD hingga unit pelaksana.	➤ Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

RENSTRA (2025-2029)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

			➤ Penguatan budaya kinerja melalui monitoring dan evaluasi rutin terhadap capaian program dan kegiatan. ➤ Peningkatan pemanfaatan hasil evaluasi untuk perbaikan kebijakan, perencanaan, dan penganggaran di tahun berikutnya. ➤ Penguatan peran APIP dalam pembinaan, pendampingan, dan revaluasi terhadap pelaksanaan SAKIP di OPD. ➤ Peningkatan kompetensi pegawai melalui pelatihan SAKIP, manajemen kinerja, dan tata kelola pemerintahan berbasis hasil.	
		3. Meningkatkan kualitas dan keprofesionalan aparat Dinas Perhubungan melalui peningkatan kualifikasi pendidikan dan pelatihan Struktural.	➤ Meningkatkan kompetensi dan profesionalitas aparat Dinas Perhubungan melalui peningkatan kualifikasi pendidikan sesuai kebutuhan jabatan. ➤ Mengoptimalkan program pelatihan teknis, fungsional, dan sertifikasi yang relevan dengan tugas pelayanan perhubungan.	➤ Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah



3.4. PRIORITAS PRIORITAS PEMBANGUNAN

Program-program prioritas pembangunan daerah merupakan kumpulan kegiatan strategis yang dirancang untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan.. penyusunan program prioritas dilakukan dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1. Pengembangan Transportasi Darat

- + Pembangunan dan peningkatan kualitas prasarana jalan kabupaten/kota. Melalui ketersediaan rambu lalu lintas
- + Pembangunan halte sungai, terminal, dan fasilitas penunjang transportasi umum.
- + Penataan manajemen rekayasa lalu lintas (MRLL) untuk mengurangi kemacetan. Melalui penyusunan dokumen rencana induk jaringan LLAJ
- + Optimalisasi angkutan umum serta peningkatan aksesibilitas kawasan terpencil. Melalui pengembangan jaringan trayek

2. Pengembangan Transportasi Laut dan Perairan

- + Pembangunan dan rehabilitasi dermaga/halte sungai, pelabuhan rakyat, pelabuhan sungai dan penyeberangan dan fasilitas tambat.
- + Pengembangan moda angkutan sungai, danau, dan penyeberangan (ASDP).
- + Peningkatan keselamatan pelayaran melalui pengawasan dan sertifikasi armada.
- + Digitalisasi layanan kepelabuhanan dan sistem monitoring operasional.

3. Peningkatan Keselamatan Transportasi

- + Pengadaan fasilitas keselamatan (rambu, marka, PJU, APILL).
- + Inspeksi keselamatan berkala pada armada dan sarana transportasi. Melalui pengujian kendaraan bermotor
- + Penyelenggaraan pendidikan dan kampanye keselamatan transportasi. Melalui sosialisasi, Event Keselamatan dan Pembuatan Sarana Prasarana seperti Taman Lalu Lintas
- + Penerapan standar keselamatan sesuai ketentuan nasional.

4. Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Perhubungan

- + Peningkatan nilai SAKIP melalui penguatan perencanaan, monitoring, dan evaluasi.



- + Penyusunan regulasi daerah dan SOP teknis perhubungan.
 - + Pengembangan SDM melalui pendidikan, pelatihan struktural, dan teknis.
 - + Optimalisasi e-government melalui digitalisasi layanan perhubungan.
5. Dukungan Manajemen dan Pelayanan
- + Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi.
 - + Transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan layanan perhubungan.
 - + Penguatan koordinasi lintas sektor dan pemangku kepentingan.
 - + Penyediaan data statistik transportasi untuk perencanaan berbasis evidence.



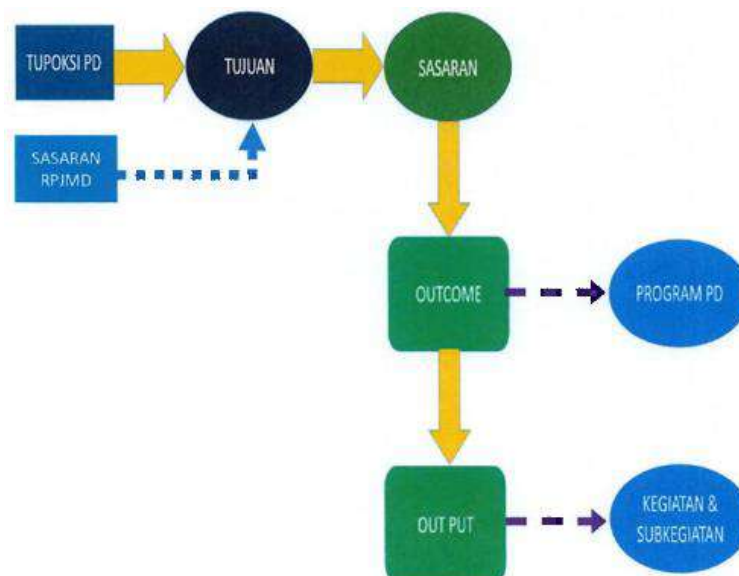
BAB IV

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. KERANGKA PERUMUSAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN

Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar- benar dapat menggambarkan keadaan unjuk kerja organisasi secara riil. Oleh sebab itu, Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada penyusunan program dan kegiatan perlu juga menetapkan indikator kinerja mengacu pada beberapa kriteria antara lain (1) terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah, (2) menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan, (3) memfokuskan pada hal-hal utama, penting dan merupakan prioritas program pembangunan daerah, dan (4) terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah.

Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Dinas Perhubungan





4.2. PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang telah dirumuskan, disusun sejumlah rencana program dan kegiatan disertai dengan rumusan indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif program.

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Tahun 2025-2029 yang selaras dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Terdapat 3 program 31 Kegiatan dan 136 SubKegiatan yang dilaksanakan dalam kurun waktu periode Renstra Perubahan 2025 -2029 sebagaimana Tabel 6.1 Sebagai berikut :

A. Program, Kegiatan dan Subkegiatan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD



- b. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- c. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- g. Penyediaan Bahan/Material
- h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- c. Pengadaan Mebel
- d. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- e. Pengadaan Aset Tetap Lainnya
- f. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya



- g. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- c. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
- d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

1. Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
- b. Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota

2. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :



a. **Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**

b. **Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan**

3. Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C

Sub Kegiatan :

a. Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C

b. Pembangunan Gedung Terminal

c. Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal

d. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)

e. Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C

4. Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir

Sub Kegiatan :

a. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota

5. Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Sub Kegiatan :

a. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

b. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

c. Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor

d. Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor



- e. Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- f. Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji
- g. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

6. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa LaluLintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
- b. Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota
- c. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota

7. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin
- b. Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin
- c. Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin
- d. Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin

8. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan

Sub Kegiatan :

- a. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota

9. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :



- a. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- b. Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota

10. Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota
- b. Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan

11. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

12. Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah

Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

2. PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN



1. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha

Sub Kegiatan :

- a. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

2. Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota

3. Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan



Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota

- b. Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota

4. Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
- b. Penyediaan Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
- c. Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/Kota

5. Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal

Sub Kegiatan:

- a. Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal
- b. Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal



- c. Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal

6. Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau

Sub Kegiatan :

- a. Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau
- b. Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau
- c. Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau

7. Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal

Sub Kegiatan :

- a. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal
- b. Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal
- c. Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal
- d. Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal

8. Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau

Sub Kegiatan :

- a. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau
- b. Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau
- c. Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau



d. Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau

9. Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal

Sub Kegiatan :

- a. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal

10. Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal

Sub Kegiatan :

- a. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal

11. Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal

Sub Kegiatan :

- a. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal



12. Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal

Sub Kegiatan :

- a. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal

4.2 INDIKATOR KINERJA

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan berdasarkan kegiatan dalam setiap programnya.

4.3 URAIAN SUB KEGIATAN BESERTA KINERJA, INDIKATOR, TARGET DAN PAGU INDIKATIF

Perumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 disajikan pada tabel 4.1 berikut:

RENSTRA (2025-2029)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

Tabel 4.2 Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra

Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Batrat

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output Sasaran/ Kegiatan/Subk kegiatan	Indikator Sasaran Prioritas	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah dan Pengelolaan Resiko Perangkat Daerah	Meningkatnya tata kelola, akuntabilitas, dan kinerja perangkat daerah	Tersedianya standar pelayanan, SOP, dan sarpras pelayanan.	Nilai AKIP OPD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana	
				Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah.	Jumlah Indikator SAKIP yang terpenuhi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia	

RENSTRA (2025-2029)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

RENSTRA (2025-2029)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

				Terlaksananya Tata Kelola Administrasi Perkantoran	Menurunnya Jumlah Temuan Administrasi dan Keuangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang/Bulan yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	
				Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	

RENSTRA (2025-2029)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

				Terlaksananya Tata Kelola Administrasi Perkantoran	2.1.3. Menurunnya Jumlah Temuan Administrasi dan Keuangan	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
				Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
				Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terlaksananya Tata Kelola Administrasi Perkantoran	Jumlah Indikator SAKIP yang terpenuhi	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	

RENSTRA (2025-2029)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Yang Tersedia	
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	
				Terlaksananya Tata Kelola Administrasi Perkantoran	2.1.3. Menurunnya Jumlah Temuan Administrasi dan Keuangan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase meningkatnya Administrasi Umum Prangkat Daerah	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	

RENSTRA (2025-2029)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaannya yang Disediakan	

RENSTRA (2025-2029)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Tata Kelola Administrasi Perkantoran	2.1.3. Menurunnya Jumlah Temuan Administrasi dan Keuangan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah OPD yang tersedia	

RENSTRA (2025-2029)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

				Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	
				Tersedianya Mebel		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	
				Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	

RENSTRA (2025-2029)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

				Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	
				Terlaksananya Tata Kelola Administrasi Perkantoran	2.1.3. Menurunnya Jumlah Temuan Administrasi dan Keuangan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jas Penunjang Urusan Yang Tersedia	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	

RENSTRA (2025-2029)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyedi aan Jasa Pelayanan Umu m Kantor yang Disediakan	
				Terlaksananya Tata Kelola Administrasi Perkantoran	2.1.3. Menurunnya Jumlah Temuan Administrasi dan Keuangan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bangunan/kend araan Kantor Kondisi Baik	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	

RENSTRA (2025-2029)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	
				Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	
				Terlaksananya Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi	

RENSTRA (2025-2029)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

Meningkatnya aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat	Terwujudnya Kualitas Pelayanan Dan Konektivitas Transportasi Dari Desa ke Kota Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi.	Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Darat dan Laut	Meningkatnya kualitas layanan transportasi bagi masyarakat.	Terselenggaranya manajemen dan rekayasa lalu lintas darat dan laut secara efektif	Persentase kelengkapan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Tingkat Tertib Lalu Lintas Angkutan Jalan	
				Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan.	1.1.2. Jumlah Mobilitas Orang/Barang Melalui Pelabuhan/Dermaga/Terminal Tahunan	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota yang tersedia	
				Terlaksananya Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	

RENSTRA (2025-2029)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

		Ditetapkannya Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	
		Ditetapkannya dan Tersosialisasinya Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota		2.15.02.2.01.0004 Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	
		Terlaksananya Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota		2.15.02.2.01.0006 Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	

RENSTRA (2025-2029)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

				Terlaksananya Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		2.15.02.2.01.0007 Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Terlaksananya Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	
				Perlengkapan jalan (rambu, marka, APILL, delineator, guardrail) yang terpasang dan berfungsi.	1.2.1. Jumlah Fasilitas Keselamatan dan Perlengkapan Jalan Yang Tersedia	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Yang Tersedia	
				Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	
				Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan		2.15.02.2.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	



				Terselenggaranya operasional terminal secara tertib, aman, dan nyaman.	1.2.1. Jumlah Fasilitas Keselamatan dan Perlengkapan Jalan Yang Tersedia	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	
				Tersusunnya Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C		Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun	
				Terlaksananya pengawasan terminal Penumpang Tipe C		2.15.02.2.03.0006 Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi	
				Terbangunnya Terminal Tipe C yang dilengkapi fasilitas utama dan fasilitas penunjang		2.15.02.2.03.0009 Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	

RENSTRA (2025-2029)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

				Terlaksananya Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)		Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)	
				Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	
				Terlaksana Pemenuhan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe C		Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Ditingkatkan Kapasitasnya	
				Izin penyelenggaraa n dan pembangunan fasilitas parkir yang diterbitkan.	1.2.3. Prediksi Menurunnya Jumlah Angka Kecelakaan Darat dan Laut	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Dokumen Penerbitan Izin Penyelenggaraa n dan Pembangunan Fasilitas Parkir Yang Tersedia	

RENSTRA (2025-2029)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

				Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraa n dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraa n dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

RENSTRA (2025-2029)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Kendaraan bermotor yang telah dilakukan pengujian berkala	1.2.2. Jumlah Kendaraan Yang Memenuhi Laik Angkutan Jalan	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	

RENSTRA (2025-2029)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

				Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah aparatur yang mengikuti diklJumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnyaat struktural	
				Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
				Tersosialisasiny a Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	

RENSTRA (2025-2029)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

				Terlaksananya Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji		Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	
				Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	
				Terlaksananya manajemen dan rekayasa lalu lintas pada ruas/jaringan jalan kabupaten/kota.	1.2.3. Prediksi Menurunnya Jumlah Angka Kecelakaan Darat dan Laut	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan	

RENSTRA (2025-2029)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

				Tertatanya pengaturan dan pola lalu lintas pada jaringan jalan kabupaten/kota		Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
				Terawasinya dan Terkendalinya Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota		Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya identifikasi dan pengawasan terhadap zona selamat sekolah (ZOSS)		2.15.02.2.06.0010 Monitoring dan evaluasi zona selamat sekolah (ZoSS)	Jumlah lokasi Zona Selamat Sekolah (ZoSS) yang diidentifikasi dan diawasi	
				Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)		2.15.02.2.06.0013 Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	

RENSTRA (2025-2029)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

				Terlaksananya Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		2.15.02.2.06.0014 Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		2.15.02.2.06.0015 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
				Dokumen persetujuan hasil Andalalin yang diterbitkan	1.2.3. Prediksi Menurunnya Jumlah Angka Kecelakaan Darat dan Laut	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	

RENSTRA (2025-2029)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

				Terlaksananya penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan	
				Ditetapkannya Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin		2.15.02.2.07.0005 Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin	Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi	
				Terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin		Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	
				Ditetapkannya Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin		2.15.02.2.07.0008 Penetapan Dokumen Teknis Andalalin	Jumlah Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin yang ditetapkan	

RENSTRA (2025-2029)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

				Laporan pelaksanaan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ	1.2.3. Prediksi Menurunnya Jumlah Angka Kecelakaan Darat dan Laut	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	
				Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggara n Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggara n Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Kapasitas Auditor dan Inspektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan		2.15.02.2.08.0008 Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Jumlah Auditor dan Inspektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditingkatkan kapasitasnya	

RENSTRA (2025-2029)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

				Terlaksananya Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor		2.15.02.2.08.0009 Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	
				Tersedianya layanan angkutan umum orang/barang dalam wilayah kabupaten/kota.	1.1.2. Jumlah Mobilitas Orang/Barang Melalui Pelabuhan/Dermaga/Terminal Tahunan	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	

RENSTRA (2025-2029)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

				Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	
				Terkendalinya dan Terawasinya Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	

RENSTRA (2025-2029)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

				Dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek (RUJT) Pedesaan yang ditetapkan	Jumlah Jaringan Trayek Yang Tersedia	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Terciptanya Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota		Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Laporan pelaksanaan penerbitan izin angkutan orang dalam trayek lintas daerah.	1.1.2. Jumlah Mobilitas Orang/Barang Melalui Pelabuhan/Dermaga/Terminal Pertahun	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orangdalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kotadalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penerbitan Izin Penyelenggaraa n Angkutan Orangdalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	

RENSTRA (2025-2029)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

				Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraa n Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraa n Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
--	--	--	--	---	--	---	--	--

RENSTRA (2025-2029)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

				Tarif angkutan perkotaan dan perdesaan yang berlaku dan diumumkan kepada masyarakat.	1.1.2. Jumlah Mobilitas Orang/Barang Melalui Pelabuhan/Dermaga/Terminal Tahun	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

RENSTRA (2025-2029)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

Meningkatnya kesetaraan akses infrastruktur antar wilayah	Terwujudnya Kualitas Pelayanan Dan Konektivitas Transportasi Dari Desa ke Kota Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi.	Meningkatnya Akseibilitas Masyarakat Melalui Ketersediaan Sarana Dan Prasana Taransportasi Darat Dan Laut	Meningkatnya aksesibilitas, kelancaran, dan keterhubungan transportasi antara desa	Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi Darat	Rasio Konektivitas Laut	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Tingkat Pemenuhan Pengelolaan Pelayaran	
				Laporan pelaksanaan penerbitan izin usaha angkutan laut	1.1.2. Jumlah Mobilitas Orang/Barang Melalui Pelabuhan/Dermaga/Terminal Tahunan	2.15.03.2.01 Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota	

RENSTRA (2025-2029)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

					Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
--	--	--	--	--	---	--	---	---	--

RENSTRA (2025-2029)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

				Laporan pelaksanaan penerbitan izin usaha angkutan sungai dan danau.	1.1.2. Jumlah Mobilitas Orang/Barang Melalui Pelabuhan/Dermaga/Terminal Tahun	Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha	Persentase Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha	
--	--	--	--	--	---	---	--	--



				Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	
--	--	--	--	---	--	---	--	--

RENSTRA (2025-2029)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

				Izin pembangunan dan operasional pelabuhan sungai/danau yang diterbitkan.	1.1.2. Jumlah Mobilitas Orang/Barang Melalui Pelabuhan/Dermaga/Terminal Tahunan	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	
--	--	--	--	---	---	---	--	--

RENSTRA (2025-2029)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

				Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan IzinPelabuhan Sungai dan Danau yang MelayaniTrayek dalam 1 Daerah Kabupaten/KotaKewenangan Kabupaten/Kota dalam SistemPelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secaraElektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan IzinPelabuhan Sungai dan Danau yang MelayaniTrayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota dalam SistemPelayana n Perizinan Berusaha	
--	--	--	--	---	--	--	--	--

RENSTRA (2025-2029)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

				Penetapan lintas penyeberangan dalam daerah kabupaten/kota yang telah ditetapkan secara resmi.	1.1.2. Jumlah Mobilitas Orang/Barang Melalui Pelabuhan/Dermaga/Terminal Tahun	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	
--	--	--	--	--	---	---	--	--

RENSTRA (2025-2029)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

				Tersedianya Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota		Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	
--	--	--	--	--	--	---	--	--

RENSTRA (2025-2029)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

				Terkendalinya dan Terawasinya Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota		Pengendalian dan Pengawasan Jaringan LintasPenyeberangan dan Persetujuan PengoperasianKapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yangTerletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kotada n/atau Jaringan Jalur Kereta ApiKabupaten/Kot a dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	
--	--	--	--	---	--	--	---	--

RENSTRA (2025-2029)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

				Penetapan lintas penyeberangan dalam daerah kabupaten/kota.	1.1.2. Jumlah Mobilitas Orang/Barang Melalui Pelabuhan/Dermaga/Terminal Tahun	2.15.03.2.07 Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
--	--	--	--	---	---	---	---	--

RENSTRA (2025-2029)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

				Terkendalinya dan Terawasinya Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan terkendalinya dan terawasinya izin persetujuan pengoperasian untuk angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota		2.15.03.2.06.0004 Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	
--	--	--	--	---	--	---	---	--

RENSTRA (2025-2029)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

				Izin usaha jasa perawatan dan perbaikan kapal yang diterbitkan.	1.1.2. Jumlah Mobilitas Orang/Barang Melalui Pelabuhan/Dermaga/Terminal Tahunan	2.15.03.2.08 Penerbitan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal	Persentase Penerbitan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal	
				Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		2.15.03.2.08.0001 Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	

RENSTRA (2025-2029)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

				Dokumen penetapan tarif angkutan penyeberangan (penumpang & kendaraan) yang telah ditetapkan	1.1.2. Jumlah Mobilitas Orang/Barang Melalui Pelabuhan/Dermaga/Terminal Tahun	Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Penyediaan Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	

RENSTRA (2025-2029)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

				Dokumen Rencana Induk Pelabuhan Pengumpan Lokal yang ditetapkan	1.1.1. Jumlah Halte Sungai Yang Tersedia	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	
				Tersusunnya Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal		Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	

RENSTRA (2025-2029)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

				Dokumen Rencana Induk Pelabuhan Sungai dan Danau yang ditetapkan	1.1.1. Jumlah Halte Sungai Yang Tersedia	Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Persentase Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	
				Tersusunnya Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau		Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau	

RENSTRA (2025-2029)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

				Ditetapkannya Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau		Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Dokumen penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau	
				Terbangunnya Pelabuhan/fasilitas pelabuhan pengumpan lokal sesuai standar teknis.	1.1.1. Jumlah Halte Sungai Yang Tersedia	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	

RENSTRA (2025-2029)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

				Terbangunnya Pelabuhan Pengumpan Lokal		Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun	
				Teroperasinya dan Terpeliharanya Pelabuhan Pengumpan Lokal		Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	
				Terpenuhinya Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan lokal		2.15.03.2.12.0005 Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan loka	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Tersedia	
				Terawasinya Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal		Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	

RENSTRA (2025-2029)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

				Terbangunnya Pelabuhan/fasilitas pelabuhan Sungai dan Danau sesuai standar teknis.	1.1.1. Jumlah Halte Sungai Yang Tersedia	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Persentase Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	
				Terbangunnya Pelabuhan Sungai dan Danau		Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun	
				Teroperasinya dan Terpeliharanya Pelabuhan Sungai dan Danau		Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	
				Meningkatnya Kompetensi Personil bidang Angkutan Sungai dan Danau		2.15.03.2.13.0009 Peningkatan Kompetensi Personil di bidang Angkutan Sungai dan Danau	Jumlah Personil yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi	

RENSTRA (2025-2029)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

				Terawasinya Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan		Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	
				Terlaksananya Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau		Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pembangunan	
				Terlaksananya Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau		Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pelihara	
				Terpenuhinya Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan		Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberanga	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia	

RENSTRA (2025-2029)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

				Izin usaha bagi Badan Usaha Pelabuhan (BUP) di pelabuhan pengumpan lokal yang diterbitkan	1.1.2. Jumlah Mobilitas Orang/Barang Melalui Pelabuhan/Dermaga/Terminal Per Tahun	Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal	
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dilaksanakan	
				Izin pengembangan pelabuhan pengumpan lokal yang diterbitkan	1.1.2. Jumlah Mobilitas Orang/Barang Melalui Pelabuhan/Dermaga/Terminal Per Tahun	Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	

RENSTRA (2025-2029)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	
				Meningkatnya Mobiliyas Orang/Barang Melalui Pelabuhan/Der maga/Terminal Tahun	1.1.2. Jumlah Mobilitas Orang/Barang Melalui Pelabuhan/Der maga/Terminal Tahun	Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal	

RENSTRA (2025-2029)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dilakukan	
				Izin pengembangan pelabuhan pengumpan lokal yang telah diterbitkan.	1.1.2. Jumlah Mobilitas Orang/Barang Melalui Pelabuhan/Dermaga/Terminal Pertahun	2.15.03.2.18 Penerbitan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Penerbitan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal	

RENSTRA (2025-2029)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal		2.15.03.2.18.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal	
				Izin pengelolaan TUKS di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal yang diterbitkan.	1.1.2. Jumlah Mobilitas Orang/Barang Melalui Pelabuhan/Dermaga/Terminal Tahun	Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal	



				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di Dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

Tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Tahun 2025-2030

RENSTRA (2025-2029)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Ket
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana	%	100	100	Rp 6.621.600.000	100	Rp 7.402.600.000	100	Rp 7.688.600.000	100	Rp 7.299.600.000,00	100	Rp 7.475.916.000	100	Rp 7.475.916.000	Dis hub
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia	%	16	16	Rp 49.000.000	16	Rp 49.000.000	16	Rp 49.000.000	16	Rp 49.000.000,00	16	Rp 49.000.000	16	Rp 49.000.000	Dis hub
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	9	9	Rp 27.000.000	9	Rp 27.000.000	9	Rp 27.000.000	9	Rp 27.000.000	9	Rp 27.000.000	9	Rp 27.000.000	Dis hub

RENSTRA (2025-2029)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	4	Rp 12.000.000	4	Rp 12.000.000	4	Rp 12.000.000	4	Rp 12.000.000	4	Rp 12.000.000	4	Rp 12.000.000	Dis hub
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	3	3	Rp 10.000.000	3	Rp 10.000.000	3	Rp 10.000.000	3	Rp 10.000.000	3	Rp 10.000.000	3	Rp 10.000.000	Dis hub
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	100	100 %	Rp 4.305.000.000	100%	Rp 4.305.000.000	100%	Rp 4.305.000.000	100%	Rp 4.305.000.000,00	100%	Rp 4.305.000.000	100%	Rp 4.305.000.000	Dis hub
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang/Bulan yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan/Orang	12/30	12/40	Rp 4.000.000.000	12/40	Rp 4.000.000.000	12/40	Rp 4.000.000.000	12/40	Rp 4.000.000.000	12/40	Rp 4.000.000.000	12/40	Rp 4.000.000.000	Dis hub
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	1	Rp 300.000.000	1	Rp 300.000.000	1	Rp 300.000.000	1	Rp 300.000.000	1	Rp 300.000.000	1	Rp 300.000.000	Dis hub

RENSTRA (2025-2029)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	Dis hub
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%	0	100	Rp 90.000.000	100	Rp 90.000.000	100	Rp 90.000.000	100	Rp 90.000.000,00	100	Rp 90.000.000	100	Rp 90.000.000	Dis hub
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	Dis hub
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Unit	8	7	Rp 80.000.000	7	Rp 80.000.000	7	Rp 80.000.000	7	Rp 80.000.000	7	Rp 80.000.000	7	Rp 80.000.000	Dis hub
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	Dis hub

RENSTRA (2025-2029)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Orang	132	142	Rp 260.000.000	142	Rp 260.000.000	142	Rp 260.000.000	141	Rp 230.000.000,00	142	Rp 260.000.000	142	Rp 260.000.000	Dis hub
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Yang Tersedia	Stel	132	140	Rp 200.000.000	140	Rp 200.000.000	140	Rp 200.000.000	140	Rp 200.000.000	140	Rp 200.000.000	140	Rp 200.000.000	Dis hub
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	0	2	Rp 60.000.000	2	Rp 60.000.000	2	Rp 60.000.000	1	Rp 30.000.000,00	2	Rp 60.000.000	2	Rp 60.000.000	Dis hub
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	1	100 %	Rp 526.600.000	100%	Rp 542.600.000	100%	Rp 563.600.000	100%	Rp 584.600.000,00	100%	Rp 605.600.000	100%	Rp 605.600.000	Dis hub
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	210	210	Rp 50.000.000	210	Rp 6.000.000	210	Rp 7.000.000	210	Rp 8.000.000	210	Rp 9.000.000	210	Rp 9.000.000	Dis hub

RENSTRA (2025-2029)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Pake t	17	4	Rp 70.000.000	4	Rp 75.000.000	4	Rp 80.000.000	4	Rp 85.000.000	5	Rp 90.000.000	5	Rp 90.000.000	Dis hub
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Pake t	1	3	Rp 25.000.000	3	Rp 25.000.000	3	Rp 25.000.000	3	Rp 25.000.000	3	Rp 25.000.000	3	Rp 25.000.000	Dis hub
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota k	600	600	Rp 40.000.000	600	Rp 40.000.000	600	Rp 40.000.000	600	Rp 40.000.000	600	Rp 40.000.000	600	Rp 40.000.000	Dis hub
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Pake t	1	1	Rp 35.000.000	1	Rp 40.000.000	1	Rp 45.000.000	1	Rp 50.000.000	1	Rp 55.000.000	1	Rp 55.000.000	Dis hub
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Doku men	1	1	Rp 6.600.000	1	Rp 6.600.000	1	Rp 6.600.000	1	Rp 6.600.000	1	Rp 6.600.000	1	Rp 6.600.000	Dis hub

RENSTRA (2025-2029)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	Rp 300.000.000	12	Rp 350.000.000	12	Rp 360.000.000	12	Rp 370.000.000	12	Rp 380.000.000	12	Rp 380.000.000	Dis hub
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah OPD yang tersedia	Unit	2	5	Rp 220.000.000	166	Rp 970.000.000	172	Rp 1.220.000.000	177	Rp 855.000.000,00	183	Rp 980.000.000	183	Rp 980.000.000	Dis hub
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	0	0	Rp -	1	Rp 500.000.000	1	Rp 500.000.000	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	Dis hub
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	2	2	Rp 70.000.000	3	Rp 110.000.000	2	Rp 80.000.000	2	Rp 85.000.000	2	Rp 90.000.000	2	Rp 90.000.000	Dis hub
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	0	2	Rp 100.000.000	150	Rp 110.000.000	155	Rp 120.000.000	160	Rp 130.000.000	165	Rp 140.000.000	165	Rp 140.000.000	Dis hub
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1	Rp 50.000.000	10	Rp 100.000.000	11	Rp 120.000.000	12	Rp 140.000.000	13	Rp 150.000.000	13	Rp 150.000.000	Dis hub

RENSTRA (2025-2029)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	Rp -	1	Rp 100.000.000	2	Rp 300.000.000	2	Rp 350.000.000	2	Rp 400.000.000	2	Rp 400.000.000	Dis hub
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	Rp -	1	Rp 50.000.000	1	Rp 100.000.000	1	Rp 150.000.000	1	Rp 200.000.000	1	Rp 200.000.000	Dis hub
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jas Penunjang Urusan Yang Tersedia	Bula n	12	12	Rp 186.000.000	12	Rp 201.000.000	12	Rp 216.000.000	12	Rp 201.000.000,00	12	Rp 201.316.000	12	Rp 201.316.000	Dis hub
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lapo ran	1	1	Rp 6.000.000	1	Rp 6.000.000	1	Rp 6.000.000	1	Rp 6.000.000	1	Rp 1.316.000	1	Rp 1.316.000	Dis hub
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Lapo ran	1	1	Rp 150.000.000	1	Rp 160.000.000	1	Rp 170.000.000	1	Rp 150.000.000	1	Rp 150.000.000	1	Rp 150.000.000	Dis hub

RENSTRA (2025-2029)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah LaporanPenye diaan Jasa PelayananUm um Kantor yangDisediaka n	Lapo ran	1	1	Rp 30.000.000	1	Rp 35.000.000	1	Rp 40.000.000	1	Rp 45.000.000	1	Rp 50.000.000	1	Rp 50.000.000	Dis hub
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bangunan/ke ndaraan Kantor Kondisi Baik	Unit	142	81	Rp 985.000.000	81	Rp 985.000.000	81	Rp 985.000.000	81	Rp 985.000.000	81	Rp 985.000.000	81	Rp 985.000.000	Dis hub
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	0	2	Rp 100.000.000	2	Rp 100.000.000	2	Rp 100.000.000	2	Rp 100.000.000	2	Rp 100.000.000	2	Rp 100.000.000	Dis hub
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	95	32	Rp 500.000.000	32	Rp 500.000.000	32	Rp 500.000.000	32	Rp 500.000.000	32	Rp 500.000.000	32	Rp 500.000.000	Dis hub
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	44	44	Rp 35.000.000	44	Rp 35.000.000	44	Rp 35.000.000	44	Rp 35.000.000	44	Rp 35.000.000	44	Rp 35.000.000	Dis hub

RENSTRA (2025-2029)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	3	Rp 350.000.000	3	Rp 350.000.000	3	Rp 350.000.000	3	Rp 350.000.000	3	Rp 350.000.000	3	Rp 350.000.000	Dis hub
PROGRAM PENYELENGGA RAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase kelengkapan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	60	62	Rp 1.669.000.000	64	Rp 2.451.000.000	66	Rp 3.390.000.000	66	Rp 2.719.000.000	68	Rp 4.088.000.000	70	Rp 4.088.000.000	Dis hub
Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota yang tersedia	Dokumen	0	3	Rp 35.000.000	3	Rp 135.000.000	4	Rp 535.000.000	5	Rp 85.000.000	4	Rp 85.000.000	4	Rp 85.000.000	Dis hub
Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	Rp -	1	Rp 100.000.000	1	Rp 500.000.000	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	Dis hub
Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	2	Rp 50.000.000	1	Rp 50.000.000	1	Rp 50.000.000	Dis hub

RENSTRA (2025-2029)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

2.15.02.2.01.000 4 Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Doku men	0	1	Rp 15.000.000	1	Rp 15.000.000	1	Rp 15.000.000	1	Rp 15.000.000	1	Rp 15.000.000	1	Rp 15.000.000	Dis hub
2.15.02.2.01.000 6 Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Doku men	0	1	Rp 10.000.000	1	Rp 10.000.000	1	Rp 10.000.000	1	Rp 10.000.000	1	Rp 10.000.000	1	Rp 10.000.000	Dis hub
2.15.02.2.01.000 7 Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Terlaksananya Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Doku men	0	1	Rp 10.000.000	1	Rp 10.000.000	1	Rp 10.000.000	1	Rp 10.000.000	1	Rp 10.000.000	1	Rp 10.000.000	Dis hub
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Yang Tersedia	Unit	90	30	Rp 54.000.000	45	Rp 178.000.000	50	Rp 187.000.000	55	Rp 196.000.000	60	Rp 205.000.000	60	Rp 205.000.000	Dis hub
Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit	90	30	Rp 54.000.000	35	Rp 63.000.000	40	Rp 72.000.000	45	Rp 81.000.000	50	Rp 90.000.000	50	Rp 90.000.000	Dis hub

RENSTRA (2025-2029)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

2.15.02.2.02.000 4 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Unit	4	0	Rp -	10	Rp 115.000.000	10	Rp 115.000.000	10	Rp 115.000.000	10	Rp 115.000.000	10	Rp 115.000.000	Dis hub
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	%	0	100 %	Rp 85.000.000	100%	Rp 125.000.000	100%	Rp 125.000.000	100%	Rp 190.000.000	100%	Rp 1.585.000.000	100%	Rp 1.585.000.000	Dis hub
Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun	Doku men	0	1	Rp 10.000.000	1	Rp 10.000.000	1	Rp 50.000.000	1	Rp 75.000.000	1	Rp 10.000.000	1	Rp 10.000.000	Dis hub
2.15.02.2.03.000 6 Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi	Doku men	0	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	Dis hub
2.15.02.2.03.000 9 Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Unit	0	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	1	Rp 1.500.000.000	1	Rp 1.500.000.000	Dis hub
Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembang n	Unit	0	1	Rp 50.000.000	1	Rp 50.000.000	1	Rp 50.000.000	1	Rp 50.000.000	1	Rp 50.000.000	1	Rp 50.000.000	Dis hub

RENSTRA (2025-2029)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	0	2	Rp 20.000.000	2	Rp 20.000.000	2	Rp 20.000.000	2	Rp 20.000.000	2	Rp 20.000.000	2	Rp 20.000.000	Dis hub
Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Oran g	0	0	Rp -	2	Rp 40.000.000	0	Rp -	2	Rp 40.000.000	-	Rp -	-	Rp -	Dis hub
Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Dokumen Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Yang Tersedia	Dok ume n	0	0	Rp -	2	Rp 10.000.000	2	Rp 10.000.000	2	Rp 10.000.000	100%	Rp 10.000.000	100%	Rp 10.000.000	Dis hub
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Doku men	0	-	Rp -	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	Dis hub

RENSTRA (2025-2029)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	0	-	Rp -	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	Dis hub
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	%	0	100	Rp -	100	Rp 228.000.000	100	Rp 728.000.000	100	Rp 238.000.000	100	Rp 238.000.000	100	Rp 238.000.000	Dis hub
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Unit	0	0	Rp -	2	Rp 10.000.000	1	Rp 500.000.000	1	Rp 10.000.000	1	Rp 10.000.000	1	Rp 10.000.000	Dis hub
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah aparaturnya yang mengikuti diklatJumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	0	0	Rp -	2	Rp 40.000.000	2	Rp 40.000.000	2	Rp 40.000.000	2	Rp 40.000.000	2	Rp 40.000.000	Dis hub

RENSTRA (2025-2029)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Set	1000	1000	pentin	2000	Rp 60.000.000	2000	Rp 60.000.000	2000	Rp 60.000.000	2000	Rp 60.000.000	2000	Rp 60.000.000	Dis hub
Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Lapo ran	0	0	Rp -	0	Rp -	1	Rp 10.000.000	1	Rp 10.000.000	1	Rp 10.000.000	1	Rp 10.000.000	Dis hub
Identifikasi dan Analisis Potensi JumlahKendaraa n Bermotor Wajib Uji	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Lapo ran	0	0	Rp -	1	Rp 18.000.000	1	Rp 18.000.000	1	Rp 18.000.000	1	Rp 18.000.000	1	Rp 18.000.000	Dis hub
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Unit	1	0	Rp -	8	Rp 100.000.000	8	Rp 100.000.000	8	Rp 100.000.000	8	Rp 100.000.000	8	Rp 100.000.000	Dis hub
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan	%	0	100	Rp 1.050.000.000	100	Rp 1.210.000.000	100	Rp 1.260.000.000	100	Rp 1.450.000.000	100	Rp 1.460.000.000	100	Rp 1.460.000.000	Dis hub

RENSTRA (2025-2029)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	0	0	Rp -	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	Dis hub
Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	12	12	Rp 1.050.000.000	12	Rp 1.100.000.000	12	Rp 1.200.000.000	12	Rp 1.300.000.000	12	Rp 1.400.000.000	12	Rp 1.400.000.000	Dis hub
2.15.02.2.06.001 0 Monitoring dan evaluasi zona selamat sekolah (ZoSS)	Jumlah lokasi Zona Selamat Sekolah (ZoSS) yang diidentifikasi dan diawasi	Laporan	0	0	Rp -	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	Dis hub
2.15.02.2.06.001 3 Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Unit	0	0	Rp -	1	Rp 75.000.000	0	Rp -	1	Rp 90.000.000	0	Rp -	0	Rp -	Dis hub
2.15.02.2.06.001 4 Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	Rp -	0	Rp -	1	Rp 25.000.000	1	Rp 25.000.000	1	Rp 25.000.000	1	Rp 25.000.000	Dis hub

RENSTRA (2025-2029)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

2.15.02.2.06.001 5 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	0	0	Rp -	1	Rp 25.000.000	1	Rp 25.000.000	1	Rp 25.000.000	1	Rp 25.000.000	1	Rp 25.000.000	Dis hub
Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	%	0	100	Rp -	100	Rp 60.000.000	100	Rp 60.000.000	100	Rp 20.000.000	100	Rp 10.000.000	100	Rp 10.000.000	Dis hub
Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan	Dokumen	0	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	1	Rp 20.000.000	0	Rp -	0	Rp -	Dis hub
2.15.02.2.07.000 5 Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin	Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi	Orang	0	0	Rp -	2	Rp 60.000.000	2	Rp 60.000.000	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	Dis hub
Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	Laporan	0	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	Dis hub
2.15.02.2.07.000 8 Penetapan Dokumen Teknis Andalalin	Jumlah Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin yang ditetapkan	Dokumen	0	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	Dis hub

RENSTRA (2025-2029)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	%	0	100	Rp 90.000.000	100	Rp 80.000.000	100	Rp 90.000.000	100	Rp 80.000.000	100	Rp 90.000.000	100	Rp 90.000.000	Dis hub
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Laporan	0	3	Rp 75.000.000	3	Rp 75.000.000	3	Rp 75.000.000	3	Rp 75.000.000	3	Rp 75.000.000	3	Rp 75.000.000	Dis hub
2.15.02.2.08.000 8 Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Jumlah Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang	0	1	Rp 10.000.000	0	Rp -	1	Rp 10.000.000	0	Rp -	1	Rp 10.000.000	1	Rp 10.000.000	Dis hub
2.15.02.2.08.000 9 Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	0	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	Dis hub

RENSTRA (2025-2029)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	%	0	100	Rp 350.000.000	100	Rp 400.000.000	100	Rp 370.000.000	100	Rp 420.000.000	100	Rp 390.000.000	100	Rp 390.000.000	Dis hub
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	0	0	Rp -	1	Rp 40.000.000	0	Rp -	1	Rp 40.000.000	0	Rp -	0	Rp -	Dis hub
Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	6	6	Rp 350.000.000	6	Rp 360.000.000	6	Rp 370.000.000	6	Rp 380.000.000	6	Rp 390.000.000	6	Rp 390.000.000	Dis hub

RENSTRA (2025-2029)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	%	0	100	Rp 5.000.000	0	Rp -	0	Rp -	100	Rp 5.000.000	100	Rp 5.000.000	100	Rp 5.000.000	Dis hub
Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Doku men	0	1	Rp 5.000.000	0	Rp -	0	Rp -	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	Dis hub
Penerbitan Izin Penyelenggara n Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penerbitan Izin Penyelenggara an Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	%	0	0	Rp -	100	Rp 15.000.000	100	Rp 15.000.000	100	Rp 15.000.000	0	Rp -	0	Rp -	Dis hub

RENSTRA (2025-2029)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Laporan	0	0	Rp -	1	Rp 15.000.000	1	Rp 15.000.000	1	Rp 15.000.000	0	Rp -	0	Rp -	Dis hub
Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	Rp -	1	Rp 10.000.000	1	Rp 10.000.000	1	Rp 10.000.000	1	Rp 10.000.000	1	Rp 10.000.000	Dis hub

RENSTRA (2025-2029)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	Rp -	1	Rp 10.000.000	1	Rp 10.000.000	1	Rp 10.000.000	1	Rp 10.000.000	1	Rp 10.000.000	Dis hub
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Rasio Konektivitas Laut	%	47	50	Rp 6.885.000.000	55	Rp 12.730.000.000	60	Rp 15.530.000.000	65	Rp 16.535.000.000	70	Rp 13.205.000.000	75	Rp 13.205.000.000	Dis hub
2.15.03.2.01 Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota	%	0	0	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	Dis hub

RENSTRA (2025-2029)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

2.15.03.2.02 Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Doku men	0	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	Dis hub
Penerbitan Izin Usaha Penyelenggara Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha	Persentase Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha	%	0	0	Rp -	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	Dis hub

RENSTRA (2025-2029)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	Dokumen	0	0	Rp -	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	Dis hub
Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	%	0	0	Rp -	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	Dis hub

RENSTRA (2025-2029)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan IzinPelabuhan Sungai dan Danau yang MelayaniTrayek dalam 1 Daerah Kabupaten/KotaKewenangan Kabupaten/Kota dalam SistemPelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secaraElektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan IzinPelabuhan Sungai dan Danau yang MelayaniTrayek dalam 1 Daerah Kabupaten/KotaKewenangan Kabupaten/Kota dalam SistemPelayanan Perizinan Berusaha	Dokumen	0	0	Rp -	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	Dis hub
Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	%	0	0	Rp 1.190.000.000	1	Rp 1.295.000.000	1	Rp 1.395.000.000	1	Rp 1.495.000.000	1	Rp 1.595.000.000	1	Rp 1.595.000.000	Dis hub

RENSTRA (2025-2029)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	Rp -	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	Dis hub
--	---	---------	---	---	------	---	--------------	---	--------------	---	--------------	---	--------------	---	--------------	---------

RENSTRA (2025-2029)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	12	12	Rp 1.190.000.000	12	Rp 1.290.000.000	12	Rp 1.390.000.000	12	Rp 1.490.000.000	12	Rp 1.590.000.000	12	Rp 1.590.000.000	1
2.15.03.2.07 Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	%	0	0	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	Dis hub

RENSTRA (2025-2029)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

2.15.03.2.06.000 4 Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	0	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	Dis hub
2.15.03.2.08 Penerbitan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal	Persentase Penerbitan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal	%	0	0	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	Dis hub

RENSTRA (2025-2029)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

2.15.03.2.08.000 1 Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dok	0	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	Dis hub
Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Tarif Angkutan Penyeberang an Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberang an dalam Daerah Kabupaten/K ota	%	0	0	Rp -	1	Rp 5.000.000	1	Rp -	1	Rp 5.000.000	1	Rp -	1	Rp -	Dis hub

RENSTRA (2025-2029)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

Penyediaan Data dan Informasi Tarif AngkutanPenyeb erangan Penumpang Kelas Ekonomi danKendaraan beserta Muatannya pada LintasPenyebera ngan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberanga n Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberanga n dalam Daerah Kabupaten/Kot a	Doku men	0	0	Rp -	1	Rp 5.000.000	0	Rp -	0	Rp 5.000.000	0	Rp -	0	Rp -	Dis hub
Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daera h Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	%	0	0	Rp -	1	Rp 1.500.000.000	1	Rp 300.000.000	1	Rp -	1	Rp -	1	Rp -	Dis hub
Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daera h Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Doku men	0	0	Rp -	1	Rp 1.500.000.000	1	Rp 300.000.000	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	Dis hub

RENSTRA (2025-2029)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Persentase Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	%	0	0	Rp 450.000.000	1	Rp 750.000.000	1	Rp 225.000.000	1	Rp 225.000.000	1	Rp 200.000.000	1	Rp 200.000.000	Dis hub
Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau	Doku men	0	3	Rp 450.000.000	3	Rp 750.000.000	2	Rp 200.000.000	2	Rp 200.000.000	2	Rp 200.000.000	2	Rp 200.000.000	Dis hub
Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Dokumen penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau	Doku men	0	0	Rp -	0	Rp -	2	Rp 25.000.000	2	Rp 25.000.000	0	Rp -	0	Rp -	Dis hub

RENSTRA (2025-2029)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	%	0	100	Rp 760.000.000	100	Rp 3.810.000.000	100	Rp 4.360.000.000	100	Rp 4.710.000.000	100	Rp 4.960.000.000	100	Rp 4.960.000.000	Dis hub
Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun	Unit	0	0	Rp -	1	Rp 3.000.000.000	1	Rp 3.500.000.000	1	Rp 3.800.000.000	1	Rp 4.000.000.000	1	Rp 4.000.000.000	Dis hub
Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	Laporan	0	1	Rp 200.000.000	1	Rp 250.000.000	1	Rp 300.000.000	1	Rp 350.000.000	1	Rp 400.000.000	1	Rp 400.000.000	Dis hub
2.15.03.2.12.000 5 Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan loka	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Tersedia	Laporan	0	1	Rp 500.000.000	1	Rp 500.000.000	1	Rp 500.000.000	1	Rp 500.000.000	1	Rp 500.000.000	1	Rp 500.000.000	Dis hub
Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Laporan	0	1	Rp 60.000.000	1	Rp 60.000.000	1	Rp 60.000.000	1	Rp 60.000.000	1	Rp 60.000.000	1	Rp 60.000.000	Dis hub

RENSTRA (2025-2029)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Persentase Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	%	0	100	Rp 4.470.000.000	100	Rp 5.270.000.000	100	Rp 9.150.000.000	100	Rp 10.000.000.000	100	Rp 6.350.000.000	100	Rp 6.350.000.000	Dis hub
Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun	Unit	0	0	Rp -	0	Rp -	1	Rp 3.500.000.000	1	Rp 4.000.000.000	0	Rp -	0	Rp -	Dis hub
Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	Unit	2	1	Rp 500.000.000	1	Rp 600.000.000	1	Rp 700.000.000	1	Rp 800.000.000	1	Rp 900.000.000	1	Rp 900.000.000	Dis hub
2.15.03.2.13.000 9 Peningkatan Kompetensi Personil di bidang Angkutan Sungai dan Danau	Jumlah Personil yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi	Orang	0	0	Rp -	0	Rp -	2	Rp 30.000.000	2	Rp 30.000.000	2	Rp 30.000.000	2	Rp 30.000.000	Dis hub
Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Laporan	1	1	Rp 70.000.000	1	Rp 70.000.000	1	Rp 70.000.000	1	Rp 70.000.000	1	Rp 70.000.000	1	Rp 70.000.000	Dis hub
Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pembangunan	Unit	4	1	Rp 3.000.000.000	1	Rp 3.500.000.000	1	Rp 3.600.000.000	1	Rp 3.700.000.000	1	Rp 3.800.000.000	1	Rp 3.800.000.000	Dis hub

RENSTRA (2025-2029)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pelihara	Unit	6	3	Rp 400.000.000	3	Rp 500.000.000	3	Rp 550.000.000	3	Rp 600.000.000	3	Rp 650.000.000	3	Rp 650.000.000	Dis hub
Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberanga	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberanga n yang Tersedia	Unit	0	1	Rp 500.000.000	1	Rp 600.000.000	1	Rp 700.000.000	1	Rp 800.000.000	1	Rp 900.000.000	1	Rp 900.000.000	Dis hub
Penerbitan Izin Usaha untuk Badan UsahaPelabuha n di Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Penerbitan Izin Usaha untuk Badan UsahaPelabu han di Pelabuhan Pengumpan Lokal	%	0	0	Rp -	100	Rp 15.000.000	100	Rp 15.000.000	100	Rp 15.000.000	100	Rp 15.000.000	100	Rp 15.000.000	Dis hub
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dilaksanakan	Lapo ran	0	0	Rp -	1	Rp 15.000.000	1	Rp 15.000.000	1	Rp 15.000.000	1	Rp 15.000.000	1	Rp 15.000.000	Dis hub

RENSTRA (2025-2029)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	%	0	0	Rp -	100	Rp 15.000.000	100	Rp 15.000.000	100	Rp 15.000.000	100	Rp 15.000.000	100	Rp 15.000.000	Dis hub
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	Laporan	0	0	Rp -	1	Rp 15.000.000	1	Rp 15.000.000	1	Rp 15.000.000	1	Rp 15.000.000	1	Rp 15.000.000	Dis hub
Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal	%	0	0	Rp -	100	Rp 15.000.000	100	Rp 15.000.000	100	Rp 15.000.000	100	Rp 15.000.000	100	Rp 15.000.000	Dis hub

RENSTRA (2025-2029)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dilakukan	Laporan	0	0	Rp -	1	Rp 15.000.000	1	Rp 15.000.000	1	Rp 15.000.000	1	Rp 15.000.000	1	Rp 15.000.000	Dis hub
2.15.03.2.18 Penerbitan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Penerbitan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal	%	0	0	Rp -	100	Rp 15.000.000	100	Rp 15.000.000	100	Rp 15.000.000	100	Rp 15.000.000	100	Rp 15.000.000	Dis hub
2.15.03.2.18.000 2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Laporan	0	0	Rp -	1	Rp 15.000.000	1	Rp 15.000.000	1	Rp 15.000.000	1	Rp 15.000.000	1	Rp 15.000.000	Dis hub

RENSTRA (2025-2029)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal	%	0	0	Rp -	100	Rp 15.000.000	100	Rp 15.000.000	100	Rp 15.000.000	100	Rp 15.000.000	100	Rp 15.000.000	Dis hub
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di Dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal	Laporan	0	0	Rp -	1	Rp 15.000.000	1	Rp 15.000.000	1	Rp 15.000.000	1	Rp 15.000.000	1	Rp 15.000.000	Dis hub
					Rp 15.175.600.000		Rp 22.583.600.000		Rp 26.608.600.000		Rp 26.553.600.000		Rp 24.768.916.000		Rp 24.768.916.000	



4.4 URAIAN SUB KEGIATAN DALAM RANGKA Mendukung PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Pada dasarnya kinerja organisasi perangkat daerah dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Pencapaian kinerja organisasi harus ditetapkan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian Program prioritas pembangunan daerah. Secara terperinci, sub kegiatan yang mendukung program prioritas tersebut antara lain:

Tabel 4. 2 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kualitas pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan publik	2.15.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			2.15.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			2.15.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
			2.15.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

RENSTRA (2025-2029)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

			2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			2.15.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
2	Program Penyelenggaraan LLAJ	Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ	
			2.15.02.2.01.0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ	
			2.15.02.2.01.0002 Penetapan Kebijakan Dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ	
			2.15.02.2.01.0005 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan LLAJ	
			2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan	
			2.15.02.2.02.0002 Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
			2.15.02.2.02.0004 Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
			2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	
			2.15.02.2.03.0009 Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C Yang Dilengkapi Fasilitas Pendukung dan Penunjang	
			2.15.02.2.03.0011 rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C	
			2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	

RENSTRA (2025-2029)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

			2.15.02.2.05.0001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
			2.15.02.2.05.0004 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
			2.15.02.2.05.0007 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor	
			2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan	
			2.15.02.2.06.0004 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	
			2.15.02.2.06.0013 Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOOS)	
			2.15.02.2.06.0015 Forum LLAJ	
			2.15.02.2.06.0017 Penataan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
			2.15.02.2.07 Persetujuan Hasil ANDALALIN untuk Jalan Kabupaten/Kota	
			2.15.02.2.07.0006 Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	
			2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum Untuk Hasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 Kabupaten/Kota	
			2.15.02.2.09.0002 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum Untuk Jasa	

RENSTRA (2025-2029)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

			Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam Kabupaten/Kota	
			2.15.02.2.09.0003 Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutabn Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 Kabupaten/kota	
			2.15.02.2.12 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perdesaan Dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	
			2.15.02.2.12.0001 Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jarngan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	
3	Program Pengelolaan Pelayaran	Jumlah Pelabuhan/Dermaga Sungai dan Danau Yang Dibangun dan Dipelihara	2.15.03.2.04 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau Yang Melayani Trayek Dalam 1 Daerah Kab/Kota	
			2.15.03.2.04.0001 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau Yang Melayani Trayek Dalam 1 Kabupaten/Kota Sistem pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
			2.15.03.2.06 Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			2.15.03.2.06.0004 Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	

RENSTRA (2025-2029)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

			2.15.03.2.10 Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP Untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	
			2.15.03.2.10.0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan DLKR/DLKP Pelabuhan Pengompan Lokal	
			2.15.03.2.11 Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP Untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	
			2.15.03.2.11.0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk DLKR/DLKP Untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	
			2.15.03.2.12 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	
			2.15.03.2.12.0002 Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	
			2.15.03.2.12.0003 Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	
			2.15.03.2.13 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	
			2.15.03.2.13.0002 Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	
			2.15.03.2.13.0003 Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	
			2.15.03.2.13.0006 Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau	
			2.15.03.2.13.0007 Pengoperasian dan Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau	

RENSTRA (2025-2029)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

			2.15.03.2.13.0008 Fasilitas Peningkatan Kompetensi Personil di Bidang Pengoperasian & Pemeliharaan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	
			2.15.03.2.13.0010 Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	
			2.15.03.2.13.0011 Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	



4.5 TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERHUBUNGAN

Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan perhubungan di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2025-2029, diperlukan indikator kinerja utama (IKU) Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai pedoman dalam pencapaian kinerja pemerintah, IKU Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat antara lain:

Tabel 4.5 Relevansi Tujuan Sasaran dan IKU Dinas Perhubungan

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Sumber Data	Penanggung Jawab
1.	Terwujudnya Konektivitas dan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan, Angkutan Sungai dan Angkutan Penyeberangan	1. Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat Melalui Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Transportasi Darat Dan Laut	Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota	$(Ik1 \times \text{Bobot Angkutan Jalan}) + Ik2 \times (\text{Bobot angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan})$	LPPD	Bidang Prasarana dan Keselamatan
			Jumlah Halte Sungai Yang Dibangun	Jumlah Halte Sungai Yang Terbangun Tahun-n	Dokumentasi Halte Sungai Yang Dibangun/Yang Sudah Dihilahkan	Bidang Prasarana dan Keselamatan

RENSTRA (2025-2029)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

			Jumlah Mobilitas Orang/Barang Melalui Pelabuhan/Dermaga/Terminal Tahunan	Jumlah orang/barang yang Terangkut angkutan umum	Laporan Kegiatan Operasional Bulanan	Bidang Lalu Lintas dan Angkutam
		2. Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Darat dan Laut	Jumlah Fasilitas Keselamatan dan Perlengkapan Jalan Yan Tersedia	Jumlah Rambu Yang Terpasang Pada Titik Rawan Kecelakaan	Laporan Pekerjaan Pemasangan Rambu Rambu Lalu Lintas	Bidang Prasarana dan Keselamatan
			Angka Lalu lintas Harian Rata-Rata Tahunan (LHRT) Ruas Jalan	Pengukuran Kapasitas Jalan Rawan Kecelakaan Yang Memenuhi Tingkat Pelayanan Baik	• Survey dan Dokumen V/C Ratio	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan
			Jumlah Kendaraan Yang Memenuhi Laik Angkutan Jalan	Jumlah Kendaraan Yang Telah Melakukan Uji Kelaikan Kendaraan Bermotor	Data Pengujian Kendaraan Bermotor UPKB	Unit Pengujian Kendaraan Bermotor
			Prediksi Menurunnya Jumlah Angka Kecelakaan Darat dan Laut	Jumlah Kasus Kecelakaan Yang Terjadi Tahun-N	Data Kejadian Kecelakaan Satlantas Polres Tanjab Barat	Bidang Prasarana dan Keselamatan
2	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah dan Pengelolaan Resiko Perangkat Daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat	Bagian Organisasi Setda	Bidang Sekretariat

RENSTRA (2025-2029)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

			Nilai AKIP OPD	Matriks Penilaian AKIP OPD	Inspektorat	Bidang Sekretariat
			Menurunnya Jumlah Temuan Administrasi dan Keuangan	Jumlah Temuan OPD Tahun-n	Inspektorat BPK RI	Bidang Sekretariat

Rumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Tahun 2025-2030

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Sasaran						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota	Angka	57,5%	58,6%	59,7%	60%	61%	61%	
2.	Jumlah Halte Sungai Yang Dibangun	Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	
3.	Jumlah Mobilitas Orang/Barang Melalui Pelabuhan/Dermaga/Terminal Pertahun	Orang/ Ton	220.000 Orang/20. 500 Ton	221.000 Orang /21.000 Ton	221.500 Orang /21.500 Ton	222.000 Orang /22.000 Ton	222.500 Orang /22.500 Ton	223.000 Orang /23.000 Ton	
4.	Jumlah Fasilitas Keselamatan dan Perlengkapan Jalan Yang Tersedia	Unit	35 Unit	40 Unit	45 Unit	50 Unit	55 Unit	55 Unit	

RENSTRA (2025-2029)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

5.	Angka Lalu lintas Harian Rata-Rata Tahunan (LHRT) Ruas Jalan	Rasio	(0,30-0,44) B	(0,30-0,44) B	(0,30-0,44) B	((0,30-0,44) B	(0,30-0,44) B	(0,30-0,44) B	
6.	Jumlah Kendaraan Yang Memenuhi Laik Angkutan Jalan	Unit	1700 Unit	1750 Unit	1800 Unit	1850 Unit	1900 Unit	1950 Unit	
7.	Angka Kecelakaan Lalu Lintas Darat dan Laut	Kasus	130 Kasus	125 Kasus	120 Kasus	110 Kasus	100 Kasus	90 Kasus	
8.	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Angka	80	82	84	86	88	88	

4.6. TARGET KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

Disamping Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan yang mendukung langsung pencapaian kinerja Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati tahun 2025- 2029, terdapat Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang merupakan indikator kinerja yang selaras dengan indikator kinerja pada level Provinsi Jambi dan Pemerintah Pusat. IKK yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah:



Tabel 4.6 Rumusan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perhubungan Tahun 2025-2030

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Sasaran						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	Orang	220.000	221.000	221.500	222.000	222.500	223.000	
2.	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	Unit	1700	1750	1800	1850	1900	1950	
3.	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal	Unit	2	2	2	2	2	2	
4.	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	%	75	80	85	90	95	95	
5.	Pemasangan rambu rambu	Unit	30	35	40	45	50	50	
6.	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Unit/KM	120	125	130	135	140	145	
7.	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum	Orang	220.000	221.000	221.500	222.000	222.500	223.000	
		Ton	20.500	21.000	21.500	22.000	22.500	23.000	
8.	Jumlah orang melalui dermaga/bandara/ terminal pertahun	Orang	292.100	292.200	292.300	292.400	292.500	292.600	
		Ton	20.500	21.000	21.500	22.000	22.500	23.000	



BAB VIII PENUTUP

Untuk mewujudkan terciptanya visi dan misi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka dilakukan Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2025-2029, yang mengacu pada indikator Kinerja Program dan Kegiatan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029.

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah mengakomodir berbagai kepentingan masyarakat, mewadahi Rencana Strategis Kementerian Perhubungan 2020-2024, perubahan lingkungan strategis, perubahan kebijakan nasional serta menjadi cerminan dari perencanaan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam pencapaian target pembangunan jangka menengah. Di lain pihak, Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menggunakan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial serta bersifat logis, dinamis dan fleksibel agar berdaya guna dan berhasil guna. Target indikator, fokus dan lokus dalam renstra menyesuaikan dengan dinamika perubahan global, nasional dan regional serta ketersediaan anggaran berdasarkan pada kemampuan keuangan daerah;

Adapun kaidah-kaidah penyusunan renstra adalah :

- a. Bappeda telah melakukan proses teknokratis untuk menghasilkan rancangan teknokratis RPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Selanjutnya disusun rancangan awal RPD Tanjung Jabung Barat mengacu kepada RPJPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2025 – 2045.
- b. Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyusun Rancangan Awal Renstra PD dengan mempertimbangkan masukan dari Stakeholders terkait dan menyelenggarakan Forum PD untuk mendapatkan masukan penyempurnaan Rancangan Awal Perubahan Renstra PD;
- c. Bappeda melakukan proses finalisasi RPD 2025 – 2029 melalui Forum Musrenbang.

Tindak lanjut dari Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 adalah dijadikan pedoman dalam

- a. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- b. Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

RENSTRA (2025-2029)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

- c. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota serta dengan provinsi yang berbatasan.
- d. Monitoring dan evaluasi pasca penyusunan Renstra.

Kuala Tungkal, Februari 2026

Penanggung Jawab
Plt. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN



AGUS SUMANTO S.H., M.H

Pembina / Iya

NIP. 19870811 201101 1 001

Kinerja Urusan
Sub Urusan

Kinerja
Taktikal

Kinerja
Operasional

ISU STRATEGIS :
Belum optimalnya pelayanan dan konektivitas transportasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah

Terwujudnya Kualitas Pelayanan Dan Konektivitas Transportasi Dari Desa ke Kota Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi.

IK TUJUAN : Rasio Konektivitas

IK : Persentase Kinerja Lalu Lintas Angkutan

SASARAN I Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat Melalui Ketersediaan Sarana Dan Prasana Taransportasi Darat Dan Laut

SASARAN II : Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Darat dan Laut

IK : Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota

IK : Jumlah Halte Sungai Kondisi Baik

IK : Jumlah Mobilitas Orang/Barang Melalui Pelabuhan/Dermaga/Terminal Tahunan

IK : Jumlah Fasilitas Keselamatan dan Perlengkapan Jalan Yang Tersedia

IK : Angka Lalu lintas Harian Rata-Rata Tahunan (LHRT) Ruas Jalan

IK : Jumlah Kendaraan Yang Memenuhi Standar Laik Jalan

IK : Angka Kecelakaan Lalu Lintas Darat dan Laut

Meningkatnya Kemudahan Perpindahan Antarmoda Transportasi

Meningkatnya Pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan, Sungai dan Dermaga/Halte Sungai

Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang aman dan berkualitas

Meningkatnya Tertib Lalu Lintas

Meningkatnya Kelancaran Transportasi

Meningkatnya Kepatuhan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat dan Laut

IK : Persentase Jalan Kondisi Baik

IK : Persentase Kemudahan Akses

IK : Jumlah Halte Sungai Yang Dibangun dan Dipelihara

IK : Jumlah Angkutan Penumpang Yang Disediakan/Dipelihara

IK : Persentase peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana transportasi

IK : Jumlah fasilitas keselamatan jalan sesuai standar teknis di lokasi rawan kecelakaan dan titik strategis

IK : rasio volume kendaraan terhadap kapasitas jalan (V/C Ratio)

IK : Jumlah Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

IK : Persentase Penurunan Jumlah Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Darat dan Laut

Melaksanakan Monitoring dan evaluasi Implementasi Batas Kecepatan

Melakukan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Melaksanakan Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP Ungtk Pelabuhan Sungau

Menyediakan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang

Melaksanakan Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang

Menyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

Melakukan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota

Melakukan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Melakukan Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Keselamatan LLAJ

IK : Survey Batas Kecepatan Pada Ruas Jalan Tertentu

IK : Persentase Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

IK : Jumlah Dokumen Perencanaan Halte Sungai Yang Disusun

IK : Jumlah Angkutan penumpang Yang Disediakan

IK : Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang

IK : Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Yang Tersedia

IK : Jumlah Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota

IK : Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

IK : Jumlah Dokumen Rencana Aksi Keselamatan LLAJ

Melaksanakan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan

Melaksanakan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota

Melaksanakan Pembangunan Halte Sungai

Melakukan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Melakukan Penyelenggaraan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas

Melakukan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

Melakukan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji

Melakukan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan

IK : Jumlah Panjang Jalan Yang Dibangun/Dipelihara

IK : Jumlah Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Yang Disusun

IK : Jumlah Halte Sungai Yang Dibangun

IK : Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia

IK : Jumlah Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas

IK : Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

IK : Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji

IK : Jumlah Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan

CrossCutting OPD

Dinas Pekerjaan Umum

Crosscutting KEMEN HUB RI

Melaksanakan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum

Melaksanakan Pemeliharaan Halte Sungai

Melakukan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Melakukan Penyelenggaraan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas

Melakukan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota

Melakukan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Melakukan Penataan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas

IK : On Time Performance

IK : Jumlah Halte Sungai Yang Dipelihara

IK : Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia

IK : Jumlah Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas

IK : Persentase Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota

IK : Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

IK : Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Kuala Tungkal, Januari 2026

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TANJUNGPABUNG BARAT

AGUS SUMANTRI S.H., M.H

Pembina

NIP. 198708112011011001

NO	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR TUJUAN	TARGET TAHUN 2026
1	1. Terwujudnya Kualitas Pelayanan Dan Konektivitas Transportasi Dari Desa ke Kota Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi.	1. Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota	58,6%
		2. Jumlah Halte Sungai Yang Dibangun	2 Unit
		3. Jumlah Mobilitas Orang/Barang Melalui Pelabuhan/Dermaga/ Terminal Pertahun	221.000 Orang/ 21.000 Ton
		1. Jumlah Fasilitas Keselamatan dan Perlengkapan Jalan Yang Tersedia	40 Unit
		2. . Angka Lalu lintas Harian Rata-Rata Tahunan (LHRT) Ruas Jalan	Rasio B (0,33-0,44)
		3. Jumlah Kendaraan Yang Memenuhi Laik Angkutan Jalan	1.750 Unit
		4. Prediksi Menurunnya Jumlah Angka Kecelakaan Darat dan Laut	125 Kasus
3	2. Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	5. Indeks Kepuasan Masyarakat	82
		6. Nilai SAKIP Opd	83 (A)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET AKHIR PRIODE (2030)					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	1.1. Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat Melalui Tersedianya Sarana Dan Prasarana Transportasi Darat Dan Laut	1. Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota	57,5%	58,6%	59,7%	60%	61%	61%
		2. Jumlah Hale Sungai Yang Dibangun	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit
		3. Jumlah Mobilitas Orang/Barang Melalui Pelabuhan/Dermaga/ Terminal Perintah	220.0000 rang/ 20.500 Ton	221.000 Orang/ 21.000 Ton	221.500 Orang/ 22.500 Ton	222.500 Orang/ 23.000 Ton	223.000 Orang/ 23.500 Ton	223.000 Orang/ 24.000 Ton
	1.2. Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Darat dan Laut	1. Jumlah Fasilitas Keselamatan dan Perlengkapan Jalan Yang Tersedia	35 Unit	40 Unit	45 Unit	50 unit	55 unit	55 Unit
		2. Angka Lalu lintas Harian Rata-Rata Tahunan (LHRT) Ruas Jalan	(0,33-0,44) B	(0,33-0,44) B	(0,33-0,44) B	(0,33-0,44) B	(0,33-0,44) B	(0,33-0,44) B
		3. Jumlah Kendaraan Yang Memenuhi Laik Angkutan Jalan	1.700 Unit	1.750 Unit	1.800 Unit	1.850 Unit	1.900 Unit	1.950 Unit
2	2.1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah dan Pengelolaan Resiko Perangkat Daerah	4. Prediksi Menurunnya Jumlah Angka Kecelakaan Darat dan Laut	130 Kasus	125 Kasus	120 Kasus	110 Kasus	100 Kasus	90 Kasus
		1. Indeks Kepuasan Masyarakat	80	82	84	86	88	88
		2. Nilai SAKIP Opd	80,01 (A)	83 (A)	87 (A)	90 (A)	92 (A)	92 (A)

Program Pendukung	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sasaran Kegiatan	2.1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah dan Pengelolaan Resiko Perangkat Daerah
Indikator Program	Nilai SAKIP OPD
	Indeks Kepuasan Masyarakat
Target Program	83 (A)
	82

Program		Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)	
Sasaran Program		Tingkat Tertib Lalu Lintas Angkutan Jalan	
Indikator Program		Persentase kelengkapan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	
Target Program		64%	
Kegiatan	: Pengujian Kendaraan Bermotor	Kegiatan	: Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Tertib Laik Angkutan Jalan	Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Keamanan, Kenyamanan dan Keselamatan LLAJ
Indikator kegiatan	Persentase Pengujian Kendaraan Bermotor	Indikator kegiatan	Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kab/Kota
Target Kegiatan	: 100 %	Target Kegiatan	: 100 %
Sub Kegiatan	: Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Sub Kegiatan	: Pengawasan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Jalan Untuk Jalan Kabupaten/ Kota
Sasaran Sub Kegiatan	Terlaksananya Cetak Buku Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Sasaran Sub Kegiatan	Terawasnya dan Terkendalnya Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota
Indikator Sub kegiatan	Jumlah Bukti Lulus Uji Pengujian Kendaraan Bermotor	Indikator Sub kegiatan	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Jalan Untuk Jalan Kabupaten/ Kota
Target sub Kegiatan	: 1.000 Set	Target sub Kegiatan	12 Laporan
Anggaran		Anggaran	Rp 27.990.000
Sub Kegiatan	: Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Sub Kegiatan	: Penataan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
Sasaran Sub Kegiatan	Terlaksananya Pemeliharaan Sarana Dan Prasaran PKB	Sasaran Sub Kegiatan	Tertatanya pengaturan dan pola lalu lintas pada jaringan jalan kabupaten/kota
Indikator Sub kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor Yang Tersedia	Indikator Sub kegiatan	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
Target sub Kegiatan	8 Unit	Target sub Kegiatan	12 Laporan
Anggaran		Anggaran	Rp 40.755.000

Program		Pengelolaan Pelayaran	
Sasaran Program		Tingkat Pemenuhan Pengelolaan Pelayaran	
Indikator Program		Rasio Konektivitas Laut	
Target Program		55%	
Kegiatan	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak	Kegiatan	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Pemenuhan Pengelolaan Pelayaran	Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Pemenuhan Pengelolaan Pelayaran
Indikator kegiatan	Persentase Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau	Indikator kegiatan	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau Yang Dibangun
Target Kegiatan	1	Target Kegiatan	2 Unit
Sub Kegiatan	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai Dan Danau
Sasaran Sub kegiatan	Terlaksananya Pengendalian dan Pengamanan LLASDP	Sasaran Kegiatan	Teroperasinya dan Terpeliharanya Pelabuhan Sungai dan Danau
Indikator Sub Kegiatan	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Jalan Untuk Jalan Kabupaten/ Kota	Indikator kegiatan	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara
Target Sub Kegiatan	12 Laporan	Target Kegiatan	2 Unit
Anggaran	Rp 10.000.000	Anggaran	Rp 2.122.270.000
Sub Kegiatan		Sub Kegiatan	Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau
Sasaran Sub Kegiatan		Sasaran Kegiatan	Terlaksananya Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau
Indikator Sub kegiatan		Indikator kegiatan	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pelihara
Target sub Kegiatan		Target Kegiatan	1 Unit
Anggaran		Anggaran	Rp 169.000.000

MISI 2 : Berikah dalam peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik			
TUJUAN : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berintegritas dan adaptif			
INDIKATOR : NILAI AKIP OPD			
SASARAN STRATEGIS : Meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah			
INDIKATOR :	Nilai AKIP OPD	Target :	83
	IKM	Target :	82
	Skor MCSP KPK	Target :	
TUJUAN OPD : Terwujudnya Kualitas Pelayanan Dan Konktivitas Transportasi Dari Desa ke Kota Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi.			
Sasaran OPD 1 : Meningkatkan Aksesibilitas Masyarakat Melalui Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Transportasi Darat Dan Laut			
Sasaran OPD 2 : Meningkatkan Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Darat dan Laut			
Sasaran Pendukung : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah dan Pengelolaan Risiko OPD			

NO	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR TUJUAN	TARGET TAHUN 2026	
1	1. Terwujudnya Kualitas Pelayanan Dan Konktivitas Transportasi Dari Desa ke Kota Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi.	1. Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota	58,6%	
		2. Jumlah Halte Sungai Yang Dihangus	2 Unit	
		3. Jumlah Mobilitas Orang/Batang Melalui Pelabuhan/Dermaga/ Terminal Perairan Yang Tersedia	221.000 Orang/ 21.000 Ton	
		4. Jumlah Fasilitas Keselamatan dan Perlengkapan Jalan Yang Tersedia	40 Unit	
		2. - Angka Lalu Lintas Harian Rata-Rata Tahunan (LHRT) Ruan Jalan	Rasio B (0,33-0,44)	
		3. Jumlah Kendaraan Yang Memenuhi Lask Angkutan Jalan	1.750 Unit	
		4. Prediksi Menurunnya Jumlah Angka Kecelakaan Darat dan Laut	130 Kasus	
		5. Indeks Kepuasan Masyarakat	82	
2	2. Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	2. Nilai SAKIP Opd	83 (A)	
NO	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR TUJUAN	TARGET - TAHUNAN	
			2026	2030
1	1.1. Meningkatkan Aksesibilitas Masyarakat Melalui Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Transportasi Darat Dan Laut	1. Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota	58,6%	61%
		2. Jumlah Halte Sungai Yang Dihangus	2 Unit	2 Unit
		3. Jumlah Mobilitas Orang/Batang Melalui Pelabuhan/Dermaga/ Terminal Perairan Yang Tersedia	221.000 Orang/ 21.000 Ton	223.000 Orang/ 24.000 Ton
		1. Jumlah Fasilitas Keselamatan dan Perlengkapan Jalan Yang Tersedia	40 Unit	55 Unit
		2. - Angka Lalu Lintas Harian Rata-Rata Tahunan (LHRT) Ruan Jalan	Rasio B (0,33-0,44)	Rasio B (0,33-0,44)
		3. Jumlah Kendaraan Yang Memenuhi Lask Angkutan Jalan	1.65 Unit	1950 Unit
		4. Prediksi Menurunnya Jumlah Angka Kecelakaan Darat dan Laut	120 Kasus	90 Kasus
		1. Indeks Kepuasan Masyarakat	82	88
3	2.1. Meningkatkan kualitas Pelayanan Perangkat Daerah dan Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah	2. Nilai SAKIP Opd	83 (A)	92 (A)

Program	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sasaran Kegiatan	2.1. Meningkatkan kualitas Pelayanan Perangkat Daerah dan Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah
Indikator Program	2.1.1. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat
Target Program	2.1.2. Nilai AKIP OPD
	82
	83 (A)

Kegiatan	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sasaran Kegiatan	Tingkat Pemenuhan Administrasi Perkantoran
Indikator Kegiatan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia
Target Kegiatan	16 Dok

Sub Kegiatan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Sasaran Sub kegiatan	Tersesutunya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Indikator Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Target Sub Kegiatan	9 Dok
Anggaran	Rp10.166.000,00

Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Sasaran Sub kegiatan	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Indikator Sub Kegiatan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Target Sub Kegiatan	3 Laporan
Anggaran	Rp2.340.000,00

Sub Kegiatan	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sasaran Sub kegiatan	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Indikator Sub Kegiatan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Target Sub Kegiatan	3 Laporan
Anggaran	Rp4.212.000,00

Kegiatan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sasaran Kegiatan	Tingkat Pemenuhan Administrasi Perkantoran
Indikator Kegiatan	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Target Kegiatan	100%

Sub Kegiatan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sasaran Sub kegiatan	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN
Indikator Sub Kegiatan	Jumlah Orang/Bulan yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
Target Sub Kegiatan	12 Bulan
Anggaran	Rp5.075.082.302,00

Sub Kegiatan	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Sasaran Sub kegiatan	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Indikator Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Target Sub Kegiatan	1 Dokumen
Anggaran	Rp228.380.000,00

Kegiatan	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
Sasaran Kegiatan	Tingkat Pemenuhan Administrasi Perkantoran
Indikator Kegiatan	Jumlah Kartu Inventaris/ Dokumen Aset yang Tersedia
Target Kegiatan	1 Dok

Sub Kegiatan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
Sasaran Sub kegiatan	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
Indikator Sub Kegiatan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
Target Sub Kegiatan	1 Dok
Anggaran	Rp8.500.000,00

Kegiatan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sasaran Kegiatan	Tingkat Pemenuhan Administrasi Perkantoran
Indikator Kegiatan	Tingkat Kehadiran Pegawai/ASN
Target Kegiatan	12 Bulan

Sub Kegiatan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
Sasaran Sub kegiatan	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
Indikator Sub Kegiatan	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
Target Sub Kegiatan	12 Bulan
Anggaran	

Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sasaran Kegiatan	Tingkat Pemenuhan Administrasi Perkantoran
Indikator Kegiatan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran
Target Kegiatan	12 Bulan

Sub Kegiatan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Sasaran Sub kegiatan	Terlaksananya Pengadaan Komponen Instalasi Listrik
Indikator Sub Kegiatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
Target Sub Kegiatan	210 Paket
Anggaran	Rp5.394.200,00

Sub Kegiatan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sasaran Sub kegiatan	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Indikator Sub Kegiatan	Penyediaan Peralatan danJumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Perlengkapan Kantor
Target Sub Kegiatan	7 Paket
Anggaran	Rp36.049.400,00

Sub Kegiatan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Sasaran Sub kegiatan	Tersedianya Bahan Logistik Kantor
Indikator Sub Kegiatan	Jumlah Belanja Makan dan Minum Rapat
Target Sub Kegiatan	800 Paket
Anggaran	Rp12.000.000,00

Sub Kegiatan	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan
Sasaran Sub kegiatan	Tersedianya Barang Cetak dan Pengadaan
Indikator Sub Kegiatan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaanyang Disediakan
Target Sub Kegiatan	12 Bulan
Anggaran	Rp6.798.000,00

Sub Kegiatan	Penyediaan Peralatan danJumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Perlengkapan
Sasaran Sub kegiatan	Tersedianya Bahan Biscan dan Peraturan Perundangan
Indikator Sub Kegiatan	Jumlah anggaran Surat Kabar Harian
Target Sub Kegiatan	12 Example
Anggaran	Rp0,00

Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Sasaran Sub kegiatan	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Indikator Sub Kegiatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Target Sub Kegiatan	12 Bulan
Anggaran	Rp121.590.400,00

Kegiatan	Pengadaan Barang Milik Daerah
Sasaran Kegiatan	Tingkat Pemenuhan Administrasi Perkantoran
Indikator Kegiatan	Jumlah Pengadaan BMD Penunjang Urusan OPD
Target Kegiatan	26 unit

Sub Kegiatan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Sasaran Sub kegiatan	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Indikator Sub Kegiatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang tersedia
Target Anggaran	2 Unit
Anggaran	Rp0,00

Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sasaran Kegiatan	Terpenuhihnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Indikator Kegiatan	Cakupan Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Target Kegiatan	12 Bulan

Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Sasaran Sub kegiatan	Tersedianya Jasa Surat Menyurat
Indikator Sub Kegiatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Target Sub Kegiatan	12 Bulan
Anggaran	Rp6.000.000,00

Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Sasaran Sub kegiatan	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Indikator Sub Kegiatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
Target Sub Kegiatan	12 Bulan
Anggaran	Rp100.000.000,00

Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sasaran Sub kegiatan	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor
Indikator Sub Kegiatan	Jumlah LaporanPenyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yangDisediakan
Target Sub Kegiatan	12 Bulan
Anggaran	Rp1.638.053.000,00

Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sasaran Kegiatan	Tingkat Pemenuhan Administrasi Perkantoran
Indikator Kegiatan	Terpenuhihnya Pemeliharaan BMD Penunjang urusan Pemerintah Daerah
Target Kegiatan	95 unit

Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pjakk dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Sasaran Sub kegiatan	Terpenuhihnya Jasa Pemeliharaan Kendaraan, Pjakk dan Perizinan
Indikator Sub Kegiatan	Jumlah Kendaraan Operasional Yang Terpelihara
Target Sub Kegiatan	Jumlah Asuransi Kendaraan Jumlah Pajak Kendaraan Jumlah Peralatan Mesin Kendaraan Jumlah Penggantian suku Cadang 32 Unit
Target Anggaran	Rp240.130.000,00

Sub Kegiatan	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
Sasaran Sub kegiatan	Terpeliharanya Aset Tetap OPD
Indikator Sub Kegiatan	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara
Target Sub Kegiatan	54 Unit
Anggaran	Rp20.900.000,00

Sub Kegiatan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Sasaran Sub kegiatan	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Indikator Sub Kegiatan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Target Sub Kegiatan	1 Unit
Anggaran	Rp61.220.000,00